REVISI RENSTRA

2017 - 2022

DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA PAYAKUMBUH

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada ALLAH SWT, dimana dengan berjalannya waktu tanpa terasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh telah mengakhiri Program Rencana Strategis 2012-2017. Banyak Pengalaman yang mempengaruhi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh untuk lebih berperan, berkontribusi, serta membangun interaksi dengan semua elemen penggerak pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari peran aktif seluruh personil yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, kerjasama dan atau kemitraan dengan semua stakeholder dalam niat baik maupun motivasi untuk menyediakan layanan terbaik bagi Kota Payakumbuh.

Saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh memasuki Rencana Strategis 2017-2022. Rencana Strategis tersebut dirumuskan dengan mendasarkan pada pengalaman dan pembelajaran pada periode strategis sebelumnya dengan memperhatikan harapan serta kebutuhan masyarakat. Selain itu Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh juga memperhatikan perkembangan arah pembangunan nasional, regional, sektoral maupun kebijakan lokal sehingga arah gerakan pembangunan yang dilakukan sejalan, serasi dan selaras dengan kebutuhan dan kapasitas daerah.

Dengan izin Allah SWT, dan juga dengan dukungan internal maupun eksternal, sinergisitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dengan semua stakeholder terkait diharapkan mampu menyediakan pelayanan prima demi meningkatkan kepuasan masyarakat, sehingga tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mensukseskan program prioritas daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastuktur perkotaan, dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat tercapai.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST.M.Si

NIP. 19750402 200003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 4
DAFTAR gambar 5
BAB 1| 6
1.1 LATAR BELAKANG 6
1.2 LANDASAN HUKUM 6
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 8
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 8
BAB 2| 10
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH 10
2.2 SUMBER DAYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 19
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) 19
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana 19
2.2.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kewilayahan 20
2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 28
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 41
BAB 3| 42
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 42
3.2 TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH 43
3.3 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 44
3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 46
3.4.1 Struktur Ruang 46

3.4.2 Pola Ruang 46
3.4.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis 46
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 47
3.5.1 Metode Penentuan Isu-isu Strategis 47
3.5.2 Isu-isu Strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 48
BAB 4| 50
4.1 VISI DAN MISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 50
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 50
BAB 5| 52
BAB 5| 53
BAB 6| 56
BAB 6| 57
BAB 7| 78
PENUTUP 80

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai (ASN) Berdasarkan Golongan 19
Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan 19
Tabel 2. 3 Inventaris Sarana dan Prasarana Dinas PUPR 19
Tabel 2. 4 Kondisi Jalan di Kota Payakumbuh 20
Tabel 2. 5 Jembatan di Kota Payakumbuh 20
Tabel 2. 6 Panjang Jembatan berdasarkan Kondisi dirinci Per Kecamatan di Kota Payakumbuh. 20
Tabel 2. 7 Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase di Kota Payakumbuh 21
Tabel 2. 8 Kondisi Sarana Prasarana Pengairan Tahun 2016 22
Tabel 2. 9 Panjang Sungai dan Penanganan Tebing Sungai di Kota Payakumbuh 24
Tabel 2. 10 Panjang Jaringan Drainase Terbangun Sampai Tahun 2016 24
Tabel 2. 11 Panjang Pembangunan Jalan Lingkungan/Perdesaan 24
Tabel 2. 12 Kondisi Prasarana Sanitasi Komunal Terbangun 25
Tabel 2. 13 Data Pendukung Penataan Ruang pada Tahun 2016 25
Tabel 2. 14 Permasalahan Konflik Pertanahan Untuk Pengadaan Tanah Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Payakumbuh 27
Tabel 2. 15 Permasalahan Konflik Pertanahan Untuk Pemanfaatan Tanah Permko yang telah bersertifikat 27
Tabel 2. 16 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2017..... 29
Tabel 2. 17 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2017..... 31

Tabel 3. 1 Muatan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat..... 45
Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh 48

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 51

Tabel 5. 1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Misi 1 54

Tabel 6. 1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017-2022 62

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas PUPR Kota Payakumbuh 18

BAB 1 | PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintahan daerah wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyusun Renstra sebagai penjabaran RPJMD dalam ruang lingkup Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu Institusi Teknis dalam melaksanakan Pembangunan di Kota Payakumbuh.

Renstra merupakan acuan dalam pelaksanaan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Periode 5 (lima) tahun yaitu 2017-2022 yang merupakan hasil integrasi dari rencana-rencana pembangunan pusat, regional dan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam kaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrument pertanggungjawaban, Renstra merupakan salah satu pedoman untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam jangka 1 hingga 5 tahun dan diukur dari besarnya capaian indikator pelayanan untuk masing-masing program/ kegiatan. Perencanaan strategis instansi pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik regional, nasional maupun global.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mengatur tentang sistem, mekanisme, proses dan prosedur dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;

21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 –2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor17);
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1);
26. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 25);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen yang dapat dijadikan sebagai acuan resmi bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, swasta dan masyarakat luas dalam pembangunan bidang infrastruktur dasar ke-PU-an dan penataan ruang di Kota Payakumbuh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah:

1. Menjabarkan secara umum kondisi awal urusan Pekerjaan Umum, urusan Penataan Ruang dan Pertanahan di Kota Payakumbuh sekaligus menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017-2022;
2. Memberi arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pertanahan tahun 2017-2022;
3. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban sekaligus evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dalm kurun kinerja strategis 2017-2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

Menjelaskan tentang peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, Sumber Daya OPD baik SDM dan Aset, Pencapaian Kinerja Pelayanan serta Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan, dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2017- 2022.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Memuat indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang secara langsung menunjukan kinerja yang telah dan akan dicapai dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB 2
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUPR

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh merupakan salah satu SKPD yang ada di Pemerintahan Kota Payakumbuh yang berkewenangan dan bertangggung jawab untuk memberikan pelayanan publik dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan Pertanahan dengan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan Pertanahan;
b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan Pertanahan;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan program kegiatan pemerintahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan Pertanahan;
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan fungsi sebagai berikut:

a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan;
e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Dinas;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi sub-bagian:

1. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/ kegiatan, pengevaluasian laporan dari masing-masing bidang yang ada pada Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;

b. Pengoordinasian penyusunan Perencanan Daerah yang meliputi penghimpunan rencana program/ kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas;
c. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, dengan Fungsi sebagai berikut:
   a. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana, aset.;
   b. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
   c. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan pada Dinas dengan fungsi sebagai berikut:
   a. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
   b. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dinas;
   c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Sumber Daya Air

Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Air (SDA), Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang SDAmempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Sumber Daya Air;
b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Sumber Daya Air membawahi:

1. Seksi Sungai dan Air Baku mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Sungai dan Air baku, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Sungai dan Air baku menyelenggarakan fungsi:
   a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Sungai dan Air baku;
   b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Sungai dan Air baku;
   c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Sungai dan Air baku;
   d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Sungai dan Air baku;
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Irigasi dan Rawa mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Irigasi dan Rawa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Irigasi dan Rawa menyelenggarakan fungsi:
   a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Irigasi dan Rawa;
   b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Irigasi dan Rawa;
   c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Irigasi dan Rawa;
   d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Irigasi dan Rawa;
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Operasional dan

Pemeliharaan Sumber Daya Air. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Cipta Karya, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Cipta Karya;
b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Cipta Karya;
c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya;
d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Cipta Karya membawahi :

1. Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Tata Bangunan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Tata Bangunan menyelenggarakan fungsi:
   a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Tata Bangunan;
   b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Tata Bangunan;
   c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Tata Bangunan;
   d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Tata Bangunan;
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) menyelenggarakan fungsi:
   a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP);
   b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP);
   c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP);
   d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP);
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pengembangan Kawasan Strategis mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Kawasan Strategis. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengembangan Kawasan Strategis menyelenggarakan fungsi:
   a. Perencanaan program kegiatan urusan Pengembangan Kawasan Strategis;
   b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan Strategis;
   c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Kawasan Strategis;

d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Pengembangan Kawasan Strategis;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Bina Marga, dengan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Bina Marga;
b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Bina Marga;
c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Marga;
d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Bina Marga membawahi :

1. Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan, untuk menyelenggarakan fungsi:
   a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
   b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
   c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
   d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
   a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
   b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
   c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
   d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pengembangan Bangunan Pelengkap Jalan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Bangunan Pelengkap Jalan, untuk menyelenggarakan tugas Seksi Pengembangan Bangunan Pelengkap Jalan mempunyai fungsi:
   a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pengembangan Bangunan Pelengkap Jalan;
   b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pengembangan Bangunan Pelengkap Jalan;
   c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Bangunan Pelengkap Jalan;
   d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Pengembangan Bangunan Pelengkap Jalan;
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Penataan Ruang, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Penataan Ruang;

b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Penataan Ruang;
c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penataan Ruang;
d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penataan Ruang;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penataan Ruang membawahi:

1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:
   a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang;
   b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang;
   c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang;
   d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang;
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:
   a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang;
   b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang;
   c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang;
   d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang;
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pertanahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
   a. Perencanaan program kegiatan Seksi Pertanahan;
   b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pertanahan;
   c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pertanahan;
   d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Pertanahan;
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan

Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan;
b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan;
c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan;
d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perizinan Bangunan dan Jasa Konstruksi membawahi:

1. Seksi Perencanaan Bina Konstruksi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Bina Konstruksi, Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Perencanaan Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Perencanaan Bina Konstruksi;
b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Perencanaan Bina Konstruksi;
c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Bina Konstruksi;
d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Perencanaan Bina Konstruksi;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:
   a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
   b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
   c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
   d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Perizinan Bangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Perizinan Bangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Perizinan Bangunan menyelenggarakan fungsi:
   a. Perencanaan program kegiatan Seksi Perizinan Bangunan;
   b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Perizinan Bangunan;
   c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Perizinan Bangunan;
   d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Perizinan Bangunan;
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, maka pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dibentuk UPTD Tipe A: UPTD Alat Berat, dan UPTD Laboratorium Konstruksi yang dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala UPTD Alat Berat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan Alat Berat, sedangkan Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengendalian mutu/ kualitas infrastruktur bidang ke PU-an. Baik Kepala UPTD Alat Berat dan Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi kedinasan sebagai berikut:

a. penyusunan kegiatan teknis operasional;
b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
e. pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
f. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/ kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, dan tugas umum lainnya. Disamping itu terkait dalam pelaksanaan tugas kedinasan, terdapat Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan, dengan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, berdasarkan Perwako Nomor 25 Tahun 2018, dapat dilihat pada gambar 2.1

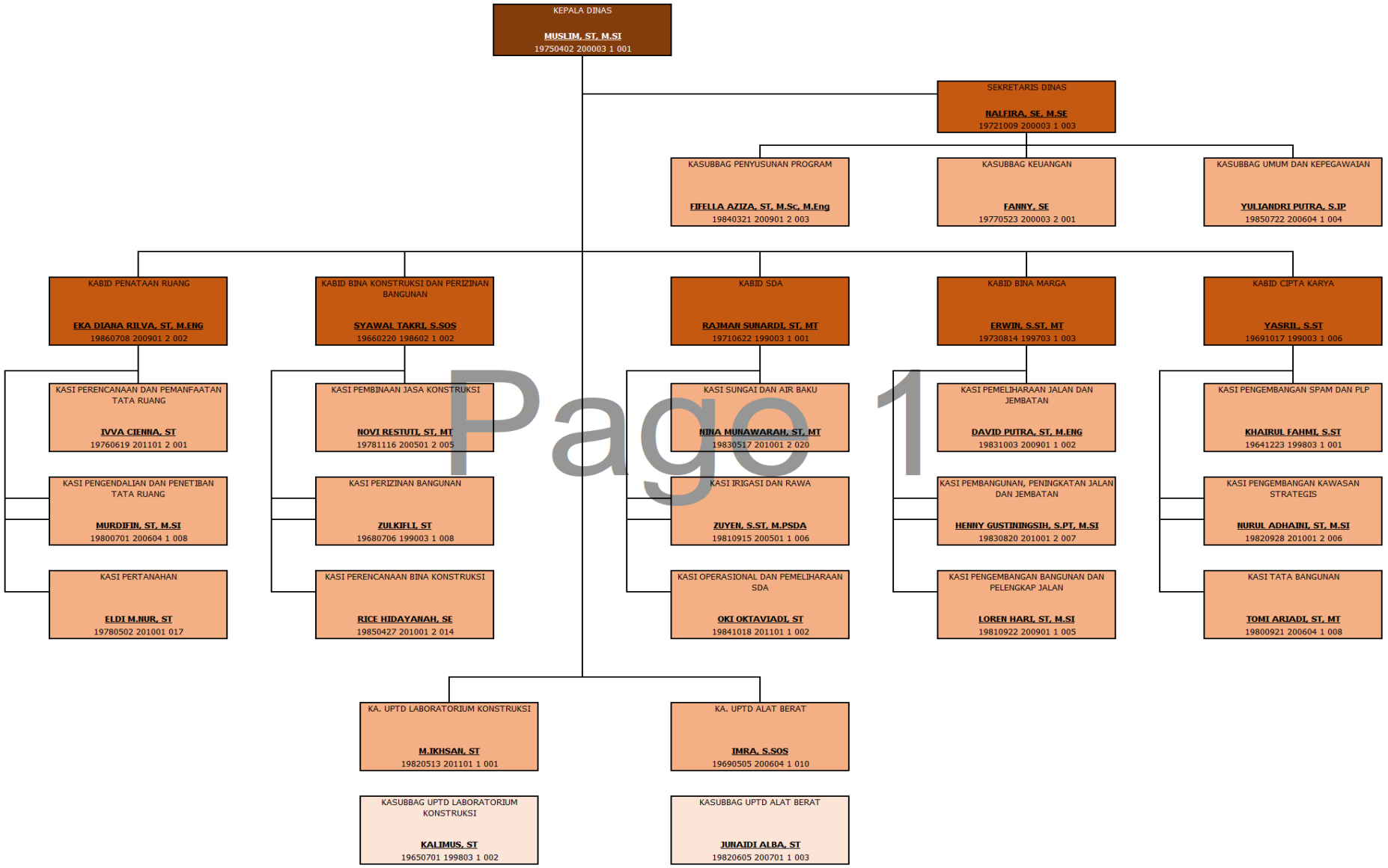

Page 1

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh (Kondisi 16 Agustus 2019)

2.2 SUMBER DAYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disamping memiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 65 orang, juga dibantu 69 Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai pelaksana operasional di lapangan maupun perbantuan administratif pada dinas.

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai (ASN) Berdasarkan Golongan

NO	KLASIFIKASI GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Pembina; Golongan IV	6	9.09%
2.	Penata; Golongan III	38	57.58%
3.	Pengatur; Golongan II	21	31.82%
4.	Juru; Golongan I	1	1.52%
Jumlah		66	100.00%

Sumber: Bezetting Dinas PUPR Kondisi Juni 2018

Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	SD	1	1.52%
2.	SLTP	3	4.55%
3.	SLTA	16	24.24%
4.	Diploma (D3)	5	7.58%
5.	Sarjana (S1)	29	43.94%
6.	Pasca Sarjana/ Master (S2)	12	18.18%
Jumlah		66	100.00%

Sumber: Bezetting Dinas PUPR Kondisi Juni 2018

Berdasarkan tabel 2.1 dan tabel 2.2 terlihat bahwa ASN terdidik, dengan jenjang pendidikan (Diploma, Strata, dan Pasca Sarjana) sebanyak 69.70% atau dapat dikatakan perbandingan antara tenaga terdidik dan tenaga operasional adalah 2:1 Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas SDM di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkantor berada pada kondisi mampu untuk menyediakan layanan yang berkualitas bagi masyarakat, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan kondisi Bulan Juni 2018 (digambarkan pada tabel 2.3) dimana untuk alat berat yang tersedia hanya 3 (tiga) yang dalam kondisi baik, sedangkan sisanya 5 (lima) dalam kondisi rusak. Keadaan ini tidak hanya berpengaruh pada operasional kedinasan, tetapi juga pada masyarakat, karena alat berat tersebut tidak hanya digunakan untuk operasional tetapi juga sebagai salah satu pendapatan daerah melalui peminjaman alat berat, karena itu untuk tahun 2018 dilaksanakan pengadaan alat berat yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional dengan mempertimbangkan usulan atau persepsi dari amsyarakat maupun keuangan daerah. Disamping itu untuk meningkatkan kualitas pembangunan fisik daerah. Dibentuk UPTD Laboratorium Konstruksi, yang direncakan pada tahun 2019 sudah aktif beroperasional.

Tabel 2. 3 Inventaris Sarana dan Prasarana Dinas PUPR

NO	JENIS SARANA PRASARANA	KONDISI			JUMLAH
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1.	Peralatan Kantor				
	a. Meja & Kursi	200	32	10	242
	b. Komputer/laptop	23	4	2	29
	c. Printer	22	3	3	28
2.	Bangunan	3			3

NO	JENIS SARANA PRASARANA	KONDISI			JUMLAH
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
3.	Kendaraan Bermotor				
	a. Sepeda Motor	26	7	3	36
	b. Minibus	2	1		3
	c. Pick-up	6	1		7
	d. Truck (DT)	1	1		2
	e. Truck Telescipit		1		1
	f. Truck Tanki Tinja	1			1
	g. Roller		2	1	3
	h. Baby Roller	1			1

Sumber: Lap. Asset Dinas PUPR Kondisi Maret 2018

2.2.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kewilayahan

2.2.3.1 Urusan Pekerjaan Umum; Bidang Bina Marga

Kondisi sarana dan prasarana bidang Bina Marga Kota Payakumbuh yang meliputi jalan dan jembatan ditinjau dari kondisinya sampai dengan tahun 2016.

Tabel 2. 4 Kondisi Jalan di Kota Payakumbuh

NO	JENIS KONDISI	TAHUN 2016 STATUS PEMERINTAH YANG BERWENANG			JUMLAH
		NASIONAL	PROPINSI	KOTA	
1	Baik	15,447	16,220	83,640	115,307
2	Sedang	-	-	52,126	52,126
3	Rusak Ringan	-	-	93,772	93,772
4	Rusak Berat	-	-	25,141	25,141
Total		15,447	16,220	254,678	286,345

Sumber: Data Infrastruktur ke-PU-an dalam angka tahun 2016

Dari tabel 2.4 dapat dilihat bahwa prasarana jalan yang ada di Kota Payakumbuh pada tahun 2016 merupakan jalan dengan permukaan aspal dengan panjang 286,345 km, dimana 115,307 km dalam kondisi baik (40,26%), kondisi sedang sepanjang 52,126 km meter (18,20%) dan sisanya 118,91 km dalam kondisi rusak dan rusak berat (41,5%).

Tabel 2. 5 Jembatan di Kota Payakumbuh

NO	TIPE STRUKTUR	TAHUN 2016		JUMLAH
		JUMLAH JEMBATAN (UNIT)	PANJANG JEMBATAN (METER)	
1	Jembatan Gorong-gorong Kotak	18	76,00	76,00
2	Jembatan Gorong-gorong Pipa	0	0	0
3	Jembatan Gantung	1	41,00	41,00
4	Jembatan Gelagar	25	221,00	221,00
5	Jembatan Pelengkung	8	63,1	63,1
6	Jembatan Rangka	6	236,00	236,00
7	Jembatan Plat	26	108,80	108,80
8	Jembatan Gelagar Komposit	2	54	135,50
Total		**86**	**799,9**	**799,9**

Sumber: Dinas PU Kota Payakumbuh, 2016

Tabel 2. 6 Panjang Jembatan berdasarkan Kondisi dirinci Per-kecamatan di Kota Payakumbuh

NO	KECAMATAN	KONDISI				
		TAHUN 2016				JUMLAH
		B	S	R	RB	
1	Payakumbuh Barat	274,4	46,60	-	3,00	324,00
2	Payakumbuh Timur	59,70	31,00	4,00	-	94,70
3	Payakumbuh Utara	111,00	111,50	-	10,00	232,50
4	Payakumbuh Selatan	19,40	36,30	-	-	55,70
5	Lamposi Tigo Nagori	21,50	42,50	29,00	-	93,00
Total		**486,00**	**267,90**	**33,00**	**13,00**	**799,90**

Sumber: Data Infrastruktur ke-PU-an dalam angka tahun 2016

Dari data tabel 2.5 dan tabel 2.6 menunjukkan bahwa jumlah sarana dan prasarana jembatan di Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 86jembatan dan panjang total jembatan adalah 799,90 m dengan berbagai jenis konstruksi. Kondisi dari jembatan yang ada di 5 (lima) Kecamatan yang adalah adalah 486 m kondisi baik dan 46 m kondisi rusak. Berdasarkan data kondisi tersebut masih perlu upaya peningkatan dan pemeliharaan jembatan pada tahun yang akan datang dalam rangka meningkatkan aksesibilitas.

Tabel 2. 7 Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase di Kota Payakumbuh

NO	NAMA RUAS	PANJANG JALAN (KM)	PANJANG TROTOAR (M)		LEBAR TROTOAR (M)		DRAINASE	
			KIRI	KANAN	KIRI	KANAN	ADA	TIDAK ADA
1	Jl. Soekarno Hatta	3.018	1.456,50	2.353,90	2,00	2,50	√	
2	Jl. Ade Irma Suryani	464	241,30	342,00	1,50	2,00	√	
3	Jl. Singa Harau	1.262	611,50	-	2,00	-	√	
4	Jl. Anggrek	451	-	200,10	-	2,00		√
5	Jl. Pacuan	1.265	893,80	830,00	2,00	2,00	√	
6	Jl. Sudirman	4.700	1.106,20	1.667,70	1,60	1,60	√	
7	Jl. Veteran	824	565,00	620,00	1,50	1,50	√	
8	Jl. M. Yamin	3.605	867,20	1.571,60	-	-	√	
9	Jl. A Yani	1.352	840,70	575,50	1,50	1,50	√	
10	Jl. Tan Malaka	3.633	744,20	2.102,30	1,80	1,50	√	
11	Jl. Pahlawan	2.007	748,60	1.370,00	-	-	√	
12	Jl. Rasuna Said	6.002	530,80	1.687,20	1,70	1,50	√	
13	Jl. Diponegoro	6.201	134,20	-	1,70	-		√
14	Jl. Asoka	600	129,50	88,30	1,40	1,40	√	
15	Jl. Gajah Mada	3.482	142,20	147,20	1,40	1,50	√	
16	Jl. Pemuda I	387	160,00	-	1,50	-	√	
17	Jl. Meranti	575	368,40	355,70	1,40	1,40	√	
18	Jl. Dr. Hamka	2.694	-	270,20	-	1,70	√	
19	Jl. R.A. Kartini	2.391	113,00	-	1,60	-	√	
20	Jl. Piobang	501	91,30	110,70	1,10	1,00	√	
21	Jl. Nasrudin Toha	563	224,80	181,00	1,00	1,00	√	
22	Jl. Arisun	537	166,40	125,20	1,20	1,20	√	
Total Panjang		**46.514**	**10.136**	**14.599**				

Sumber: Dinas PU Kota Payakumbuh, 2016

Dari data Tabel 2.7dapat dilihat bahwa dari 261,437 Km total panjang yang ada di Kota Payakumbuh, baru sekitar 46,514 km jalan yang ada memiliki trotoar, atau 17.79% dari jalan yang ada di Kota Payakumbuh yang dilengkapi dengan trotoar dan 15.24% dari jalan di Kota Payakumbuh yang memiliki drainase.

2.2.3.2 Urusan Pekerjaan Umum; Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Sarana dan prasarana di bidang pengelolaan sumber daya air, sampai dengan akhir tahun 2016 telah terlaksana kegiatan pembangunan pengelolaan sumber daya air dengan hasil sebagai mana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2. 8 Kondisi Sarana Prasarana Pengairan Tahun 2016

NO.	NAMA DAERAH IRIGASI/ DAERAH RAWA	LUAS AREAL (HA)	KONDISI (%)				KONDISI (HA)			
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT
1	DI. Batang Pulau	387.0	75.00	10.00	15.00	-	290.25	38.70	58.05	-
2	DI. Sei Baih	80.0	53.00	-	45.00	2.00	42.40	-	36.00	1.60
3	DI. Sei Talang	35.0	60.00	10.00	30.00	-	21.00	3.50	10.50	-
4	DI. Bendung Beringin	40.0	60.00	6.00	30.00	4.00	24.00	2.40	12.00	1.60
5	DI. Batang Sikali	51.0	65.00	14.00	18.00	3.00	33.15	7.14	9.18	1.53
6	DI. Bandar Ngalau	124.0	35.00	35.00	30.00	-	43.40	43.40	37.20	-
7	DI. Bulakan	390.0	52.56	30.00	17.44	-	204.98	117.00	62.02	-
8	DI. Bandar Baru	14.0	43.00	9.00	48.00	-	6.02	1.26	6.72	-
9	DI. Bandar Gadang	64.0	54.00	3.00	43.00	-	34.56	1.92	27.52	-
10	DI. Bandar Kubang	8.51	55.00	6.00	36.00	3.00	4.68	0.51	3.06	0.26
11	DI. Bandar Cangkiang	10.0	65.00	15.00	20.00	-	6.50	1.50	2.00	-
12	DI. Bandar Taruko I	12.0	55.00	20.00	25.00	-	6.60	2.40	3.00	-
13	DI. Bandar Taruko II	10.0	55.00	20.00	25.00	-	5.50	2.00	2.50	-
14	DI. Baliak Parik	12.0	60.00	15.00	25.00	-	7.20	1.80	3.00	-
15	DI. Bandar Jariang	5.0	40.00	20.00	40.00	-	2.00	1.00	2.00	-
16	DI. Bandar Guguk	10.0	-	30.00	70.00	-	-	3.00	7.00	-
17	DI. Bandar Sikumbang	15.0	60.00	12.00	28.00	-	9.00	1.80	4.20	-
18	DI. Bandar Napar	15.0	78.00	-	22.00	-	11.7	-	3.30	-
19	DI. Bandar Jambu	13.0	40.00	60.00	-	-	5.20	7.80	-	-
20	DI. Bandar Sawah Liek	16.0	30.00	45.00	25.00	-	4.80	7.20	4.00	-
21	DI. Bandar Kalumpang	15.0	40.00	29.00	31.00	-	6.00	4.35	4.65	-
22	DI. Bandar Datar	16.0	38.00	30.00	32.00	-	6.08	4.80	5.12	-
23	DI. Bandar Patai	81.0	45.00	35.00	20.00	-	36.45	28.35	16.20	-
24	DI. Bandar Sikampuang	38.0	70.00	15.00	15.00	-	26.60	5.70	5.70	-
25	DI. Bandar Padang Jariang	81.0	67.00	25.00	8.00	-	54.27	20.25	6.48	-
26	DI. Bandar Piraweh	26.0	70.00	20.00	10.00	-	18.20	5.20	2.60	-
27	DI. Bandar Darek	64.0	50.00	30.00	20.00	-	32.00	19.20	12.80	-
28	DI. Bandar Sawah Tobek	25.0	-	20.00	80.00	-	-	5.00	20.00	-
29	DI. Bandar Tanjung Aur Kuning	20.0	-	35.00	65.00	-	-	7.00	13.00	-
30	DI. Bandar Lakung Sinabok	5.0	-	30.00	70.00	-	-	1.50	3.50	-
31	DI. Bandar Dalam	7.0	20.00	40.00	40.00	-	1.40	2.80	2.80	-

NO.	NAMA DAERAH IRIGASI/ DAERAH RAWA	LUAS AREAL (HA)	KONDISI (%)				KONDISI (HA)			
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT
32	DI. Bandar Bukareh	13.0	24.40	34.18	41.42	-	3.17	4.44	5.38	-
33	DI. Bandar Sei Lindiang	20.0	70.00	15.00	15.00	-	14.00	3.00	3.00	-
34	DI. Bandar Labuah	16.5	40.00	40.00	20.00	-	6.60	6.60	3.30	-
35	DI. Bandar Panampuang	7.0	-	20.00	80.00	-	-	1.40	5.60	-
36	DI. Bandar Tanjuang	83.0	10.00	40.00	50.00	-	8.30	33.20	41.50	-
37	DI. Bandar Luak Samak	7.0	-	50.00	50.00	-	-	3.50	3.50	-
38	DI. Bandar Luak Ampuh	15.0	-	30.00	70.00	-	-	4.50	10.50	-
39	DI. Bandar Lurah Taunan	15.0	-	60.00	40.00	-	-	9.00	6.00	-
40	DI. Bandar Kincir	10.0	-	60.00	40.00	-	-	6.00	4.00	-
41	DI. Padang Kasai	28.0	60.00	20.00	20.00	-	16.80	5.60	5.60	-
42	DI. Tanjung Rajo	16.0	55.00	-	40.00	5.00	8.80	-	6.40	0.80
43	DI. Jembatan Cangkiang	7.0	15.00	65.00	20.00	-	1.05	4.55	1.40	-
44	DI. Bandar Kuok	15.0	-	25.00	75.00	-	-	3.75	11.25	-
45	DI. Bandar Tobek Kincia	17.0	-	35.00	65.00	-	-	5.95	11.05	-
46	DI. Bandar Tanjung Cimotiah	15.0	-	35.00	65.00	-	-	5.25	9.75	-
47	DI. Tanjung Sipasan	10.0	-	40.00	60.00	-	-	4.00	6.00	-
48	DI. Bandar Kaluek	35.0	-	30.00	70.00	-	-	10.50	24.50	-
49	DI. Baramban Nan Tuo	10.0	42.00	5.00	49.00	4.00	4.20	0.50	4.90	0.40
50	DI. Bandar Rawang	10.0	38.00	35.00	27.00	-	3.80	3.50	2.70	-
51	DI. Bandar Simpang	16.0	25.00	60.00	15.00	-	4.00	9.60	2.40	-
52	DI. Tanjung Baukia	17.0	-	20.00	80.00	-	-	3.40	13.60	-
53	DI. Limau Munggu Gadang	25.0	-	35.00	65.00	-	-	8.75	16.25	-
54	DI. Bandar Guguak	12.0	55.00	-	45.00	-	6.60	-	5.40	-
55	DI. Bandar Atas Pandan	17.0	78.00	20.00	2.00	-	13.60	3.40	0.4	-
56	DI. Pincuran Tujuh	40.0	15.00	70.63	14.38	-	6.00	28.25	5.75	-
57	DI. Tanjung Panta	15.0	-	50.00	50.00	-	-	7.50	7.50	-
58	Di. Sei Talang (Sicincin)	10.0	-	80.00	20.00	-	-	8.00	2.00	-
59	DI. Bandar Nan Lambiang	25.0	40.00	60.00	-	-	10.00	15.00	-	-
60	DI. Bandar Talao	67.0	-	60.00	40.00	-	-	40.20	26.80	-
61	DI. Bandar Sawah Rawang	25.0	45.00	36.00	19.00	-	11.25	9.00	4.75	-
62	DI. Tembok Jua	75.0	35.00	25.00	40.00	-	26.25	18.75	30.00	-
63	DI. Bandar Simantuang	45.0	60.00	16.00	24.00	-	27.00	7.20	10.80	-

NO.	NAMA DAERAH IRIGASI/ DAERAH RAWA	LUAS AREAL (HA)	KONDISI (%)				KONDISI (HA)			
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT
64	DI. Bandar Simumbai	12.0	-	50.00	50.00	-	-	6.00	6.00	-
65	DI. Bandar Aia Nan Doreh	15.0	25.00	40.00	35.00	-	3.75	6.00	5.25	-
Jumlah		**2,455.0**					**1.118,77**	**634,77**	**695,27**	**6,19**

Sumber: Data Infrastruktur ke-PU-an dalam angka tahun 2016

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Luas Daerah Irigasi berdasarkan status kewenangan Kota adalah adalah **2,455** m^2 dari 65 DI yang ada. Sedangkan luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat berturut-turut adalah 1.118,77 Ha (45,55%), 634,77 Ha (26,22%), 695,27 Ha (28,32%) dan 6,19 Ha (0,25%).

Tabel 2. 9 Panjang Sungai dan Penanganan Tebing Sungai di Kota Payakumbuh

NO.	NAMA SUNGAI	EKSISTING		PENANGANAN S/D 2016	
		PANJANG (KM)	LEBAR (M)	PANJANG (KM)	PERSENTASE
1	Batang Agam	15,60	25,00	1,956	13%
2	Batang Lampasi	10,40	20,00	1,826	18%
3	Batang Pulau	11,40	5,00	1,240	11%
4	Batang Sikali	10,00	6,00	0,940	9%
5	Baih	5,00	6,00	0,612	12%
6	Talang	5,00	5,00	0,618	12%
7	Tembok Jua	5,40	5,00	0,798	15%
8	Anak Pulau	1,20	5,00	0,389	32%
JUMLAH		64,00		8,379	13,09%

Sumber: Data Infrastruktur ke-PU-an dalam angka tahun 2016

2.2.3.3 Urusan Pekerjaan Umum; Bidang Cipta Karya

Untuk sarana dan prasarana di bidang Cipta Karya, sampai dengan akhir tahun 2016 telah terlaksana kegiatan pembangunan terutama di sektor penataan kawasan perumahan dan permukiman meliputi:

1. Panjang saluran pembuang/drainase yang terbangun
2. Panjang Jalan lingkungan permukiman/perdesaan yang terbangun
3. Jumlah sarana dan prasarana air limbah.

Tabel 2. 10 Panjang Jaringan Drainase Terbangun Sampai Tahun 2016

NO.	JENIS SARANA PRASARANA	KONDISI AWAL(KM)	TAHUN (KM)					
			2012(M)	2013(M)	2014(M)	2015(M)	2016(M)	TOTAL(KM)
1	Drainase yang terbangun	166.884	2.201,48	5.568,14	8.803,94	6.162,75	11.894,06	34.630,37

Sumber: Data Infrastruktur ke-PU-an dalam angka tahun 2016

Kondisi saluran/ drainase sampai akhir tahun 2016 telah dibangun dalam kondisi baik sepanjang 34.630,37 m. Jumlah panjang saluran tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan luas wilayah yang seharusnya dilayani, sehingga ke depan diharapkan adanya penambahan pembangunan saluran/ drainase untuk memperlancar pembuangan limbah perumahan dan permukiman. Untuk kondisi jalan lingkungan/ perdesaan yang merupakan bagian dari perumahan dan permukiman sampai dengan akhir tahun 2016 telah terlaksana seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 11 Panjang Pembangunan Jalan Lingkungan/Perdesaan

NO.	JENIS SARANA PRASARANA	KONDISI AWAL(KM)	TAHUN (KM)					
			2012(M)	2013(M)	2014(M)	2015(M)	2016(M)	TOTAL(KM)
1	Jalan Lingkungan/ Perdesaan	77,467		-	-	2.301,17	4.263,00	6.564,17

Sumber: Data Infrastruktur ke-PU-an dalam angka tahun 2016

Kondisi jalan lingkungan/ perdesaan yang telah dibangun sampai akhir tahun 2016 sepanjang 6.564,17 km. Cakupan layanan air limbah perkotaan baik dengan sistem terpusat maupun sistem komunal, dengan jumlah penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2016 sebanyak 123.654 jiwa baru terlayani 86% atau sebesar 10.634 jiwa. Dilihat dari data yang ada, hal ini berarti bahwa belum semua masyarakat terlayani kebutuhan pengelolaan air limbahnya. Hal ini merupakan prioritas program pembangunan yang harus segera dituntaskan, sesuai dengan target Universal Acces sektor air bersih dan sanitasi yang sudah harus tuntas pada tahun 2019.

Tabel 2. 12 Kondisi Prasarana Sanitasi Komunal Terbangun

NO	JENIS SARANA PRASARANA	KONDISI AWAL	TAHUN (UNIT)					
			2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
1	IPAL Komunal	46	7	6	5	8	96	168

Sumber: Dinas PU Kota Payakumbuh, 2016

2.2.3.4 Urusan Penataan Ruang dan Pertanahan

Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan penyelenggaran penataan ruang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Urusan penataan ruang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Perencanaan tata ruang suatu daerah kemudian diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Rencana tata ruang wilayah kota memuat:

1. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota
2. Rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem perkotaan diwilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kota
3. Rencana pola ruang wilayah kota yang meliputi kawasan lindung kota dan kawasan budi daya kota
4. Penetapan kawasan strategis kota
5. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dan
6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.

Rencana tata ruang wilayah kota menjadi pedoman untuk:

1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah
3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota
4. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antarsektor
5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi
6. Penataan ruang kawasan strategis kota

Dokumen penataan ruang yang telah disusun oleh Kota Payakumbuh yaitu:

1. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
2. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Data pendukung dalam perencanaan tata ruang pada tahun 2016 tertuang pada tabel 2.13 berikut:

Tabel 2. 13 Data Pendukung Penataan Ruang pada Tahun 2016

NO	JENIS DATA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Peta Blad Digital	30 buah	
2.	Bangunan yang disegel	25 kasus	

3.	Data jumlah Keterangan Rencana Kota / Advice Planning yang diterbitkan	**595 berkas**	
	Kecamatan Payakumbuh Barat	239 berkas	
	Kecamatan Payakumbuh Timur	111 berkas	
	Kecamatan Payakumbuh Selatan	68 berkas	
	Kecamatan Payakumbuh Utara	133 berkas	
	Latina	44 berkas	
4.	Data IMB yang diterbitkan	**581 Unit**	
	Kecamatan Payakumbuh Barat	255 unit	
	Kecamatan Payakumbuh Timur	160 unit	
	Kecamatan Payakumbuh Selatan	46 unit	
	Kecamatan Payakumbuh Utara	87 unit	
	Latina	33 unit	

Urusan pertanahan semenjak tahun 2017 menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh. Urusan pertanahan yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh pada tahun 2016 seperti pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pemanfaatan tanah pemko yang telah bersertifikat. Permasalahan konflik pertanahan pada tahun 2016 lebih jelasnya pada tabel 2.14 berikut;

Tabel 2. 14 Permasalahan Konflik Pertanahan Untuk Pengadaan Tanah Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Payakumbuh

TIPOLOGI KONFLIK	SEKTOR KONFLIK	LOKASI KONFLIK	LUAS	PIHAK YANG BERKONFLIK	UPAYA PENYELESAIAN DAN PELIBATANNYA	KETERANGAN
Pemanfaatan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Permasalahan Pemanfaatan tanah untuk lokasi pembangunan jalan menuju TPA Regional Kota Payakumbuh	Kel. Padang Karambia Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh	P: 292 m L: 3m Luas Tanah 876 m2	KAN Limbukan Nagari Limbukan Kec. Payakumbuh Selatan Burhanas Dt. Noru Anso Nan Mangiang	Ganti rugi tanah jalan ke TPA Regional telah dititipkan ke pengadilan oleh Dinas Putarkim, akan tetapi pihak 2 mengajukan tuntutan perdata ke pihak 3 di peradilan atas tanah yang akan dibebaskan. Pihak 2 dan 3 telah melakukan proses peradilan yang dimenangkan oleh pihak ke 3, dengan keputusan MA No. 2067 K/Pdt/2014 pada perkara antara pihak 2 dan 3. Akan tetapi proses eksekusi tanah oleh pihak 3 belum dilakukan, sehingga mengakibatkan maka akan difasilitasi oleh pemko agar pihak 3 mengajukan permohonan eksekusi terhadap hasil keputusan MA tersebut. Pada tanggal 21 November 2017 telah dilakukan proses pembahasan dengan tim fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan dan mengundang pihak yang berkonflik (pihak 1), dan hasil yang diperoleh bahwa pihak 1 yang telah menerima ganti rugi pelebaran jalan ke TPA Regional tidak mennngakui adanya keberadaan tanah pihak 2 dan siap menempuh jalur peradilan.	Masalah tanah sampai saat ini masih berlanjut antara pihak 1 dan 2.

Sumber: Tim Fasilitasi Konflik Pertanahan, 2017

Tabel 2. 15 Permasalahan Konflik Pertanahan Untuk Pemanfaatan Tanah Permko yang telah bersertifikat

TIPOLOGI MASALAH	SEKTOR MASALAH	PEMANFAATAN TANAH (CTH KANTOR LURAH, JALAN DSB)	LOKASI (KEL DAN KEC)	LUAS (M2)	CARA PEROLEHAN (GANTI WAJAR/HIBAH/DSB) DAN TAHUN PEROLEHAN	KENDALA DALAM PEMANFAATAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	PIHAK YANG TERLIBAT	UPAYA PENYELESAIAN DAN PELIBATANNYA
Pemanfaatan tanah untuk tanah yang telah bersertifkat dan/atau telah dibebaskan/dihibahkan	Pemanfaatan tanah untuk lokasi Kantor Bappeda	Kantor Bappeda dan Rumah Dinas Walikota Payakumbuh	Kel. Tiakar Kec. Payakumbuh Timur	9.260	Pembelian	Pada saat akan melakukan pengembalian batas dan pemecahan sertifikat tanah tahun 2014, ada penolakan dari sepadan an. AFRIDA dikarenakan secara fisik terdapat perbedaan batas tanah dengan yang ada di dalam sertifikat. Batas tanah yang didalam SHP Pemko berada di luar pagar tembok yang telah dibangun oleh Pemko.	Afrida (sepadan) Pemko Payakumbuh	Telah dilakukan pembahasan dalam rapat koordinasi pertanahan dengan BPN pada tanggal 30 Mei 2017, saran dari BPN untuk tidak meneruskan proses pemecahan sertifikat tanah tersebut.

Sumber: Pendataan Konflik Pertanahan, 2017

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pencapaian kinerja bidang pekerjaan umum dan perumahan sampai dengan tahun 2016 dari indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 terlihat pada Tabel 2.16 berikut:

Tabel 2. 16 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2017

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN						REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dokumen RTRW yang dikaji dan dievaluasi	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	2	-	-	-	100	200
2	Jumlah dokumen RDTR, PZ, RTBL/RTRK yang disusun, dikaji dan dievaluasi	2	6	6	6	6	6	2	6	6	6	6	100	100	100	100	100
3	Jumlah peta analog yang ter up-date	-	-	30	30	30	30	-	-	30	30	30	-	-	100	100	100
4	jumlah peta digital yang ter up-date	-	-	30	30	30	30	-	-	30	30	30	-	-	100	100	100
5	Jumlah penerbitan KRK/AP	600	600	600	610	578	445	583	553	571	662	586	97.17	92.17	95.17	108.52	101.38
6	Jumlah rekomendasi IMB yang diberikan	720	720	540	675	625	600	660	580	371	474	590	91.67	80.56	68.70	70.22	94.40
7	Jumlah sanksi yang diterbitkan	5	5	5	5	6	1	5	5	5	5	6	100	100	100	100	100
8	Jumlah pengawasan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan	113	325	333	440	290	290	113	325	333	440	290	100	100	100	100	100
9	Jumlah pengawasan bangunan sesuai dengan IMB	-	405	417	500	600	300	-	405	417	673	702	-	100	100	134.60	117
10	Jumlah dokumen rencana teknis yang dilegalisasi	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Persentase bangunan yang teratur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Panjang saluran sungai yang dinormalisasi	-	487	550	600	650	700	-	714	1,051	1,934	2,305	-	146.61	191.09	322.33	354.62
13	Panjang saluran sungai yang dipelihara	-	1,550	5,000	5,000	5,000	5,000	-	1,533	23,282.76	22,234.74	20,075.18	-	98.90	465.66	444.69	401.50
14	Jumlah komunitas peduli sungai yang terbentuk	-	-	-	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Panjang saluran irigasi yang ditingkatkan /rehabilitasi	-	7,342	7,400	7,500	7,600	7,800	-	8,092	7,444.1	11,275.7	12,667.76	-	110.22	100.60	150.34	166.68

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN						REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
16	jumlah irigasi yang dipelihara	-	20	20	20	20	20	-	34	26	24	44	-	170	130	120	220
17	Jumlah P3A/GP3A yang dibina (kelompok)	-	20	20	20	20	20	-		72	72	72	-	0	360	360	360
18	Jumlah prasarana air baku untuk irigasi	-	1	1	2	2	2	-	2	2	1	1	-	200	200	50	50
19	Persentase pelayanan air minum perpipaan	94	94.5	98.6	98.7	98.8	98.9	94.1	94.7	94.9	95.1	95.25	100.11	100.21	96.25	96.35	96.41
20	debit air minum yang tersedia (m3)	-	-	-	-	-	288	288	288	288	288	288	-	-	-	-	-
21	Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang memenuhi kualifikasi	-	-	-	110	55	70	-	-	-	114	47	-	-	-	103.64	85.45
22	Panjang jalan baru yang dibangun (m)	-	-	-	2,699	2,426.80	1.200	-	-	-	2,699	2,426.80	-	-	-	100	100
23	Jumlah jembatan baru yang dibangun	-	-	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	100	100	100
24	Panjang jalan yang ditingkatkan (m)	-	-	18,295	18,898	17,444	6,681	-	-	18,444	21,139.7	17971.9	-	-	100.81	111.86	103.03
25	Panjang Jalan yang dipelihara (m)	2,446	2,490	-	9,618	10,842	6,159	2,446	-	-	9,618	10,842	100	-	-	100	100
26	Jumlah Penerangan Jalan Umum yang terpasang (unit)	84	200	142	250	30	115	-	-	-	1,054	118	-	-	-	421.60	393.33
27	Jumlah Penerangan Jalan Umum yang dipelihara (unit)	250	302	153	334	1,000	1,013	-	-	-	964	868	-	-	-	288.62	86.80
28	Persentase jalan yang memiliki drainase	27.6	27.68	54.13	58.95	60.25	62.5	50.13	51.49	54.74	57.16	61.3	181.63	186.02	101.13	96.96	101.74
29	Panjang drainase yang dipelihara (m)	3,500	34,562	26,033	16,784	14,740	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Panjang trotoar yang dibangun (m)	-	-	1,685	1,525	-	550	-	-	1,685	1,569	-	-	-	100	102.89	-
31	Jumlah alat berat yang tersedia (unit)	14	14	14	14	16	16	14	14	14	14	16	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN						REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
32	Jumlah alat ukur laboratorium yang tersedia (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2. 17 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2017

URAIAN		ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN(RP JT)	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	ANGGARAN	REALISASI
A	**NON URUSAN**																	
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**																	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2,4	2,4	2,64	2,904	3,194	2,4	2,4	3,375	2,172	6,28	100	100	128	75	197	10,98	11,61
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	65,4	79,8	87,78	96,56	106,22	84,31	131,98	107,89	2,602.3	2,634.8	1 29	165	123	2,695	2,481	350,78	3,45
3	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	-	-	-	-	14,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14,4
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	17,5	17,5	19,25	21,18	23,30	17,500	17,500	20,533	28,698	25,356	100	100	107	136	109	80,084	89,31
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	152,34	152,34	167,57	184,33	202,76	52,33	169,58	219,65	237,65	237,65	100	111	131	129	117	697,097	826,73
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2,73	2,73	2,99	3,63	3,99	2,723	2,723	2,762	28,474	27,25	100	100	92	787	684	12,857	42,131
7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	7,549	5,549	-	-	-	-	-	0	8,658
8	Penyediaan alat tulis kantor	27,59	27,93	30,72	33,79	36,73	27,58	42,23	35,79	33,52	23,51	100	151	117	99	64	127,35	143,82
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	38,97	39,59	43,55	51,83	57,1	8,97	39,59	63,60	36,20	26,20	100	100	146	70	46	185,33	183,60
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/	15,35	13,35	14,68	16,15	22,47	15,341	13,341	13,341	8,191	8,191	100	100	91	51	36	63,99	51,86

URAIAN		ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN(RP JT)	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	ANGGARAN	REALISASI
	penerangan bangunan kantor																	
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	120,41	143,44	157,79	173,57	190,92	130,71	155,26	117,49	56,80	46,80	109	108	74	33	25	633,37	469,61
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9,9	13,92	15,31	13,18	14,50	11,61	13,91	16,87	13,97	13,97						0	59,16
13	Penyediaan makanan dan minuman	50,04	50,04	55,04	60,54	73,28	25,62	50,03	46,21	48,66	48,66	51	100	84	80	66	230,29	180,25
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	279,88	328,90	361,80	398	437,80	403,98	415,7	546,57	473,88	473,88	144	126	151	119	108	1.456,14	1.934,8
15	Penyediaan tenaga adm dan teknik perkantoran	327,94	638,23	702,05	436,48	480,13	327,94	630,02	789,37	94,60	94,60	100	99	112	22	20	2,200,7	1.860,84
16	Penyediaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	115	115						0	138
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**																	
1	Pembangunan Gedung Kantor	4.632,2	9.806,4	2.802	3.082,2	6.780,8	4.668,15	2.321,98	9,870,01	2.763,95	1.272,44	101	24	352	90	19	21.678,96	19.878,58
2	Pengadaan Mebeleur	-	-	110	120	130	-	-	-	17,04	-	-	-	-	-	-	256	17,040
3	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	75	7,5	75	-	192,05	-	-	-	-	-	-	-	-	97,5	192,05
4	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	37,6	433,80	45,49	50	55	-	506,99	76,79	8	10		117	169	16	18	577,89	593,78
5	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	277,97	367,38	336,33	369,70	406,67	352,63	373,64	254,22	321,26	321,26	127	102	76	87	79	1.432,71	1.365,99
6	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	11,60	11,60	15,00	18,00	21,250	11,6	11,60	7,88	-	8	100	100	53	-	38	60,45	32,68
7	Pemeliharaan rutin/ berkala Mebeleur	-	-	3	3	3	-	-	3,050	5,45	4			102	182	133	6,6	9,3
8	Perencanaan Pengadaan Tanah	-	105,62	-	-	-	-	-	55,71	-	-	-	-	-	-	-	105,622	55,71

URAIAN		ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN(RP JT)	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	ANGGARAN	REALISASI
9	Persiapan Pengadaan Tanah	-	81,10	-	-	-	-	-	40,8	-	-	-	-	-	-	-	81,11	40,80
10	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	-	3.788,2	-	-	-	-	-	1.511,94	-	-	-	-	-	-	-	3.788,2	1.511,94
11	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	-	25	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	25	12
III	**Program Peningkatan disiplin Aparatur**																	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	40,1	50,2	55,21	53,4	58,74	41,45	50,3	45,56	62,55	62,55	103	100	83	117	106	210,64	212,37
IV	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur**																	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	120	130	150	-	-	19,47	85,27	-			16	66	-	280	104,74
B	**URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM**																	
V	**Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**																	
1	Perencanaan pembangunan jalan	-	-	300	350	400	-	-	145,3	-	150						730	175,3
2	Pembangunan Jalan	600,41	1.718,59	6.250	1.401,3	1.500	600,41	1.895	3.340,78	4.082,56	19.757,9	100	110	53	291	1,317	10.270,304	13.870,334,
3	Perencanaan pembangunan jembatan	-	-	150	165	181,5	-	-	127,41	115	115			85	70	63	351,3	265,41
4	Pembangunan Jembatan	2.372,36	1.701,33	10.800	1.500	1.000	2.005,62	1.697,49	512,083	4.525,34	14.500	85	100	5	302	1.450	16.573	11.640,53
5	Perencanaan Pengadaan Tanah	286,77	168,85	500	500	300	218,35	18,71	27,99	29,75	29,75	76	11	6	6	10	1.515,62	300,74
6	Persiapan Pengadaan Tanah	6,734,43	175,82	4.324	4.829	5.637,5	159,21	161,36	287,04	110,25	110,25	2	92	7	2	2	17.190,74	739,91
7	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	6.734,43	256,19	4.324	4.829	5.637,5	7.734,43	10.103,5	3.794,49	3.679,02	3.879,01	115	3,944	88	76	69	17.271,12	26.087,24
8	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	250	30	250	250	250	190	30	92	25	25	76	100	37	10	10	830	342
9	Perencanaan Pengadaan Tanah Pinggir Batang Agam	-	-	-	-	-	-	-	74,6	-	-						0	74,6

URAIAN		ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN(RP JT)	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	ANGGARAN	REALISASI
10	Persiapan Pengadaan Tanah Pinggir Batang Agam	-	-	-	-	-	-	-	112,99	-	-						0	112,99
11	Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pinggir Batang Agam	-	-	-	-	-	-	-	2.063,61	-	-						0	2,063,61
12	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Pinggir Batang Agam	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-						0	40
VI	**Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong**																	
1	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	378,41	210	231	254,1	279,51	378,41	191,6	188,03	31	62	100	91	81	12	22	1.129,41	801,44
2	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2.796,03	5.267,86	4.958,1	5.453,92	5.999,31	3.802,46	5.717,81	4.206,80	9.009,60	7.478,60	136	109	85	165	125	19.675,76	24.232,38
3	Persiapan Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	25,53	27	-	-	-						0	52,53
4	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	74,47	73	-	-	-						0	147,47
VII	**Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**																	
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	3.496,55	809,70	6.500	7.150	7.865	3.732,50	1.027,20	19.149,52	20.185,99	26.000	107	127	295	282	331	19.529,24	49.295,20
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	302,47	137,57	250	300	350	302,47	207,57	132,57	678,86	1.000	100	151	53	226	286	1.060,04	1.521,46
3	Peningkatan Jalan	6.668,22	7.972,93	8.770,23	2.500	2.000	7.957,94	25.858,86	33.733,75	24.957,65	18.810,1	119	324	385	998	941	26.311,38	96.270,23
4	Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum	825,58	574,50	631,95	695,15	764,66	1.020,58	574,50	3.025,14	1.037,58	1.050	124	100	479	149	137	2.880,11	5.867,82
VIII	**Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong**																	
1	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	-	-	-	-	-	-	-	682,69	1.677,11	682,69						0	2.496,34
IX	**Program Inspeksi Jalan dan Jembatan**																	
1	Inspeksi Kondisi Jalan	-	-	-	-	-	-	334,52	426,35	-	-						0	760,86
X	**Program Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan**																	

URAIAN		ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN(RP JT)	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	ANGGARAN	REALISASI
1	Penyusunan sisten informasi data base jalan dan jembatan	-	-	150	-	-	-	-	-	150	150						150	180
XI	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**																	
1	Pengadaan Alat-alat Berat	-	1.218,62	1.000	-	1.500	-	900,22	-	947,10							2.518,62	**1.847,32**
2	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat	-	-	-	-	-	-	-	35	222,24	219,33						0	**301,11**
XII	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya**																	
1	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	-	-	138	160	185	-	-	163,48	233,50	110			118	146	59	335	418,97
2	Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai	480,81	463,28	450	400	300	450,17	534,55	368,79	241,7	160	94	115	82	60	53	1.854,09	1.627,21
3	Pembangunan Pintu Air	-	-	280	300	350	-	-	-	158,5	158,5	-	-	-	53	45	650	190,2
4	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	1.359,60	2,422,1	1.451	1.669	1.919	1.222,73	2.129,43	2.424,23	3.638,64	3.695,38	90	88	167	218	193	7.285,39	10.154,11
5	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	6.238,91	3.937,19	4.330,91	4.764	5.240,4	6.348,65	6.392,03	9.643,59	13.838,69	13.891,2	102	162	223	290	265	20.319,1	39.001,13
6	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	-	150,10	165,11	181,62	199,78	-	150,10	119,82	119,82	120		100	73	66	60	536,77	413,73
7	Rehabilitasi/pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	233,67	451,83	497,01	546,71	601,39	233,67	756,96	765,84	699,81	703,97	100	168	154	128	117	1.849,49	2.597,06
8	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah dibangun	549,40	649,88	714,87	786,36	864,99	692,445	645,88	605,48	1.090,92	1.180	126	99	85	139	136	2.873,49	3.270,72
9	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Petani Pemakai Air	68,41	110,38	121,41	133,56	146,91	68,41	110,38	37,45	118	120	100	100	31	88	82	463,12	358,22

URAIAN		ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN(RP JT)	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	ANGGARAN	REALISASI
10	Perencanaan Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	18,30	19,73	20,10						0	42,05
11	Persiapan Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	63,01	70,62	70,70						0	147,76
12	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	500	750	750						0	1.400
13	Penyerahan Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	15.000	45,000	45,000						0	69
XIII	**Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya**						272,09	1.094,94	3.308,91	9.844,34	9.844,34							
1	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	282,21	500	560	580	600	272,09	879,25	390,84	47,36	150	96	176	70	8	25	2.042,21	1.619,53
2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya	-	-	86	95	105	-	-	55,71	58,12	51			65	61	49	202	124,02
3	Perencanaan Pengadaan Tanah	-	-	105,63	-	-	-	115,63	18,33	-	-						105,63	133,95
4	Persiapan Pengadaan Tanah	-	-	81,11	-	-	-	75,07	19,05	-	-						81,11	94,12
5	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	-	-	3.788,20	-	-	-	-	2.800,	-	-						3.788,20	2.800
6	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	-	-	25	-	-	-	25	25	20	-						25	70
7	Perencanaan Pengadaan Tanah Sungai Batang Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	22,75	38						0	30
8	Persiapan Pengadaan Tanah Sungai Batang Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	166,12	166,12						0	199,35

URAIAN		ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN(RP JT)	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	ANGGARAN	REALISASI
9	Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sungai Batang Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	9.450	9.329,22						0	11.315,85
10	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Sungai Batang Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	80	110						0	102
XIV	**Program Pengendalian Banjir**																	
1	Rehabilitasi/ pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	-	-	175	186	192	-	-	119,03	136,63	136,63			68	73	71	399,40	282,98
XV	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**																	
1	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	172,82	595,58	685	706,26	200	172,82	2.269,58	2.570,19	3.140,65	3.140,65	100	381	375	445	1.570	2.199,64	8.781,35
2	Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah (OP Drainase)	328,77	630,26	693,28	762,61	838,87	531,10	880,60	740,22	550	550	162	140	107	72	66	2,582,67	2.811,91
XVI	**Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**						280,92	235,91	167,79	1.870,15	1.870,15							
1	Perencanaan pengembangan infrastruktur	225,93	187,69	206,45	227,10	249,81	219,48	173,84	122,40	162,16	162,16	97	93	59	71	65	897,11	710,29
2	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur						-	-	-	1.643,39	1.643,39						0	1.972,07
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	61,45	62,08	68,28	75,11	82,62	61,45	62,08	45,40	64,61	64,61	100	100	66	86	78	283,43	246,44
XVII	**Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan**																	
1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan (PNPM)	70,34	70,34	70,34	-	-	121,31	158,95	70,17	-	-	172	226	100			211,01	350,42

URAIAN		ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN(RP JT)	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	ANGGARAN	REALISASI
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	1.144,66	-	-	-	-	1.144,66	-	-	-	-	100					1.144,66	1.144,66
3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	-	-	-	-	-	-	131,58	-	-	-						0	131,58
4	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan	1.195,22	2.123,99	2.336,38	2.570,02	2.827,02	2.652,16	-	1.306,03	3.279,56	3.279,56	222	-	56	128	116	8.790,99	7.893,65
XVIII	**Program Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum**																	
1	Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.935,27						0	587,06
2	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK)	-	-	-	-	-	-	-	1.613,62	2.935,27	-						0	4.548,89
C	**URUSAN PERUMAHAN**																0	0
XIX	**Program Pengembangan Perumahan**						12,73	12,73	82,11	115	115							
1	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu	12,73	12,73	15	15	1,5	12,73	12,73	82,11	15	15	100	100	547	100	100	55,45	125,546,920
2	Penyusunan Sistem Informasi / data Base Perumahan Permukiman	-	-	300	-	-	-	-	-	100	100						300	120
D	**URUSAN OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN**																	

URAIAN		ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN(RP JT)	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	ANGGARAN	REALISASI
XX	**Program Optimalisasi Pelayanan Publik**						-	-	24,05	38,70	38,70							
1	Analisa/Pengkajian Kelayakan Perizinan	-	-	-	-	-	-	-	12,77	38,70	38,70						0	59,21
2	Penyusunan Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-	-	-	-	11,29	-	-						0	11,29
E	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**																	
XXI	**Program Pengembangan Data/ Informasi**																	
1	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	70,39	70,39						0	84,48
2	Penyusunan profile Dinas Pekerjaan Umum						-	-		30,94	30,94						0	37,13
XXII	**Program Perencanaan PengembanganWilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**																	
1	Penyusunan profile Dinas Pekerjaan Umum	-	-	-	-	-	-	-	26,505								0	26,505
XXIII	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**																	
1	Penyusunan Renstra SKPD	24,778	-	-	-	40	24,778,	-									24,786	24,778
F	**URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																	

URAIAN		ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (RP JT)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN(RP JT)	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	ANGGARAN	REALISASI
XXIV	**Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa**																	
1	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahaan daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10						0	12

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tantangan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang ke depan erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tantangan pembangunan berkelanjutan di Kota Payakumbuh adalah bagaimana pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan).Mencermati kondisi sumber daya dan tingkat kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh sebagaimana diuraikan diatas dan dengan memperhatikan potensi dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun kedepan dapat digambarkan seperti di bawah ini:

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2022, diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi di bidang teknik. Kualitas tersebut ditandai dengan meningkatnya kompetensi aparat teknik secara memadai di berbagai bidang dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Komptensi yang dimaksud mencakup kemampuan intelektual, keterampilan dan sikap yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang teknik dan prasarana pembangunan fisik. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dicapai terutama melalui berbagai diklat keterampilan teknis. Selain itu juga ditunjang oleh Pendidikan Formal dan diklat struktural yang diikuti oleh aparat di bidang teknik. Karena aparat di bidang teknik bukan hanya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka berbagai diklat juga ditujukan pada aparat yang berada di SOPD lain termasuk Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, bahkan sampai kepada kelembagaan masyarakat. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksana pembangunan fisik dan prasarana di daerah.

b. Kualitas Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah

Dari sisi kualitas Sarana dan Prasarana pembangunan daerah pada tahun 2017 diharapkan semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan tersedianya fasilitas di bidang sarana dan prasarana pembangunan yang berkualitas, terpadu, terkoordinasi, dan partisipatif. Sarana dan Prasarana tersebut mencakup pembangunan fisik yang berjangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, baik berupa Jalan, Jembatan, Irigasi maupun Perumahan dan Permukiman serta pembangunan fisik lainnya. Disamping itu diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh juga telah memiliki database dan masterplan pekerjaan fisik diberbagai sektor/bidang pembangunan. Dengan adanya database dan masterplan tersebut maka hasil pembangunan fisik dapat diidentifikasi sejauh mana pekerjaan fisik tersebut dilaksanakan, umur dari pekerjaan fisik, besar biaya yang dianggarkan serta seberapa besar manfaat pembangunan fisik tersebut bagi masyarakat. Pada tahun 2022 tersebut, juga diharapkan telah tersedia sarana dan alat penunjang setiap pekerjaan teknis yang layak dan modern.

c. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur kota, diharapkan pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dapat menjadi lembaga yang lebih transpran dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembangunan infrastruktur kota. Hal ini ditandai dengan tersedianya sarana, prasarana dan utilitas yang dibutuhkan masyarakat dan stekeholder secara merata sesuai dengan amanat PP No 65 Tahun 2005 dan Permen PU No 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal. Selain itu, diharapkan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur telah berjalan efektif. Dengan demikian hasil monitoring dan evaluasi tersebut selain menjadi bahan untuk perencanaan fisik berikutnya juga menjadi bahan pengendalian pembangunan fisik agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

BAB 3
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Uraian permasalahan pembangunan yang mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kurun waktu Tahun 2017-2022.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh menghadapi beberapa permasalahan dan kendala dalam mengimplementasikan serta melaksanakan program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh sebagai berikut:

1. Kualitas, kuantitas dan komitmen sumber daya aparatur masih belumoptimal dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan teknis maupun penguasaan informasi teknologi serta kesadaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Jumlah sarana prasarana penunjang kerja belum mencukupi dan ketersediaan data teknis untuk kebutuhan perencanaan yang belum memadai seperti;
   a. kendaraan operasional lapangan yang masih kurang memadai,
   b. peralatan kerja seperti Peta Blad Digital yang belum ada,
   c. sistem data base penataan ruang, pertanahan dan infrastrukturyang belumlengkap,
3. Standar Operating Prosedur (SOP) yang belum lengkap sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas serta ketersediaan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang masih kurang dalam pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat ;
4. Rendahnya kemampuan fiskal Daerah dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembiayaan pembangunan bidangPekerjaanUmumdanPenataanRuang;
5. Tenaga Pengawas yang berkualifikasi dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan di lapangan belum memadai baik dari kuantitas maupun kualitas ;
6. Masih rendahnya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil pembangunan.
7. Belum lengkapnya ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Masih banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
9. Masih rendahnya pelaksanaan sosialisasi di bidang penataan ruang kepada stakeholder dan pemangku kepentingan pembangunan.
10. Belum tersedianya sistem informasi penataan ruang yang dapat diakses publik.
11. Belum terpenuhinya debit air untuk kebutuhan irigasi.
12. Berkurangnya kualitas, debit andalan dan terjadinya degradasi/agradasi sungai
13. Belum terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air untuk mendukung keberlanjutan penyediaan air, kedaulatan pangan dan pengendalian daya rusak air.
14. Belum terpenuhinya pelayanan infrastruktur dasar public berupa ketersediaan sarana dan prasarana (kualitas, kuantittas dan kondisional)
15. Masih kurangnya kualitas dan kapasitas jalan.
16. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang jalan.

17. Belum terpenuhinya target pelayanan air minum untuk seluruh masyarakat.
18. Belum optimalnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur kota.
19. Rendahnya legalisasi terhadap kepemilikan aset tanah Pemerintah Kota.
20. Belum terintegrasinya penataan ruang dan pertanahan dalam proses penyusunan dokumen rencana tata ruang.

Dari beberapa permasalaha diatas, maka yang menjadi permasalahan utama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya ketersediaan dokumen perencanaan penataan ruang dan belum tersedianya Peta Blad Digital.
2. Belum optimalnya Pengendalian Tata Ruang disebabkan oleh masih rendahnya ketaatan masyarakat dan lemahnya penegakan hukum.
3. Belum terpenuhinya ketersediaan sarana prasarana sumber daya air untuk mendukung keberlanjutan penyediaan air, kedaulatan pangan, dan pengendalian daya rusak sungai.
4. Belum terpenuhinya pelayanan infrastruktur dasar berupa kondisi ketersediaan sarana dan prasarana (kuantitas, kualitas, fungsional) mengacu pada Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang SPM ke-PU-an.
5. Belum terpenuhinya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan infrastruktur dasar.
6. Masih rendahnya kepastian hukum asset tanah dari persentase luas lahan bersertifikat dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

3.2 TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dirumuskan sebagai berikut:**"Payakumbuh Maju, Sejahtera, dan Bermartabat dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang"**. Untuk mewujudkan visi tersebut disusunlah Misi yang kemudian dijadikan pedoman dalam penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Handal, SehatdanKompetitif.
2. Membangun Perekonomian yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama.
3. Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan.
4. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih
5. Mewujudkan masyarakat yang Berakhlak Muliadan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Program pembangunan prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan kepada masyarakat sebagai janji politik dalam Pemilukada yang lalu antara lain:

1. Mewujudkan penataan kota dan pemukiman yang aman, nyaman dan berkelanjutan;
2. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan kelancaran konektivitas dalam dan antar daerah
4. Menjaga kualitas lingkungan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh sebagai dinas teknis yang terkait dengan perwujudan visi, misi dan program pembangunan prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab (bersama Perangkat Daerah terkait lainnya), untuk mewujudkan misi ke-3 yaitu "**Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur danfasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan**".

Bahwa misi Walikota terpilih untuk meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan, sejalan dengan misi Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upayayang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visiserta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yangdiemban oleh Kementerian PekerjaanUmumdan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalamPeraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja,amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalahsebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua';
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI.

Faktor utama yang dapat menjadi penghambat di dalam pencapaian visi, misi dan program pembangunan prioritas adalah faktor rendahnya kemampuan fiskal daerah dan minimnya anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, namun demikian dengan strategi pelibatan seluruh stake holder pembangunan yaitu pemerintah (Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota), pihak swasta dan masyarakat, faktor penghambat tersebut diharapkan dapat diselesaikan.

3.3 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi. misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2010-2014, potensi dan permasalahan, tantanganutama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakanpembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015 - 2019.

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah:**"Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".** Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang **handal** diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar,serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upayayang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dankawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia,pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis yang termuat dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Muatan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yangterpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal,kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan	1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan; 2. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemprograman dan penganggaran; 3. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
2.	Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangkakemandirian ekonomi	1. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; 2. Meningkatnya ketahanan air
3.	Menyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim	1. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; 2. Meningkatnya kemantapan jalan nasional; 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas; 4. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan.
4.	Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahanrakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkankualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua"	1. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan; 2. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.
5.	Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan	1. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas; 2. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum danperumahan rakyat; 3. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasipublik, serta sarana dan prasarana

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
	umum danperumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel.	

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Struktur Ruang

Agar pengembangan pemanfaatan ruang kota sesuai dengan arah pengembangan kota yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah, maka di setiap pusat kegiatan baik pusat utama maupun subpusat perlu dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mewujudkan terciptanya keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antarwilayah pengembangan kota. Pengembangan pemanfaatan ruang kota (pusat atau sub-pusat) dilaksanakan dengan mengacu pada 2 (dua) kriteria, yaitu:

1. Pusat kegiatan yang **dikembangkan atau didorong pertumbuhannya** dan
2. Pusat kegiatan yang **dikendalikan atau dibatasi pertumbuhannya**.

Pusat kegiatan yang dikembangkan adalah pusat baru di masing-masing subpusat pengembangan kota yang pengembangannya diprioritaskan dalam 5 (lima) tahun kedua RTRW (2016-2020), sedangkan pusat kegiatan yang dikendalikan adalah inti pusat kota. Pengembangan infrastruktur diarahkan pada pengembangan jaringan jalan, pengembangan fasilitas umum dan sosial, pengembangan sarana transportasi; pengembangan prasarana sumber daya air, irigasi dan drainase; pengembangan prasarana energi dan telekomunikasi serta pengembangan prasarana persampahan, limbah B3 dan pemadam kebakaran merupakan prioritas pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedua RTRW (2016-2020).

3.4.2 Pola Ruang

Arah Pengembangan pemanfaatan ruang kotayang tertuang dalam dokumen RTRW Kota Payakumbuh diklasifikasikan dalam 2 (dua) kategori yaitu: kawasan **lindung** dan pemanfaatan ruang untuk**kawasan budidaya**. Kawasan lindung merupakan kawasan yang didalamnya tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali pembangunan prasarana vital dengan luas areal maksimum 2% dari luas kawasan lindung. Di dalam kawasan non hutan yang berfungsi lindung diperbolehkan kegiatan budidaya secara terbatas dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan serta wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Kegiatan budidaya yang sudah ada di Kawasan Lindung dan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, serta dapat mengganggu fungsi lindung, maka fungsi sebagai Kawasan Lindung dikembalikan secara bertahap disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan fungsi lindung, kawasan yang bersangkutan, dapat dilakukan eksplorasi mineral dan air tanah serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam. Untuk kawasan budidaya, peruntukan pemanfaatan ruangnya meliputi : (a) pengembangan kawasan perumahan, (b) kawasan perdagangan dan jasa, (c) kawasan pemerintahan dan bangunan umum, (d) kawasan perindustrian dan pergudangan, (e) kawasan pariwisata, kawasan pertanian dan (f) peternakan, kawasan pendidikan.

3.4.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Pengelolaan Lahan Perkotaan

Status kepemilikan lahan di Kota Payakumbuh secara umum berupa Tanah Ulayat, yang sangat sensitif terhadap pembebasan lahan, dimana memerlukan prosedural panjang dan waktu yang lama untuk kebutuhan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan.

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembangunan sarana prasarana perkotaan harus memperhatikan pengelolan lingkungan hidup, dalam arti kata harus memperhatikan 2 (dua) hal yakni : (1) Keseimbangan lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan lahan dan (2) Kelestarian lingkungan, berkaitan dengan budidaya peternakan ayam ras yang berada pada pusat-pusat permukiman penduduk.

3. **Pembangunan Prasarana Sarana Perkotaan.**

   Agar pembangunan sarana prasaran pendukung kegiatan perkotaan dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, maka dalam pembangunan sarana prasarana yang dimaksud meski memperhatikan beberapa hal yakni: (1) Kondisi ketersediaan prasarana dan sarana baik secara kuantitas, kualitas dan fungsionalnya, (2) Gap (ketimpangan/ kesenjangan) antara kebutuhan dan ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan, sehingga dibutuhkan upaya optimasi dalam pembangunan prasarana dan sarana perkotaan, yang menimbulkan ketimpangan pembangunan antar kawasan dan (3) Agar Pembangunan jalan lingkar utara yang diperuntukan sebagai sentra pertumbuhan perdagangan dan industri Kota Payakumbuh dan peningkatan fungsi jalan lingkar selatan.

4. **Pembangunan sektor dan kawasan strategis.**

   Pelaksanaan pembangunan untuk berbagai sektor yang direncanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan prioritas dan ketersediaan anggaran. Penetapan urutan prioritas pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui proses pengenalan potensi dan persoalan-persoalan strategis, sektor-sektor strategis dan kawasan-kawasan strategis.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menghambat dan mendorong pelayanan Dinas Pekerjaan UmumdanPenataanRuang Kota Payakumbuh yang ditinjau atas implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Payakumbuh. Adapun faktor penghambat maupun faktor pendorong pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

1. **Faktor Penghambat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain:**
   a. Pertumbuhan kawasan budi daya yang cepat terutama untuk kawasan perumahan dan perkantoran menyebabkan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur meningkat. Pertumbuhan kawasan budi daya tersebut sering tidak didukung ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang layak dan memadai.
   b. Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana infrastruktur sering terkendala keterbatasan lahan yang ada, dan waktu yang lama untuk proses pengadaan lahan yang terhambat oleh status kepemilikan tanah oleh ulayat dan harga ganti rugi lahan yang tinggi.

2. **Faktor Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain:**
   a. Pembagian wilayah berdasarkan atas struktur ruang menjadi potensi besar dalam pengembangan wilayah Kota Payakumbuh menjadi lebih merata dan tidak terpusat pada satu wilayah tertentu saja;
   b. Kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana infrastruktur dilakukan dengan penetapan prioritas pembangunan melalui proses pengenalan persoalan-persoalan strategis, sektor-sektor strategis dan kawasan-kawasan strategis sesuai dengan tingkat urgensitas kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

3.5.1 Metode Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan-pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu-isu strategis menceminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan dalam organisasi, komunitas yang dilayani atau kegiatan-kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata pada organisasi dan/ atau komunitas yang dilayani" (Martinelli 1999).Secara singkat, isu strategis adalah persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan terhadap masalah di PekerjaanUmumdanPenataanRuang yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan. Situasi dan kondisi lingkungan eksternal dan internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menjadi isu kritis/ strategis. Perumusan isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh perlu memperhatikan beberapa hal antara lain adalah :

1. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur terkait pembangunan di semua sektor sebagaimana amanat RPJMN 2015-2019;
2. Pemenuhan kebutuhan pembangunan bidang air minum dan sanitasi harus mencapai akses 100-0-100 di Tahun 2019;
3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014;
4. Sustainable Development Goals (SDG's), khususnya tujuan dan target air bersih dan sanitasi;
5. Pelimpahan urusan pemerintah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi urusan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019;
7. RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
8. Pencapaian Kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum danPenataanRuang yang terdahulu.

Ketersediaan infrastrukturyang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya Tarik suatu kawasan/ wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing daerah, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, danefisiensiduniausaha.

3.5.2 Isu-isu Strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan hasil rumusan faktor-faktor yang mendukung (peluang dan potensi) maupun yang menghambat (kelemahan dan tantangan), maka dirumuskanlah isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

1. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima;
2. Pemenuhan ketersediaan sarana prasarana sumber daya air untuk mendukung keberlanjutan penyediaan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirianekonomi;
3. Pelayanan infrastruktur dasar berupa kondisi ketersediaan prasarana dan sarana (kuantitas, kualitas, fungsional) sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, baik sarana dan prasarana jalan, jembatan, irigasi, sungai, sanitasi, air bersih.
4. Rendahnya kualitas perencanaan penataan ruang dan penataan bangunan gedung yang disebabkan oleh masih rendahnya masyarakat yang mengurus Izin Mendirikan Bangunan, dan belum tersedianya Peta Blad Digital untuk penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan penataan ruang.
5. Pemanfaatan Tata Ruang yang belum optimal dilihat dari jumlah pengurusan izin pemanfaatan ruang yang di keluarkan.
6. Pengendalian Tata Ruang yang belum optimal yang disebabkan oleh masih rendahnya ketaatan terhadap RTRW dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran penataan ruang.
7. Sulitnya melakukan penyelesaian masalah pertanahan dilihat dari Persentase luas lahan bersertifikat dan Penyelesaian konflik tanah Negara.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis yang termuat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

Tujuan	**:**	**Terwujudnya Penataan Kota Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang, dan Pemenuhan Infrastruktur Yang Berkualitas**
Sasaran Strategis 1	:	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang
Sasaran Strategis 2	:	Meningkatnya infrastruktur dasar publik yang sesuai standar

Sasaran Strategis 3	:	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/ wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image kota, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing daerah.

BAB 4
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 VISI DAN MISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan, dan dengan mempertimbangkan misi ketiga dan keempat Pemerintah Kota Payakumbuh Periode 2017-2022; maka Visi dari, yaitu:

"TERWUJUDNYA KOTA PAYAKUMBUH YANG TERTATA DENGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN"

Dengan visi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertujuan untuk mewujudkan keberlanjutan dalam penataan kota yang didukung oleh infrastruktur perkotaan. Makna Penataan Kota dan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan dipahami dari kata –**Sustainability**- yang diintisarikan dari **Sustain**; Berlanjut dan **Ability**: Kemampuan. Pemahaman ini diartikan sebagai kemampuan untuk bertahan hingga waktu kedepannya. Daya tahan tersebut dimaknai secara dinamis baik dari proses penataan kota maupun dari sistem infrastruktur. Sehingga Sistem dan proses yang dibangun merupakan sistem robust, fleksibel, dan layak secara ekonomi, social dan teknis yang berdampak pada peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan atau menjaga lingkungan sekitarnya.

Bertolak dari komitmen visi tersebut maka jabaran misi didasarkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh merupakan bagian yang terintegrasi secara sistemik pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kota Payakumbuh. Maka dirancang misi sebagai upaya implementatif untuk mewujudkan visi, dimana mewujudkan keberlanjutan dari tertatanya Kota Payakumbuh dengan infrastrukturnya dimaknai melalui: **Mewujudkan Perencanaan, Pemanfaatan Dan Pengendalian Ruang Serta Infrastruktur Perkotaan Yang Handal**

Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dipahami sebagai upaya merencanakan, memanfaatkan dan mengendalikan keruangan Kota Payakumbuh melalui infrastruktur yang handal. Handal tidak hanya secara kualitas dapat diyakini, tetapi juga dengan kesesuaian terhadap aturan, pengguna dan kebutuhan.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penetapan tujuan dan sasaran strategis dinas didasarkan pada faktor kunci keberhasilan. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan kinerja keberhasilan dinas, sehingga dengan memperhatikan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pertanahan yang menjadi kewenangannya, maka tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh adalah **Terwujudnya Penataan Kota Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang, dan Pemenuhan Infrastruktur Yang Berkualitas**. Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan diformulasikan sebagai sasaran strategis dinas. Adapun sasaran strategis yang akan dituju yaitu;

1. Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang
2. Meningkatnya Infrastruktur Dasar publik yang sesuai standar
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran dan indicator penilaian ketercapaiannya digambarkan pada tabel 4.1

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA TAHUN 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
						2018	2019	2020	2021	2022
1	Terwujudnya Penataan Kota Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang, dan Pemenuhan Infrastruktur Yang Berkualitas	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimum Pekerjaan Umum	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Recana Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	78,60	78,90	79,20	79,50	79,80	80,10
			Meningkatnya Infrastruktur Dasar publik yang sesuai standar	Persentase pelayanan air minum	94,41	96,71	98,80	99,02	99,67	100,00
				Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik	73,43	76,34	79,10	81,72	84,21	86.58
				Persentase Panjang Jalan Status Kota dalam Kondisi mantap	66,56	69,31	72,06	74,81	77,56	80,31
				Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan	72,22	77,78	83,33	88,89	94,44	94,44
				Persentase sistem drainase skala kota	42,17	44,46	47,39	54,39	58,91	64,44
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Kota	BB	BB	A	A	A	AA

Sumber: RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022

BAB 5|

Strategi dan Kebijakan Dinas PUPR

BAB 5
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kota Payakumbuh merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2017-2022,Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengupayakan mendorong terwujudnya optimalisasi penataan ruang dan pembangunan sarana infrastruktur yang handal dengan melibatkan pemangku kepentingan secara menyeluruh dan berkesinam- bungan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2017-2022 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kota Payakumbuh. Dalam rangka optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) dengan hasil sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan**/** Strength (S)
   1. Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah
   2. Tingkat disiplin pegawai yang cukup tinggi
   3. Pengendalian Internal yang sistematis
   4. Konsep Perencanaan teknis yang baik

b. Kelemahan / Weakness (W)
   1. Masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
   2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang pekerjaan.
   3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana Sumber Daya Air.
   4. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasarpublik (Jalan, irigasi, Air Minum, Drainase) berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
   5. Masih rendahnya kepastian hukum aset tanah pemko.

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

a. Peluang/ Opportunities (O)
   1. Komitmen Pimpinan Daerah
   2. Komitmen DPRD Kota Payakumbuh
   3. Adanya penyedia jasa yang profesional dibidangnya.
   4. Dukungan dari Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Lembaga terkait lainnya

5. Kondisi Alam / Lingkungan yang mendukung

b. Ancaman/ Threats (T)

1. Tingginya laju pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi pemanfaatan ruang dan kebutuhan infrastruktur yang telah ada.
2. Masih kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam mentaati dokumen Rencana Tata Ruang.
3. Masih banyaknya kepemilikan tanah yang berstatus tanah ulayat/kaum.
4. Bencana Alam.

Berdasarkan analisa atau kajian terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) diatas maka dirumuskan strategi danarah keijakan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

MISI DAERAH 3: MENINGKATKAN PENATAAN KOTA, KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS UMUM YANG NYAMAN DAN BERKELANJUTAN			
Visi TERWUJUDNYA KOTA PAYAKUMBUH YANG TERTATA DENGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN			
Misi: Mewujudkan Perencanaan, Pemanfaatan Dan Pengendalian Ruang Serta Infrastruktur Perkotaan Yang Handal			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Penataan Kota Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang, dan Pemenuhan Infrastruktur Yang Berkualitas	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang	1. Melengkapi dokumen perencanaan tata ruang	1. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang
		2. Melakukan sosialisasi dokumen perencanaan ruang yang sudah ada	2. Pelaksanaan sosialisasi dokumen perencanaan tata ruang 3. Meningkatkan kepatuhan pembangunan sesuai dokumen tata ruang
		3. Menerbitkan Keterangan Rencana Kota sesuai dokumen perencanaan	4. Penerbitan Keterangan Rencana Kota sesuai dokumen perencanaan
		4. Menerbitkan rekomendasi izin pemanfaatan ruang	5. Penerbitan Rekomendasi IMB 6. Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang 7. Meningkatkan pembnagunan bangunan gedung sesuai dengan IMB
		5. Melakukan penataan bangunan dan lingkungan	8. Pembinaan tata bangunan dan lingkungan
		6. Melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	9. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang
		7. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan penataan ruang	10. Peningkatan kompetensi aparatur penyelenggara penataan ruang
		8. Menyediakan sistem informasi penataan ruang	11. Penyediaan sistem informasi penataan ruang berbasis Web-GIS
		9. Menyediakan data base aset tanah	12. Penyediaan data base tanah aset Pemko 13. Pendataan dan konsolidasi tanah eks KTP
		10. Melaksanakan sertifikasi tanah aset	14. Pelaksanaan sertifikasi tanah aset Pemko
	Meningkatnya infrastruktur dasar publik yang sesuai standar	1. Meningkatkan kinerja jaringan jalan jembatan	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan jembatan 2. Meningkatkan persentase panjang jalan dalam kondisi baik
		2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung	1. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 2. Mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus dan universal
		3. Melaksanakan updating kondisi jalan dan jembatan	3. Pelaksanaan survey kondisi dan pemutakhiran data jalan dan jembatan

MISI DAERAH 3: MENINGKATKAN PENATAAN KOTA, KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS UMUM YANG NYAMAN DAN BERKELANJUTAN			
Visi TERWUJUDNYA KOTA PAYAKUMBUH YANG TERTATA DENGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN			
Misi: Mewujudkan Perencanaan, Pemanfaatan Dan Pengendalian Ruang Serta Infrastruktur Perkotaan Yang Handal			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		4. Melaksanakan evaluasi daerah irigasi dengan kondisi baik	4. Meningkatkan persentase irigasi dalam kondisi baik 5. Pelaksanaan updating data daerah irigasi dengan kondisi baik
		5. Meningkatkan kinerja layanan irigasi	6. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi 7. Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan perairan lainnya
Terwujudnya Penataan Kota Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang, dan Pemenuhan Infrastruktur Yang Berkualitas	Meningkatnya infrastruktur dasar publik yang sesuai standar	6. Meningkatkan kapasitas pengelola SDA	8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA
		7. Optimalisasi panjang tebing sungai yang tertata	9. Meningkatkan penataan sungai 10. Peningkatan kualitas tebing sungai
		8. Meningkatkan cakupan layanan air minum aman dengan sistem perpipaan	11. Penambahan jaringan air minum 12. Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum
		9. Meningkatkan pelayanan jaringan drainase drainase kawasan perkotaan	13. Peningkatan penyediaan jaringan drainase kota 14. Meningkatkan persentase jalan kota yang memiliki drainase
		10. Meningkatkan kualitas bangunan gedung pemerintah	15. Penataan bangunan dan lingkungan 16. Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum perkotaan
		11. Meningkatkan ketersediaan informasi jasa konstruksi	17. Pengembangan sistem informasi jasa konstuksi
		12. Meningkatkan kualitas layanan perizinan jasa konstruksi	18. Tersedianya layanan IUJK yang sesuai dengan SOP
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan	1. Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan
		2. Meningkatkan keamanan, kenyamanan dan kelancaran kerja/ operasional aparatur	2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas
		3. Meningkatkan disiplin aparatur	3. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan disiplin aparatur

BAB 6 | Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan

BAB 6
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran atau tujuan. Program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang pada satu atau lebih unit kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program denganmengerahkan sumber daya (sumber daya manusia), peralatan, teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sedangkan indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secarakualitatifdan kuantitatif.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Payakumbuh yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dengan kegiatan :
   a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   b. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
   c. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
   d. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
   e. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
   f. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
   g. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   h. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   i. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   j. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   k. Kegiatan Penyediaan makan dan minum.
   l. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
   m. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
   b. Kegiatan Pengadaan mebeluer
   c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
   d. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
   e. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
   a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
   b. Kegiatan Penyusunan Profil SKPD
   c. Kegiatan Penyebarluasan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD
   d. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik
5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

a. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan
b. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan
c. Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah
d. Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah
e. Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah
f. Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

6. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
   a. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
   b. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
7. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
   a. Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
   a. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
   b. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
   c. Peningkatan Jembatan
   d. Kegiatan Jaringan listrik dan penerangan jalan umum
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
   a. Kegiatan Rehabilitasi alat – alat berat
10. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
    a. Kegiatan Perencanaan Pembangunan jaringan irigasi
    b. Kegiatan Perencanaan normalisasi saluran sungai
    c. Kegiatan Pembangunan pintu air
    d. Kegiatan Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
    e. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
    f. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air
    g. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan normalisasi saluran sungai
    h. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun
    i. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan petani pemakai air
    j. Kegiatan Perencanaan pengadaan tanah
    k. Kegiatan Persiapan pengadaan tanah
    l. Kegiatan Pelaksanaan pengadaan tanah
    m. Kegiatan Penyerahan hasil pengadaan tanah
11. Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
    a. Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
    b. Kegiatan Perencanaan pengadaan tanah
    c. Kegiatan Persiapan pengadaan tanah
    d. Kegiatan Pelaksanaan pengadaan tanah
    e. Kegiatan Penyerahan hasil pengadaan tanah
12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
    a. Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
    b. Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
    c. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah
13. Program Pengendalian Banjir
    a. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

14. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
    a. Kegiatan Perencanaan pengembangan infrastruktur
    b. Kegiatan Pembangunan / peningkatan infrastruktur
    c. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
15. Program Pembangunan Infastruktur Perdesaan
    a. Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
16. Program Perencanaan Tata Ruang
    a. Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang
    b. Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Perencanaan Tata Ruang
17. Program Pemanfaatan Ruang
    a. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Perizinan pemanfaatan ruang
    b. Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Pemanfaatan Ruang
18. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
    a. Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
    b. Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
19. Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
    a. Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
    b. Kegiatan Analisa/pengkajian kelayakan perizinan
20. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
    a. Kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Analisa/pengkajian kelayakan perizinan
21. Program Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan
    a. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017-2022 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 6.1 (terlampir).

Tabel 6. 1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017-2022

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA		RENCANA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
		OUTPUT	OUTCOME		2017		2018		2019		2020		2021		2022			
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
I	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Indeks**	**76,00**	**5.458.174.000**	**79,00**	**6.012.616.000**	**81,00**	**6.935.492.000**	**85,00**	**7.454.727.700**	**85,00**	**7.639.176.300**	**85,00**	**8.229.992.000**	**90,00**	**41.730.178.000**
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan		Rekening bulan	120	4.234.800.000	120	4.283.700.000	144	4.755.440.000	156	4.805.000.000	156	4.925.125.000	156	5.048.250.000	852	28.052.315.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pajak kendaraan dinas/ operasional yang dibayarkan		Unit	74	21.900.000	64	23.500.000	79	32.000.000	85	41.000.000	91	41.900.000	95	42.876.000	488	203.176.000
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkan		Orang bulan	299	267.326.000	492	380.500.000	982	684.714.000	1.020	719.962.000	1.020	737.960.000	1.020	756.410.000	4.833	3.546.872.000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan yang dibayarkan		Orang bulan	12	28.215.000	24	35.677.000	36	94.180.000	36	91.300.000	36	91.800.000	36	92.100.000	180	433.272.000
		Jumlah Bahan Kebersihan Kantor yang disediakan		Buah	192		256		429		553		553		581		2.564	
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		Unit	40	6.411.000	20	3.720.000	123	25.384.000	141	26.563.000	155	27.227.000	159	27.900.000	638	117.205.000
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan		Buah	1.875	23.547.000	2.450	30.283.000	3.231	58.673.000	2.246	59.743.700	2.246	61.237.300	3.350	62.768.000	15.398	296.252.000
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah fotocopy, cetak dan jilid dokumen dinas yang disediakan		Buah	200	26.195.000	300	24.416.000	500	41.021.000	500	42.504.000	500	43.566.000	500	446.558.000	2.500	624.260.000
				Kotak	2		2		2		10		10		10		36	
				Buku	217		310		550		330		338		346		2.091	
				Lembar	31.057		62.075		82.937		81.500		83.538		85.626		426.733	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		Unit	279	8.860.000	194	4.550.000	155	7.946.000	222	9.289.000	270	9.520.000	277	9.760.000	1.397	49.925.000
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		Unit	16	155.000.000	10	421.200.000	16	154.000.000	40	234.810.000	41	240.683.000	42	246.700.000	165	1.452.393.000
				Set	-		-		5		1		-		1		7	
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		Eksemplar	2.389	13.440.000	4.776	18.520.000	4.776	24.960.000	4.354	37.860.000	4.463	38.800.000	4.575	39.770.000	25.333	173.350.000
11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan		Porsi	1.751	47.970.000	1.250	39.610.000	1.300	38.070.000	1.500	43.890.000	1.538	44.988.000	1.545	46.110.000	7.399	260.638.000
				Bungkus	1.751		1.250		1.300		1.500		1.538		1.545		7.399	
				Galon	100		100		120		192		197		200		909	
				Kotak	-		-		70		40		41		41		192	

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA		RENCANA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
		OUTPUT	OUTCOME		2017		2018		2019		2020		2021		2022			
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, luar daerah, dan luar negeri yang dilakukan		perjalanan	36	476.950.000	80	523.000.000	152	735.074.000	172	1.048.206.000	82	1.074.400.000	84	1.101.280.000	606	4.958.910.000
13	Penyediaan tenaga administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah jasa tenaga administrasi dan tenaga teknis perkantoran yang dibayarkan		Orang bulan	72	147.560.000	84	223.940.000	108	284.030.000	120	294.600.000	120	301.970.000	120	309.510.000	624	1.561.610.000
																	-	
II	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		**Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam kondisi Baik**	**Persen**	**80,00**	**5.013.418.000**	**80,00**	**2.697.741.000**	**85**	**2.605.113.000**	**85,00**	**14.870.386.000**	**85,00**	**7.679.012.000**	**85,00**	**6.850.878.000**	**85,00**	**39.716.548.000**
			Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Representatif	**Persen**			**65,17**		**71,16**		**74,91**		**79,03**		**83,15**		**83,15**	
1	Pembangunan gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor skala kota yang dibangun		Unit Gedung Kantor	1	4.241.815.000	3	1.746.792.000	3	1.999.667.000	4	12.998.000.000	3	7.000.000.000	2	6.000.000.000	16	33.986.274.000
2	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yang Dilakukan		Unit	7	286.535.000	11	351.173.000		-	10	1.083.024.000	-	-	5	100.000.000	33	1.820.732.000
3	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan meubeleur yang dilakukan		Unit	50	56.700.000	88	102.435.000	-	-	110	159.496.000	45	49.500.000	46	78.065.000	294	446.196.000
4	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor skala kota yang dipelihara		Unit	1	206.798.000	2	222.629.000	1	158.100.000	1	122.441.000	1	125.502.000	2	178.640.000	8	1.014.110.000
5	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		Unit	58	217.570.000	61	246.470.000	83	418.846.000	74	455.960.000	80	467.360.000	80	479.043.000	436	2.285.249.000
6	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	Jumlah meubeleur yang dipelihara		Unit	14	4.000.000	15	1.800.000	14	3.500.000	40	5.500.000	46	5.750.000	40	5.550.000	169	26.100.000
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja yang dilakukan		Unit			10	26.442.000	10	25.000.000	20	45.965.000	13	30.900.000	3	9.580.000	56	137.887.000
III	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**		**Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap**	**Persen**	**100,00**	**52.880.000**	**100,00**	**52.232.000**	**100,00**	**60.970.000**	**100,00**	**61.200.000**	**100,00**	**62.730.000**	**100,00**	**64.298.000**	**100,00**	**354.310.000**

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA		RENCANA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
		OUTPUT	OUTCOME		2017		2018		2019		2020		2021		2022			
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
			Persentase ASN Berperilaku Disiplin	**Persen**	**-**		**-**		**90,00**		**92,00**		**95,00**		**100,00**		**100,00**	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dilakukan		Stel	139	52.880.000	144	52.232.000	151	60.970.000	152	61.200.000	156	62.730.000	156	64.298.000	898	354.310.000
IV	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**		**Persentase ASN yang menduduki Jabatan sesuai dengan Kompetensi**	**Persen**	**70,00**	**-**	**75,00**	**37.847.000**		**-**	**85,00**	**84.148.000**	**90,00**	**85.000.000**	**95,00**	**84.148.000**	**95,00**	**291.143.000**
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase SDM aparatur yang diberikan bimbingan teknis		Persen	-	-	35,00	37.847.000	-	-	40,00	84.148.000	45,00	85.000.000	50,00	84.148.000	50,00	291.143.000
		Jumlah Diklat dan Pelatihan Formal yang diikuti		jumlah diklat	-		50		-		10		15		20		95	
V	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		**Nilai Evaluasi Akip oleh Inspektorat**	**Indeks**	**75,00**	**71.634.000**	**80,00**	**69.457.000**	**85,00**	**110.548.000**	**90,00**	**165.077.000**	**93,00**	**191.310.000**	**95,00**	**199.130.000**	**95,00**	**807.156.000**
			Indeks Reformasi Birokrasi (PMPRB) Dinas	**Indeks**	**-**		**-**		**18,00**		**19,00**		**20,00**		**21,00**		**21,00**	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun		Dokumen	4	25.935.000	5	34.977.000	10	36.669.000	10	37.360.000	10	57.360.000	10	58.790.000	49	251.091.000
2	Penyusunan Profil SKPD	Jumlah Profil Dinas yang disusun		Eksemplar	30	15.750.000	30	7.970.000	45	11.989.000	45	29.229.000	45	33.000.000	45	37.998.000	240	135.936.000
3	Penyebarluasan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD yang disebarluaskan dan dipublikasikan		Liputan	2	5.200.000	4	9.900.000	10	25.890.000	12	52.200.000	12	53.505.000	12	54.842.000	52	201.537.000
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan public yang disusun		Dokumen	5	24.749.000	5	16.610.000	7	36.000.000	7	46.288.000	7	47.445.000	7	47.500.000	38	218.592.000
VI	**PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN**		**Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai kebutuhan**	**Persen**	**98,00**	**1.798.269.000**	**99,04**	**1.325.495.000**	**99,52**	**7.180.270.000**	**99,68**	**4.410.993.000**	**99,86**	**2.950.000.000**	**100,00**	**2.100.000.000**	**100,00**	**19.765.027.000**

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA		RENCANA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
		OUTPUT	OUTCOME		2017		2018		2019		2020		2021		2022			
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	Perencanaan Pembangunan Jalan	Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan jalan yang disusun		Dokumen	1	84.606.000											1	84.606.000
2	Pembangunan Jalan	Panjang jalan baru yang dibangun		Meter	2.500	599.990.000	350	1.143.180.000	1.250	1.630.876.000	430	2.310.993.000	450	900.000.000	370	600.000.000	5.350	7.185.039.000
3	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan jembatan yang disusun		Dokumen	2	114.115.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	114.115.000
4	Pembangunan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan jembatan yang disusun		dokumen	-	-	1	35.495.000	1	1.037.484.000	1	600.000.000	1	1.300.000.000	1	1.500.000.000	5	4.472.979.000
		Jumlah jembatan baru yang dibangun		Unit	-		-		1						1		2	
5	Perencanaan Pengadaan Tanah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk pembangunan dan peningkatan jalan yang disusun		Dokumen	3	27.592.000											3	27.592.000
6	Persiapan Hasil Pengadaan Tanah	Jumlah persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan dan peningkatan jalan		Paket	4	180.859.000											4	180.859.000
7	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	Jumlah persil Lahan yang dibebaskan untuk pembangunan dan peningkatan jalan		ruas	3	778.290.000	2	146.820.000	5	4.511.910.000	3	1.500.000.000	2	750.000.000			15	7.687.020.000
8	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	Jumlah Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk pembangunan dan peningkatan jalan		Paket	3	12.817.000											3	12.817.000
VII	**PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG**		**Persentase Jalan Kota yang Memiliki Drainase**	**Persen**	**42,17**	**11.783.177.000**	**44,46**	**13.983.613.000**	**47,39**	**14.436.000.000**	**54,39**	**12.748.116.000**	**58,91**	**10.079.800.000**	**64,44**	**10.561.800.000**	**64,44**	**73.592.506.000**
			Persentase Ketersediaan Drainase sesuai Kebutuhan	**Persen**	**52,17**		**54,46**		**59,95**		**64,39**		**68,31**		**74,44**		**74,44**	
1	Perencanaan Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Jumlah Dokumen Teknis Perencanaan Pembangunan Drainase yang disusun		Dokumen	1	19.754.000	1	23.045.000		-	1	14.514.000	1	14.800.000	1	16.300.000	5	88.413.000

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA		RENCANA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
		OUTPUT	OUTCOME		2017		2018		2019		2020		2021		2022			
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
2	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Panjang drainase yang dibangun		Meter	13.500	11.763.423.000	14.500	13.960.568.000	17.100	14.436.000.000	13.900	12.733.602.000	11.700	10.065.000.000	12.600	10.545.500.000	83.300	73.504.093.000
VIII	**PROGRAM PEMBANGUNAN TURAB/ TALUD/ BRONJONG**		**Persentase sungai berfungsi baik**	**Persen**	**72,00**	**676.079.000**	**73,00**	**1.216.010.000**	**76,00**	**852.632.000**	**82,09**	**1.166.400.000**	**85,84**	**1.350.000.000**	**89,59**	**1.422.000.000**	**89,59**	**6.683.121.000**
1	Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Panjang turap/ talud/ bronjong yang dibangun		Meter	185	676.079.000	750	1.216.010.000	210	852.632.000	648	1.166.400.000	750	1.350.000.000	790	1.422.000.000	3.333	6.683.121.000
IX	**PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN**		**Persentase Jalan kota memenuhi standar konstruksi dan fungsi**	**Persen**	**38,87**	**29.124.459.000**	**42,01**	**30.735.645.000**	**50,41**	**34.568.640.000**	**47,66**	**21.097.535.000**	**48,84**	**16.642.615.000**	**50,01**	**86.056.180.000**	**50,01**	**218.225.074.000**
			Persentase Jalan yang dilayani Penerangan jalan umum (PJU)	**Persen**	**37,22**		**38,01**		**39,28**		**40,07**		**41,85**		**43,64**		**43,64**	
1	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara		Meter	30.000	7.094.390.000	29.000	8.596.799.000	23.000	11.482.762.000	23.000	9.074.237.000	25.000	8.750.000.000	25.000	78.125.000.000	155.000	123.123.188.000
		Panjang jalan yang direhabilitasi berkala		Meter	5.000		5.000		8.600		6.000		5.000		5.000		34.600	
2	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dipelihara		Unit	10	80.465.000	10	235.076.000	6	591.327.000	5	200.000.000	5	350.000.000	5	200.000.000	41	1.656.868.000
3	Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan		Meter	8.530	20.754.570.000	12.380	20.379.790.000	10.400	21.064.970.000	11.028	9.220.748.000	8.000	4.875.000.000	8.000	4.996.875.000	58.338	81.291.953.000
		Panjang bahu jalan yang ditingkatkan		Meter	16.630		13.430		7.200		2.000		1.200		1.000		41.460	
4	Jaringan Listrik dan PJU	Persentase lampu jalan yang terpasang berdasarkan kebutuhan		Persen	29,14	1.195.034.000	30,32	1.523.980.000	31,95	1.429.581.000	40,00	2.602.550.000	41,38	2.667.615.000	42,75	2.734.305.000	42,75	12.153.065.000
		Jumlah Penerangan Jalan Umum yang dipelihara		Titik	1.000		850		815		1.000		1.025		1.050		5.740	
X	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN**		**Persentase Pemenuhan Alat Berat Berfungsi Baik**	**Persen**	**81,25**	**397.180.000**	**84,21**	**759.749.000**	**86,36**	**913.685.000**	**91,30**	**731.263.000**	**92,00**	**1.050.525.000**	**92,31**	**1.074.000.000**	**92,31**	**4.926.402.000**

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA		RENCANA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
		OUTPUT	OUTCOME		2017		2018		2019		2020		2021		2022			
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
			Persentase alat laboratorium dengan kondisi baik	**Persen**	**-**		**96,00**		**96,00**		**88,00**		**92,00**		**100,00**		**100,00**	
			Persentase Pemenuhan Layanan Laboratorium Konstruksi	**Persen**	**-**		**50,00**		**86,67**		**90,00**		**96,67**		**100,00**		**100,00**	
1	Pengadaan alat-alat berat	Jumlah Pengadaan alat berat yang dilakukan		Unit	2	207.180.000	1	198.000.000	3	123.421.000	1	95.000.000	2	400.000.000	1	200.000.000	10	1.223.601.000
2	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah pengadaan alat pengujian dan bahan laboratorium yang dilakukan		Set	-	-	1	327.249.000	2	389.510.000	1	249.971.000	1	252.500.000	1	456.000.000	6	1.675.230.000
3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-ALat Berat	Jumlah Alat Berat yang dipelihara		Unit	16	190.000.000	19	215.000.000	22	290.000.000	23	237.000.000	25	245.000.000	26	250.000.000	131	1.427.000.000
4	Rehabilitasi alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah Alat labor yang dipelihara		Set	-	-	1	19.500.000	3	110.754.000	4	149.292.000	5	153.025.000	6	168.000.000	19	600.571.000
XI	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA**		**Persentase irigasi dengan kondisi baik**	**Persen**	**74,05**	**17.616.492.000**	**77,14**	**18.099.624.000**	**80,23**	**15.982.509.700**	**83,31**	**16.673.396.000**	**86,40**	**15.952.352.000**	**89,49**	**16.780.969.000**	**89,49**	**101.105.342.700**
			Persentase kelompok P3A/GP3A yang aktif	**Persen**	**74,67**		**78,67**		**81,33**		**86,67**		**90,67**		**97,33**		**97,33**	
			Persentase ketersedian debit air irigasi	**Persen**	**85,26**		**88,70**		**90,44**		**91,64**		**93,48**		**94,59**		**94,59**	
1	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang disusun		Dokumen			1	128.000.000	1	186.000.000			1	210.000.000	1	110.000.000	4	634.000.000
2	Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai	Jumlah dokumen perencanaan dan penataan sungai yang disusun		Dokumen	1	70.000.000	1	80.000.000	1	87.000.000	1	200.000.000					4	437.000.000
3	Pembangunan Pintu air	Jumlah pintu air yang dibangun		Unit			5	151.476.000	2	50.000.000	2	52.500.000	2	55.000.000	2	57.500.000	13	366.476.000
4	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi		Meter	1.150	2.380.000.000	800	2.098.000.000	530	2.087.000.000	600	1.800.000.000	610	1.830.000.000	650	2.145.000.000	4.340	12.340.000.000
5	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Panjang saluran irigasi yang direhab/ dipelihara		Meter	12.750	13.296.000.000	16.100	13.397.000.000	10.400	11.203.685.000	9.300	11.373.285.000	8.100	10.530.000.000	7.900	11.060.000.000	64.550	70.859.970.000

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA		RENCANA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
		OUTPUT	OUTCOME		2017		2018		2019		2020		2021		2022			
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
6	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air yang dipelihara		Unit	5	91.535.000	10	151.966.000	3	61.098.000	10	179.464.000	10	182.500.000	10	185.000.000	48	851.563.000
7	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	Jumlah daerah aliran sungai yang dipelihara		Daerah Aliran Sungai (DAS)	7	576.200.000	7	760.389.000	7	810.212.000	7	957.159.000	7	981.087.000	7	1.005.610.000	42	5.090.657.000
		Panjang sungai yang dipelihara		Meter	23.451		23.451		23.451		23.451		23.451		-		117.255	
8	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun	Jumlah daerah irigasi yang dipelihara		Daerah Irigasi (DI)	25	1.118.599.000	35	1.285.423.000	30	1.414.725.000	40	2.025.932.000	40	2.076.581.000	40	2.128.495.000	210	10.049.755.000
		Persentase Irigasi yang dipelihara		Persen	7,88		9,95		6,43		5,75		5,00		4,88		39,89	
		Luas area sawah yang teraliri irigasi		Hektar					2.550									
9	Rehabilitasi/ pemeliharaan Petani Pemakai Air	Persentase P3A/GP3A yang dibina		Persen	100	30.375.000	100	47.370.000	100	82.789.700	100	85.056.000	100	87.184.000	100	89.364.000	100	422.138.700
		Jumlah Kelompok Petani Pemakai Air (P3A) dan GP3A yang dibina		kelompok	72		75		75		75		75		75		447	
11	Perencanaan Pengadaan Tanah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk pelaksanaan Normalisasi Sungai yang disusun		Dokumen	1	9.800.000											1	9.800.000
12	Persiapan Pengadaan Tanah	Jumlah persiapan/ sosialisasi dan penilaian wajar pengadaan tanah untuk pelaksanaan normalisasi saluran sungai		Dokumen	1	37.108.000											1	37.108.000
13	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	Jumlah Pelaksanaan Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Sungai yang dilakukan		Dokumen	1	6.875.000											1	6.875.000
XII	**PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA**		**Persentase Debit Air Baku yang Tersedia**	**Persen**	**85,26**	**12.954.476.100**	**94,70**	**13.017.125.000**	**100,44**	**7.722.993.000**	**109,64**	**10.040.000.000**	**113,48**	**6.404.000.000**	**117,59**	**5.170.000.000**	**117,59**	**55.308.594.100**
1	Pembangunan embung dan bangunan penampung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan embung yang disusun		Dokumen			1	78.659.000									1	78.659.000

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA		RENCANA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
		OUTPUT	OUTCOME		2017		2018		2019		2020		2021		2022			
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Jumlah komunitas peduli sungai yang dibina		Kelompok	17	55.591.000	18	47.896.000	18	127.393.000	18	140.000.000	20	154.000.000	22	170.000.000	113	694.880.000
3	Perencanaan Pengadaan Tanah	Jumlah Dokumen Perencanaan pengadaan tahan untuk pembangunan embung disusun		Dokumen	2	26.241.100											2	26.241.100
4	Pengadaan Tanah	Luas lahan yang dibebaskan untuk normalisasi sungai		Hektar			4	12.890.570.000	4,5	7.595.600.000	4,5	9.900.000.000	2,5	6.250.000.000	2	5.000.000.000	6,00	41.636.170.000
5	Persiapan Pengadaan Tanah	Jumlah persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan embung yang dilakukan		Paket	1	237.974.000											1	237.974.000
6	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	Luas lahan yang dibebaskan untuk pembangunan embung		Persil	80	12.471.598.000											80	12.471.598.000
7	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	Jumlah sertifikasi Tanah untuk pembangunan embung		Paket	42	163.072.000											42	163.072.000
XIII	**PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH**		**Persentase rumah tangga yang terlayani air minum perpipaan**	**Persen**	**93,92**	**559.650.000**	**95,57**	**723.360.000**	**96,22**	**1.101.510.000**	**96,60**	**1.175.720.000**	**96,94**	**1.020.610.000**	**97,22**	**1.260.590.000**	**97,22**	**5.841.440.000**
			Persentase Jalan Kota yang Memiliki Drainase	**Persen**	**42,17**		**44,46**		**47,39**		**54,39**		**58,91**		**64,44**		**64**	
1	Revisi Dokumen RISPAM	Jumlah dokumen Revisi Rispam yang disusun		Dokumen					1	185.480.000	1	180.000.000	-	-	-	-	2	365.480.000
2	Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah	Panjang drainase yang dipelihara		Meter	41.000	559.650.000	42.500	723.360.000	25.100	916.030.000	35.000	995.720.000	36.000	1.020.610.000	37.500	1.260.590.000	176.100	5.475.960.000
XIV	**PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR**		**Persentase sungai yang terpelihara**	**Persen**	**30,00**	**100.712.000**	**30,00**	**-**	**30,00**	**-**	**30,00**	**-**	**30,00**	**-**	**30,00**	**-**	**30,00**	**100.712.000**
			Persentase Sungai yang Dinormalisasi	**Persen**	**1,47**		**1,02**		**0,68**		**0,77**		**0,78**		**0,83**		**5,55**	
1	Rehabilitasi/ pemeliharaan	Jumlah bantaran dan tanggul sungai yang dipelihara		Paket	7	100.712.000											7	100.712.000

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA		RENCANA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
		OUTPUT	OUTCOME		2017		2018		2019		2020		2021		2022			
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	bantaran dan tanggul sungai																	
XV	**PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH**		**Persentase Jalan yang memiliki trotoar**	**Persen**	**7,36**	**57.250.000**	**7,36**	**53.639.000**	**7,57**	**2.984.695.000**	**7,74**	**5.159.869.000**	**7,98**	**2.640.884.000**	**8,25**	**3.635.655.000**	**8,25**	**14.531.992.000**
			Persentase bangunan gedung Pemerintah yang memiliki SLF	**Persen**	**-**		**-**		**-**		**1,11**		**2,57**		**4,00**		**4,00**	
			Persentase Penyediaan Perkantoran Tertentu yang Representatif	**Persen**	**74,38**	**`**	**74,38**		**75,63**		**77,50**		**78,25**		**79,38**		**79,38**	
1	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Jumlah dokumen HSBGN yang diterbitkan		Dokumen	4	40.180.000	4	15.069.000	4	7.645.000	4	17.787.000	4	18.230.000	4	18.687.000	24	117.598.000
2	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	Panjang trotoar yang dibangun		Meter					535	2.676.260.000	424	4.707.155.000	600	2.092.890.000	600	3.060.210.000	2.159	12.536.515.000
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang disusun		Laporan	48	17.070.000	48	30.490.000	72	34.660.000	72	37.470.000	72	38.410.000	72	39.370.000	384	197.470.000
4	Peningkatan dan Penguatan Pengembangan Insfrastruktur	Jumlah pertimbangan teknis perencanaan bangunan yang dikeluarkan (Leges Gambar)		Berkas	310		320	8.080.000	300	171.900.000	340	235.467.000	350	241.354.000	350	247.388.000	1.970	904.189.000
		Jumlah rekomendasi perencanaan bangunan gedung yang dikeluarkan TABG		Berkas			8		30		36		38		40		152	
5	Rehabilitasi dan pemeliharaan	Panjang trotoar yang dipelihara		Meter					600	94.230.000	900	161.990.000	700	250.000.000	800	270.000.000	3.000	776.220.000
XVI	**PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN**		**Persentase Jalan lingkungan sesuai Kebutuhan**	**Persen**	**63,42**	**2.168.038.717**	**66,17**	**185.000.000**	**68,92**	**8.076.310.000**	**71,67**	**4.957.780.000**	**74,42**	**4.400.000.000**	**77,17**	**4.200.000.000**	**77,17**	**21.819.090.000**
1	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Panjang jalan lingkung yang dibangun		Meter	-	-	-	185.000.000	9.200	8.076.310.000	4.500	4.957.780.000	4.000	4.400.000.000	3.500	4.200.000.000	21.200	21.819.090.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan teknis jalan lingkung yang disusun		Dokumen			2				3		3		3		11	

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA		RENCANA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
		OUTPUT	OUTCOME		2017		2018		2019		2020		2021		2022			
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
XVII	**PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG**		**Persentase Ketersediaan Dokumen dan Regulasi Tata Ruang**	**Persen**	**12,50**	**213.000.000**	**37,50**	**606.248.000**	**50,00**	**543.000.000**	**75,00**	**759.000.000**	**100,00**	**703.440.000**	**100,00**	**249.000.000**	**100,00**	**3.073.688.000**
1	Penyusunan Kebijakan tentang penyusunan tata ruang	Jumlah Dokumen Penataan Ruang yang ditetapkan		Dokumen			1	30.000.000	2	166.000.000	2	120.000.000	2	60.000.000	1	50.000.000	10	426.000.000
2	Penyusunan Rencana Teknis Ruang kawasan	Jumlah Blad RTRK yang dimuktakhiran		Blad			41	196.000.000	87	230.000.000	149	450.000.000	150	450.000.000			427	1.326.000.000
		Jumlah dokumen RDTR, PZ, RTRK yang disusun, dikaji dan dievaluasi		Dokumen			1		1		2		2				6	
3	Revisi Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen penataan ruang yang dikaji dan dievaluasi		Dokumen	2	126.000.000	3	365.000.000									5	491.000.000
4	Peningkatan dan Penguatan perencanaan tata ruang	Jumlah advice planning yang diterbitkan		Berkas	450	87.000.000	450	15.248.000	450	108.000.000	450	140.000.000	450	142.440.000	450	146.000.000	2.700	638.688.000
		Persentase penerbitan KRK/AP yang sesuai permohonan		Persen	100,00		100,00		90,00		92,89		94,89		100,00		100,00	
5	Pengembangan sistem informasi penataan ruang	Jumlah Peta Analog yang Diinformasikan		Bwp					1	39.000.000	1	49.000.000	1	51.000.000	1	53.000.000	4	192.000.000
		Jumlah Peta Digital yang diupdate		File data					1		1		1		1		4	
XVIII	**PROGRAM PEMANFAATAN RUANG**		**Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan sesuai rencana tata ruang**	**Persen**	**30,00**	**188.100.000**	**31,32**	**248.500.000**	**32,09**	**497.200.000**	**32,74**	**508.000.000**	**33,46**	**508.000.000**	**34,18**	**251.000.000**	**34,18**	**2.200.800.000**
1	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	Jumlah aturan hukum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan Bangunan		Dokumen	1	17.400.000	1	4.500.000	1	7.200.000	1	10.500.000					4	39.600.000
2	Survey dan Pemetaan	Persentase Wilayah yang dilakukan suvey dan pemetaan pendataan bangunan gedung		Persentase Wilayah			40	164.000.000	60	260.000.000	80	260.000.000	100	265.000.000			240	949.000.000
3	Sosialisasi kebijakan, norma standar prosedur dan manual pemmanfaatan ruang	Jumlah sosialisasi kebijakan, norma standar prosedur yang dilaksanakan		kecamatan					5	150.000.000	5	155.000.000	5	158.000.000	5	165.000.000	20	628.000.000
		Jumlah papan informasi		unit					60		63		64		66		253	

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA		RENCANA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
		OUTPUT	OUTCOME		2017		2018		2019		2020		2021		2022			
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		kebijakan, norma standar prosedur yang dipasang																
4	Peningkatan dan Penguatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Rekomendasi IMB yang diberikan		Berkas	550	170.700.000	700	80.000.000	600	80.000.000	600	82.500.000	600	85.000.000	600	86.000.000	3.650	584.200.000
XIX	**PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**		**Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang**	**Persen**	**90,00**	**164.000.000**	**92,00**	**98.678.000**	**95,00**	**113.000.000**	**97,00**	**275.000.000**	**98,00**	**300.000.000**	**100,00**	**293.550.000**	**100,00**	**1.273.678.000**
1	Penyusunan Kebijakan Pengendalian pemanfaatan Ruang	Jumlah Aturan Hukum yang Mengatur Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Perwako			1	12.678.000	1	8.000.000			1	30.000.000	1	50.000.000	4	100.678.000
2	Pengawasan pemanfaatan ruang	Jumlah Pengawasan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan		Berkas	300	59.000.000	350	35.000.000	350	15.000.000	350	95.000.000	350	90.000.000	350	93.000.000	2.050	387.000.000
3	Peningkatan dan penguatan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah teguran pelanggaran ruang yang diterbitkan		berkas	300	105.000.000	300	51.000.000	350	90.000.000	300	180.000.000	300	180.000.000	300	180.000.000	1.800	786.000.000
XX	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI**		**Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Memenuhi Kualifikasi**	**Persen**	**65,00**	**95.700.000**	**70,00**	**136.000.000**	**80,00**	**153.000.000**	**82,00**	**278.000.000**	**85,00**	**285.000.000**	**90,00**	**294.100.000**	**90**	**1.241.800.000**
1	Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi	Jumlah sosialisasi jasa konstruksi pada SKPD yang dilakukan		kali	1	63.700.000	1	105.000.000									2	168.700.000
		Jumlah Pembinaan Jasa Konstruksi pada Badan Usaha		usaha	150		150										300	
2	Analisa/ Pengkajian Kelayakan perizinan	Jumlah IUJK yang diterbitkan		Rekomendasi	35	32.000.000	70	6.000.000	75	9.000.000	80	9.000.000	80	9.000.000	80	9.100.000	420	74.100.000
3	Up Date Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen profil jasa konstruksi yang disusun		Dokumen			1	25.000.000									1	25.000.000
4	Pembinaan kelembagaan dan sumber daya kontruksi	Jumlah monitoring dan evaluasi badan usaha		kali					5	10.000.000	10	40.000.000	12	41.000.000	15	45.000.000	42	136.000.000
5	Pembinaan kompetensi dan produktivitas kontruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang dibina		Orang					100	34.000.000	100	104.000.000	100	105.000.000	100	110.000.000	400	353.000.000

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA		RENCANA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
		OUTPUT	OUTCOME		2017		2018		2019		2020		2021		2022			
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
6	Pembinaan tertib penyelenggaraan kontruksi	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan dan jasa konstruksi yang dilaksanakan		kali					2	100.000.000	2	125.000.000	2	130.000.000	2	130.000.000	8	485.000.000
XXI	**PROGRAM PERLUASAN DAN PENINGKATAN SAMBUNGAN RUMAH (SR)**		**Persentase rumah tangga yang terlayani air minum perpipaan**	**Persen**	**93,32**	**-**	**95,57**	**754.800.000**	**96,22**	**2.942.600.000**	**96,60**	**303.000.000**	**96,94**	**-**	**97,22**	**-**	**97,22**	**4.000.400.000**
1	Peningkatan Idle Capacity Sarana Penyediaan air minum (SPAM)	Jumlah Wilayah yang dilakukan Pembangunan distribusi Air Minum		Kawasan			1	754.800.000									1	754.800.000
2	Penambahan Jaringan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Panjang Jaringan Distribusi Air Minum yang dibangun		Meter	0		4.000		2.817	2.942.600.000	2.863	303.000.000	2.892		2.932		15.504	3.245.600.000
		Jumlah sambungan rumah terpasang		SR	24.599		25.559		25.490		26.740		26.835		26.912		26.912	
XXII	**PROGRAM PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM**		**Persentase bangunan gedung pemerintah yang representatif**	**Persen**	**-**	**-**	**65,17**		**71,16**	**6.892.610.000**	**74,91**	**7.676.774.000**	**79,03**	**16.500.000.000**	**83,15**	**12.000.000.000**	**83,15**	**43.069.384.000**
1	Pengadaan Tanah Mesjid Agung	Luas lahan yang dibebaskan untuk pembangunan Sarana Ibadah Skala Kota		Hektar					1,20	6.892.610.000	2,8	6.631.910.000	0,5	1.500.000.000	0		1,20	15.024.520.000
		Persentase pelaksanaan Pembangunan Sarana Ibadah Skala Kota		Persen					10,00		25,00		52,50		75,00		75,00	
2	Pembangunan Mesjid Agung	Persentase pelaksanaan Pembangunan Sarana Ibadah Skala Kota		Persen					10,00		25,00	1.044.864.000	52,50	15.000.000.000	75,00	12.000.000.000	75,00	28.044.864.000
URUSAN WAJIIB NON DASAR PERTANAHAN																		
XXIII	**PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH**		**Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko**	**Persen**	**11,53**	**30.600.000**	**12,06**	**29.100.000**	**14,29**	**50.340.000**	**15,34**	**72.000.000**	**16,40**	**73.000.000**	**17,46**	**75.600.000**	**17,46**	**330.640.000**
1	Penataan penguasaan, pemilikan,	Jumlah sertifikat aset tanah Pemko yang dilaksanakan		Persil	7	30.600.000	3	29.100.000	15	50.340.000	10	72.000.000	10	73.000.000	10	75.600.000	55	330.640.000

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA		RENCANA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
		OUTPUT	OUTCOME		2017		2018		2019		2020		2021		2022			
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah aset tanah pemko yang memiliki dokumen hibah / penyerahan		Persil	111		119		134		144		155		165		828	
XXIV	**PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN**		**Persentase penyelesaian konflik-konflik pertanahan**	**Persen**	**10,00**	**13.500.000**		**-**		**-**		**-**	**20**	**45.000.000**	**25**	**50.000.000**	**25**	**108.500.000**
1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah fasilitasi Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP)		persil	1	13.500.000				-			5	45.000.000	5	50.000.000	11	108.500.000
XXV	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN**		**Persentase pemenuhan sistem informasi pertanahan**										**20,00**	**200.000.000**	**40,00**	**200.000.000**	**40,00**	**400.000.000**
1	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	Jumlah database pertanahan yang disusun		kecamatan									1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000
Rencana Anggaran Dinas						**88.536.788.817**		**90.842.479.000**		**114.723.117.700**		**110.668.384.700**		**96.762.454.300**		**161.102.890.000**		**662.636.114.517**

Payakumbuh, 14 September 2019
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST,M.Si
NIP. 19750402 200003 1 005

BAB 7
INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagaimana berikut.

Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	(IKU/ IKD/ SPM)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	IKU	78,60	78,90	79,20	79,50	79,80	80,10
2.	Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan	IKU	72,22	77,78	83,33	88,89	94,44	95,33
3.	Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan sesuai dokumen tata ruang	IKD	30,60	31,32	32,02	32,74	33,46	34,18
4.	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/ Kota beserta rencana rinciannya melalui peta analog dan peta digital	SPM	50,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Persentase tersedianya luasan RTH public sekitar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	SPM	45,00	50,00	50,00	55,00	55,00	60,00
6.	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten/ kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	SPM	45,00	75,00	90,00	100,00	100,00	100,00
7.	Persentase Tersedia Layanan izin usaha jasa konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	SPM	40,00	50,00	50,00	55,00	55,00	60,00
8.	Persentase Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	SPM	45,00	45,00	60,00	60,00	60,00	60,00
9.	Persentase rumah yang terlayani air minum perpipaan	IKD	93,92	92,30	92,97	93,62	94,26	97,22
10.	Persentase pelayanan air minum/ Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	IKU/ SPM	94,41	96,71	98,80	99,02	99,67	100,00
11.	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	SPM	28,00	32,00	40,00	43,00	47,00	50,00
12.	Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik/ Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	IKU/ SPM	73,43	76,34	79,10	81,72	84,21	86.58
13.	Persentase sungai yang berfungsi baik	IKD	18,56	19,84	21,69	23,52	24,81	26,37
14.	Persentase Panjang Jalan Status Kota dalam Kondisi mantap/ Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/ kota baik dan sedang	IKU/ SPM	66,56	69,31	72,06	74,81	77,56	80,31
15.	Persentase sistem drainase skala kota/ Persentase penduduk yang terlayani system jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	IKU/ SPM	42,17	44,46	47,39	54,39	58,91	64,44

16.	Persentase penduduk yang terlayani system air limbah yang memadai	SPM	80,00	85,00	85,00	90,00	95,00	100,00
17.	Persentase sertfikasi asset tanah dan bangunan Pemko	IKD	56,82	58,18	59,55	61,36	62,27	63,64
18.	Nilai Evaluasi AKIP Kota	IKU	BB	BB	A	A	A	A

PENUTUP

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyadari bahwa tidak mampu untuk berkarya sendiri tanpa adanya dukungan dari semua pihak. Sebagai bagian dari proses pembangunan daerah itu sendiri, INOVATOR PEMBANGUNAN CERDAS tetap menjadi semangat dasar dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dalam melakukan karyanya, dengan Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penataan Ruang, dan Bina Jasa Konstruksi dan Perizinan menjadi fokus dari target pembangunan yang menjadi kewenangan. Keberlanjutan program di masyarakat menjadi kondisi yang harus diupayakan dalam setiap program yang dilaksanakan.

Untuk itu, Besar harapan kami agar Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara real dan idealnya dapat menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sehingga Dokumen Perencanaan ini menjadi bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh menuju terwujudnya pelayanan prima di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, 14 September 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST,M.Si

NIP. 19750402 200003 1 005

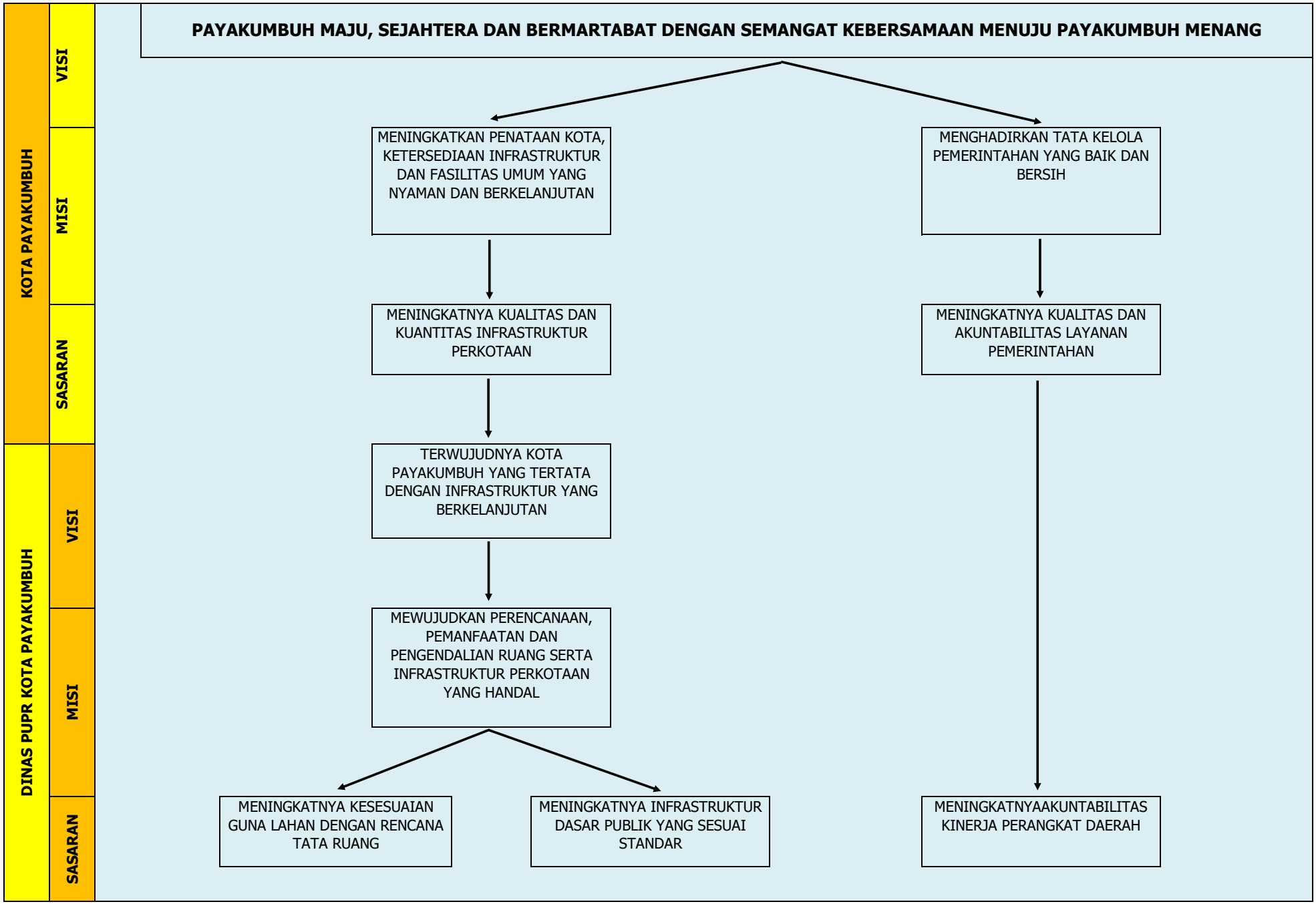
KOTA PAYAKUMBUH
VISI
MISI
SASARAN
DINAS PUPR KOTA PAYAKUMBUH
VISI
MISI
SASARAN
PAYAKUMBUH MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DENGAN SEMANGAT KEBERSAMAAN MENUJU PAYAKUMBUH MENANG
MENINGKATKAN PENATAAN KOTA, KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS UMUM YANG NYAMAN DAN BERKELANJUTAN
MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKUNTABILITAS LAYANAN PEMERINTAHAN
TERWUJUDNYA KOTA PAYAKUMBUH YANG TERTATA DENGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN
MEWUJUDKAN PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG SERTA INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG HANDAL
MENINGKATNYA KESESUAIAN GUNA LAHAN DENGAN RENCANA TATA RUANG
MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DASAR PUBLIK YANG SESUAI STANDAR
MENINGKATNYAAKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

CASCADING KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 -2 022

DINAS

VISI

MISI

SASARAN STRATEGIS ESELON II/ INDIKATOR KINERJA DINAS

SASARAN ESELON III/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM

ESELON IV/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

TERWUJUDNYA KOTA PAYAKUMBUH YANG TERTATA DENGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN

MEWUJUDKAN PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANGS ERTA INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG HANDAL

MENINGKATNYA KESESUAIAN GUNA LAHAN DENGAN RENCANA TATA RUANG

IKU: 1.1 %KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG

MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN TATA RUANG

IKP: 1.1.1 %KETERSEDIAAN DOKUMEN DAN REGULASI TATA RUANG

MENINGKATNYA MENINGKATNYA SUBSTANSI RENCANA TATA RUANG DAN KUALITAS SISTEM INFORMASI PENATAAN

IKK 1.1.1.1 %DOKUMEN RDTR, PZ, RTRK YANG DISUSUN, DIKAJI DAN DIEVALUASI

IKK 1.1.1.2 JUMLAH ATURAN HUKUM MENGATUR PEMANFAATAN RUANG DAN BANGUNAN

IKK 1.1.1.3 JUMLAH ATURAN HUKUM MENGATUR PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

IKK 1.1.1.3 JUMLAH DOKUMEN RTRW YANG DITETAPKAN

IKK 1.1.1.4 JUMLAH DOKUMEN RTRW YANG DIKAJI DAN DIEVALUASI

IKK 1.1.1.5 JUMLAH PETA DIGITAL YANG TERUPDATE

IKK 1.1.1.6 %PETA ANALOG YANG TERINFORMASIKAN

IKK 1.1.1.7 JUMLAH BLAD RTRK YANG DIMUTAKHIRKAN

IKK 1.1.1.8 %WILAYAH YANG DILAKUKAN SURVEY & PEMETAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG

IKK 1.1.1.9 JUMLAH SISTEM INFORMASI PERTANAHAN YANG DISUSUN

MENINGKATNYA KESESUAIAN PEMBANGUNAN DENGAN RENCANA TATA RUANG

IKP 1.2.1 %PENERTIBAN PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

IKD: 1.2.2 %KEPATUHAN PELAKU PEMBANGUNAN SESUAI DOKUMEN TATA RUANG

IKD: 1.2.3 %SERTIFIKASI ASET TANAH DAN BANGUNAN PEMKO

MENINGKATNYA TERTIB PEMANFAATAN RUANG SESUAI DOKUMEN PERIZINAN

IKK 1.2.1.1 JUMLAH ADVICE PLANNING YANG DIKELUARKAN

IKK 1.2.1.2 JUMLAH REKOMENDASI IMB YANG DIBERIKAN

IKK 1.2.1.3 JUMLAH SOSIALISASI KEBIJAKAN, NORMA STANDAR PROSEDUR PEMANFAATAN RUANG YANG DILAKSANAKAN

MENINGKATNYA KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP RENCANA TATA RUANG

IKK 1.2.2.1 JUMLAH SANKSI PELANGGARAN RUANG YANG DITERBITKAN

IKK 1.2.2.2 JUMLAH PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG YANG DILAKSANAKAN

MENINGKATNYA KEPASTIAN HUKUM TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN INFRASTRUKTUR DASAR

IKK 1.2.3.1 JUMLAH ASET TANAH PEMKO YANG MEMILIKI DOKUMEN HIBAH/ PENYERAHAN

IKK 1.2.3.2 JUMLAH SERTIFIKASI ASSET TANAH PEMKO YANG DILAKSANAKAN

IKK 1.2.3.3 JUMLAH PENYELESAIAN SERTIFIKASI KTP DILAKSANAKAN

MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DASAR PUBLIK YANG SESUAI STANDAR

IKU: 2.1 %PELAYANAN AIR MINUM

IKU: 2.2 %PANJANG JALAN STATUS KOTA KONDISI MANTAP

IKU: 2.3 %SISTEM DRAINASE SKALA KOTA

IKU: 2.4 %DAERAH IRIGASI BERKINERJA BAIK

IKU: 2.5 %KETERSEDIAAN FASILITAS UMUM PERKOTAAN

IKD: 2.6 %PENATAAN SUNGAI

MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

IKD 2.1.1 %RUMAH TANGGA TERLAYANI AIR MINUM PERPIPAAN

IKD 2.1.2 %IRIGASI DENGAN KONDISI BAIK

IKP 2.1.3 %SUNGAI BERFUNGSI BAIK

IKP 2.1.4 %KELOMPOK P3A/GP3A YANG AKTIF

IKP 2.1.5 %DEBIT AIR BAKU YANG TERSEDIA

IKP 2.1.6 %KETERSEDIAAN DEBIT AIR IRIGASI YANG DIMANFAATKAN

MENINGKATNYA KETERSEDIAAN IRIGASI

IKK 2.3.1.1 JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN/ PEMBANGUNAN/ PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI YANG DISUSUN

IKK 2.3.1.2 JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN/ PENATAAN SUNGAI YANG DISUSUN

IKK 2.3.1.3 JUMLAH PINTU AIR YANG DIBANGUN

IKK 2.3.1.3 JUMLAH PINTU AIR YANG DIPELIHARA

IKK 2.3.1.4 PANJANG SALURAN IRIGASI YANG DIREHABILITASI

IKK 2.3.1.5 JUMLAH PRASARANA IRIGASI POMPA YANG DIBANGUN

IKK 2.3.1.6 %IRIGASI YANG DIPELIHARA

IKK 2.3.1.7 JUMLAH DAERAH IRIGASI (DI) YANG DIPELIHARA

IKK 2.3.1.8 PERSENTASE P3A/GP3A YANG DIBINA

IKK 2.3.1.8 JUMLAH KELOMPOK P3A DAN GP3A YANG DIBINA DAN DIBERDAYAKAN

IK 2.3.1.9 JUMLAH PINTU AIR YANG TERSEDIA

IK 2.3.1.10 LUAS AREAL SAWAH YANG TERALIRI IRIGASI

MENINGKATNYA PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN SUNGAI

IKK 2.3.2.1 PANJANG TURAP/ TALUD BRPNJONG YANG DIBANGUN

IKK 2.3.2.2 JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENATAAN SUNGAI YANG DISUSUN

IKK 2.3.2.3 PANJANG SUNGAI YANG DINORMALISASI

IKK 2.3.2.4 PANJANG SUNGAI YANG DIPELIHARA

IKK 2.3.2.5 JUMLAH KOMUNITAS PEDULI SUNGAI YANG TERBENTUK

IKK 2.3.2.6 LUAS LAHAN YANG DIBEBASKAN UNTUK NORMALISASI SUNGAI

IKK 2.3.2.7 JUMLAH DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) YANG DIPELIHARA

IKK 2.3.2.8 JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PELAKSANAAN NORMALISASI SUNGAI YANG DISUSUN

IKK 2.3.2.9 JUMLAH PERSIAPAN/ SOSIALISASI DAN PENILAIAN WAJAR PENGADAAN TANAH UNTUK PELAKSANAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI

MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR JALAN

IKP 2.2.1 %JALAN KOTA MEMENUHI STANDAR KONSTRUKSI SESUAI FUNGSI

IKP 2.2.2 %JALAN KOTA YANG MEMILIKI TROTOAR

IKP 2.2.3 %JALAN YANG DILAYANI PJU

IKD 2.2.4 %JALAN KOTA YANG MEMILIKI DRAINASE

IKP 2.2.5 %JALAN LINGKUNGAN YANG SESUAI KEBUTUHAN

MENINGKATNYA PENYEDIAAN JALAN DAN JEMBATAN BARU

IKK 2.4.1.1 JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN YANG DISUSUN

IKK 2.4.1.2 JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN JEMBATAN YANG DISUSUN

IKK 2.4.1.3 JUMLAH PERSIL LAHAN YANG DIBEBASKAN UNTUK PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN JALAN

IKK 2.4.1.4 JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN YANG DISUSUN

IKK 2.4.1.5 JUMLAH PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN YANG DISUSUN

IKK 2.4.1.6 JUMLAH PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN

IKK 2.4.1.6 JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PEDESAAN YANG DISUSUN

IKK 2.4.1.7 JUMLAH JEMBATAN BARU YANG DIBANGUN

IKK 2.4.1.8 PANJANG JALAN BARU YANG DIBANGUN

IKK 2.4.1.9 PANJANG JALAN LINGKUNG YANG DIBANGUN

MENINGKATNYA KUALITAS DAN STRUKTUR JALAN

IKK 2.4.2.1 PANJANG JALAN YANG DITINGKATKAN

MEMPERTAHANKAN KONDISI JALAN DAN JEMBATAN

IKK: 2.4.3.1 PANJANG JALAN YANG DIPELIHARA

IKK: 2.4.3.2 JUMLAH JEMBATAN YANG DIPELIHARA

MENINGKATNYA KUALITASPENERANGAN LAMPU JALAN

IKK 2.4.4.1 JUMLAH PENERANGAN JALAN UMUM YANG DIPELIHARA

IKK 2.4.4.2 %LAMPU JALAN YANG TERPASANG BERDASARKAN KEBUTUHAN

MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA KEBINARGAAN

IKP 2.4.5.1 %PEMENUHAN LAYANAN LABORATORIUM KONSTRUKSI

IKP 2.4.5.2 %PEMENUHAN ALAT BERATBERFUNGSI BAIK

IKK 2.4.5.3 JUMLAH PENGADAAN ALAT LABOR DILAKUKAN

IKK 2.4.5.4 JUMLAH PENGADAAN ALAT BERAT YANG DILAKUKAN

MENINGKATNYA PENYEDIAAN DAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

IKP 2.3.1 %BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH YANG REPRESENTATIF

IKP 2.3.2 %BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH YANG MEMILIKI SLF

IKP 2.3.3 %BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG MEMENUHI KUALIFIKASI

IKP 2.3.4 %PENYEDIAAN SARANA PERKANTORAN TERTENTU YANG REPRESENTATIF

MENINGKATNYA PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA IBADAH DAN PERKANTORAN

IKK 2.5.1.1 %PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA IBADAH SKALA KOTA

IKK 2.5.1.2 JUMLAH SARANA DAN PRASARANA GEDUNG SKALA KOTA YANG DIBANGUN

IK 2.5.1.3 %PENYEDIAAN SARANAN PERKANTORAN TERTENTU YANG REPRESENTATF

IKK 2.5.1.3 LUAS LAHAN YANG DIBEBASKAN UNTUK PEMBANGUNAN SARANA IBADAH SKALA KOTA

MENINGKATNYA PENATAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG, DAN LINGKUNGAN

IKK 2.5.2.1 JUMLAH PERTIMBANGAN TEKNIS PERENCANAAN BANGUNAN YANG DIKELUARKAN (LEGES GAMBAR)

IKK 2.5.2.2 JUMLAH DOKUMEN HSBGN YANG DITERBITKAN

MENINGKATNYA BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG MEMILIKI KUALIFIKASI SESUAI STANDAR

IKK 2.5.3.1 JUMLAH IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) YANG DIKELUARKAN

IKK 2.5.3.2 JUMLAH SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANGAN DAN JASA KONSTRUKSI YANG DILAKSANAKAN

IKK 2.5.3.3 JUMLAH PEMBINAAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG DILAKUKAN

IKK 2.5.3.4 JUMLAH TENAGA KONSTRUKSI YANG DIBINA

IKK 2.5.3.5 JUMLAH DOKUMEN PROFIL JASA KONSTRUKSI YANG DISUSUN

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

IKU: 3.1 PERINGKAT NILAI EVALUASI AKIP SKPD

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

IKP 3.1.1 %KONDISI SARANA PRASARANA PERKANTORAN DALAM KONDISI BAIK

IKP 3.1.2 %ASN YANG MENDUDUKI JABATAN SESUAI KOMPETENSI

IKP 3.1.3 %ASN BERPAKAIAN DINAS DENGAN ATRIBUT LENGKAP

IKP 3.1.4 NILAI EVALUASI AKIP SKPD

IKP 3.1.4 IKM SKPD

IK 3.1.5 INDEKS RB SKPD

IK 3.1.6 %CAPAIAN KINERJA REALISASI PROGRAM/ KEGIATAN

IK 3.1.7 %CAPAIAN KINERJA KEPEGAWAIAN

IK 3.1.8 %ASN BERPERILAKU DISIPLIN

IK 3.1.9 %ASSET PEMDA KEWENANGAN SKPD DENGAN KONDISI BAIK

MENINGKATNYA KUALITAS DOKUMENTASI DAN PELAPORAN DINAS

IKK 3.1.1.1 JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA YANG DISUSUN

IKK 3.1.1.2 JUMLAH PROFIL DINAS YANG DISUSUN

IKK 3.1.1.3 JUMLAH CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KERJA SKPD YANG DISEBARLUASKAN DAN DIPUBLIKASIKAN

IKK 3.1.1.4 JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN DAN DOKUMEN PELAYANAN PUBLIK YANG DISUSUN

IKK 3.1.1.5 JUMLAH LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI YANG DISUSUN

MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN URUSAN KEDINASAN

IK 3.1.2.1 %SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN RENJAYANG SELARAS DENGAN RENSTRA

IK 3.1.2.2 %SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN RENJA PD YANG SELARAS DENGAN RKPD

IK 3.1.2.3 %CAPAIAN KINERJA REALISASI PENERIMAAN DAERAH SKPD

IK 3.1.2.4 %CAPAIAN KINERJA REALISASI KEUANGAN

MENINGKATNYA KAPASITAS SUMBER DAYA SKPD

IK 3.1.3.1 %ASN YANG MENGIKUTI BIMTEK SESUAI KOMPETENSI

IK 3.1.3.2 %ASN YANG TERLAMBAT MELEBIHI ATURAN KEPEGAWAIAN

IK 3.1.3.3 %ASSET PEMDA KEWENANGAN SKPD YANG TIDAK TERMANFAATKAN

IKK 3.1.3.4 %SDM APARATUR YANG DIBERIKAN BIMBINGAN TEKNIS

MENINGKATNYA OPERASIONAL SKPD

IKK 3.1.4.1 JUMLAH REKENING LISTRIK, TELEPON DAN AIR YANG DIBAYARKAN

IKK 3.1.4.2 JUMLAH PAJAK KENDARAAN DINAS YANG DIBAYARKAN

IKK 3.1.4.3 JUMLAH JASA ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DIBAYARKAN

IKK 3.1.4.4 JUMLAH JASA TENAGA KEBERSIHAN YANG DIBAYARKAN

IKK 3.1.4.5 JUMLAH BAHAN KEBERSIHAN KANTOR YANG DISEDIAKAN

IKK 3.1.4.6 JUMLAH PERALATAN KERJA YANG DIPERBAIKI

SASARAN

IKK	2.3.2.10	JUMLAH PELAKSANAAN PEMBEBASAN TANAH UNTUK NORMALISASI SUNGAI YANG DILAKUKAN
IKK	2.3.2.11	JUMLAH DOKUMEN PEMBANGUNAN EMBUNG YANG DISUSUN
IKK	2.3.2.12	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAHUNTUK PEMBANGUNAN EMBUNG YANG DISUSUN
IKK	2.3.2.13	JUMLAH PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN EMBUNG YANG DILAKUKAN
IKK	2.3.2.14.5	LUAS LAHAN YANG DIBEBASKAN UNTUK PEMBANGUNAN EMBUNG YANG DILAKUKAN
IKK	2.3.2.1	JUMLAH SERTIFIKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN EMBUNG YANG DILAKUKAN
IKK	2.3.3.16	JUMLAH BANTARAN SUNGAI DAN TANGGUL YANG DIPELIHARA
		MENINGKATNYA PELAYANAN AIR MINUM
IKK	2.3.3.1	PANJANG JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM YANG DIBANGUN
IKK	2.3.3.2	JUMLAH DOKUMEN REVISI RISPAM YANG DISUSUN
IK	2.3.3.3	JUMLAH PENDUDUK YANG TERLAYANI AIR MINUM
IK	2.3.3.4	JUMLAH SAMBUNGAN RUMAH TERPASANG

IKK	2.4.5.5	JUMLAH ALAT LABOR YANG DIPELIHARA
IKK	2.4.5.6	JUMLAH ALAT BERAT YANG DIPELIHARA
		MENINGKATNYA JALAN YANG MEMILIKI DRAINASE
IKK	2.4.6.1	PANJANG DRAINASE YANG DIPELIHARA
IKK	2.4.6.2	PANJANG DRAINASE YANG DIBANGUN
IKK	2.4.6.3	JUMLAH DOKUMEN TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRAINASE YANG DISUSUN
		MENINGKATNYA PRASARANA UNTUK PEJALAN KAKI
IKK	2.4.7.1	PANJANG TROTOAR YANG DIBANGUN
IKK	2.4.7.2	PANJANG TROTOAR YANG DIPELIHARA

IKK	3.1.4.7	JUMLAH FOTOCOPY, CETAK DAN JILID DOKUMEN DINAS YANG DISEDIAKAN
IKK	3.1.4.8	JUMLAH FOTOCOPY, CETAK DAN JILID DOKUMEN DINAS YANG DISEDIAKAN
IKK	3.1.4.9	JUMLAH KOMPONEN INSTALASI LISTRIK PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN
IKK	3.1.4.10	JUMLAH PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN
IKK	3.1.4.11	JUMLAH BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISEDIAKAN
IKK	3.1.4.1.2	JUMLAH MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISEDIAKAN
IKK	3.1.4.13	JUMLAH RAPAT-RAPAT KOORDINASI DALAM DAERAH, LUAR DAERAH DAN LUAR NEGERI YANG DILAKUKAN
IKK	3.1.4.14	JUMLAH JASA TENAGA ADMINITRASI DAN TENAGA TEKNIS PERKANTORAN YANG DIBAYARKAN
IKK	3.1.4.15	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR SKALA KOTA YANG DIBANGUN
IKK	3.1.4.16	JUMLAH PENGADAAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL YANG DILAKUKAN
IKK	3.1.4.17	JUMLAH PENGADAAN MEBELEUR YANG DILAKUKAN
IKK	3.1.4.18	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR SKALA KOTA YANG DIPELIHARA
IKK	3.1.4.19	JUMLAH KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL YANG DIPELIHARA
IKK	3.1.4.20	JUMLAH MEBELEUR YANG DIPELIHARA
IKK	3.1.4.21	JUMLAH PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DILAKUKAN
IKK	3.1.4.22	JUMLAH PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA YANG DILAKUKAN
IKK	3.1.4.23	JUMLAH ALAT TULIS KANTOR YANG DISEDIAKAN

CASCADING KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 -2022

VISI

TERWUJUDNYA KOTA PAYAKUMBUH YANG TERTATA DENGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN

MISI

MEWUJUDKAN PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANGS ERTA INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG HANDAL

SASARAN STRATEGIS ESELON II/ INDIKATOR KINERJA DINAS

MENINGKATNYA KESESUAIAN GUNA LAHAN DENGAN RENCANA TATA RUANG	MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DASAR PUBLIK YANG SESUAI STANDAR	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH
IKU: 1.1 %KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG	IKU: 2.1 %PELAYANAN AIR MINUM	IKU: 3.1 PERINGKAT NILAI EVALUASI AKIP SKPD
	IKU: 2.2 %PANJANG JALAN STATUS KOTA KONDISI MANTAP	
	IKU: 2.3 %SISTEM DRAINASE SKALA KOTA	
	IKU: 2.4 %DAERAH IRIGASI BERKINERJA BAIK	
	IKU: 2.5 %KETERSEDIAAN FASILITAS UMUM PERKOTAAN	
	IKD: 2.6 %PENATAAN SUNGAI	

Payakumbuh, September 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST.M.Si

NIP. 19750402 200003 1 005

CASCADING KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 -2 022

SASARAN STRATEGIS 1

SASARAN STRATEGIS ESELON II/ INDIKATOR KINERJA

SASARAN ESELON III/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SASARAN ESELON IV/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

SASARAN PELAKSANA/ INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

MENINGKATNYA KESESUAIAN GUNA LAHAN DENGAN RENCANA TATA RUANG
- IKU: 1.1 %KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG

MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN TATA RUANG
- IKP: 1.1.1 %KETERSEDIAAN DOKUMEN DAN REGULASI TATA RUANG

MENINGKATNYA KESESUAIAN PEMBANGUNAN DENGAN RENCANA TATA RUANG
- IKP 1.2.1 %PENERTIBAN PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG
- IKD: 1.2.2 %KEPATUHAN PELAKU PEMBANGUNAN SESUAI DOKUMEN TATA RUANG
- IKD: 1.2.3 %SERTIFIKASI ASET TANAH DAN BANGUNAN PEMKO

MENINGKATNYA SUBSTANSI RENCANA TATA RUANG DAN KUALITAS SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG
- IKK 1.1.1.1 JUMLAH DOKUMEN RDTR, PZ, RTRK YANG DISUSUN, DIKAJI DAN DIEVALUASI
- IKK 1.1.1.2 JUMLAH ATURAN HUKUM MENGATUR PEMANFAATAN RUANG DAN BANGUNAN
- IKK 1.1.1.3 JUMLAH ATURAN HUKUM MENGATUR PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
- IKK 1.1.1.4 JUMLAH DOKUMEN PENATAAN RUANG YANG DITETAPKAN
- IKK 1.1.1.5 JUMLAH DOKUMEN PENATAAN RUANG YANG DIKAJI DAN DIEVALUASI
- IKK 1.1.1.6 JUMLAH PETA DIGITAL YANG DIUPDATE
- IKK 1.1.1.7 JUMLAH PETA ANALOG YANG DIINFORMASIKAN
- IKK 1.1.1.8 JUMLAH BLAD RTRK YANG DIMUTAKHIRKAN
- IKK 1.1.1.9 %WILAYAH YANG DILAKUKAN SURVEY & PEMETAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
- IKK 1.1.1.10 JUMLAH DATABASE PERTANAHAN YANG DISUSUN

MENINGKATNYA TERTIB PEMANFAATAN RUANG SESUAI DOKUMEN PERIZINAN
- IKK 1.2.1.1 JUMLAH ADVICE PLANNING YANG DITERBITKAN
- IKK 1.2.1.2 JUMLAH REKOMENDASI IMB YANG DIBERIKAN
- IKK 1.2.1.3 JUMLAH SOSIALISASI KEBIJAKAN, NORMA STANDAR PROSEDUR PEMANFAATAN RUANG YANG DILAKSANAKAN
- IKK 1.2.1.4 JUMLAH PAPAN INFORMASI KEBIJAKAN, NORMA STANDAR PROSEDUR YANG DIPASANG
- IKK 1.2.1.5 PERSENTASE PENERBITAN KRK/AP YANG SESUAI DENGAN PERMOHONAN

MENINGKATNYA KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP RENCANA TATA RUANG
- IKK 1.2.2.1 JUMLAH TEGURAN PELANGGARAN RUANG YANG DITERBITKAN
- IKK 1.2.2.2 JUMLAH PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG YANG DILAKSANAKAN

MENINGKATNYA KEPASTIAN HUKUM TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN INFRASTRUKTUR DASAR
- IKK 1.2.3.1 JUMLAH ASET TANAH PEMKO YANG MEMILIKI DOKUMEN HIBAH/ PENYERAHAN
- IKK 1.2.3.2 JUMLAH SERTIFIKASI ASSET TANAH PEMKO YANG DILAKSANAKAN
- IKK 1.2.3.3 JUMLAH FASILITASI KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN (KTP)

1.1.1.9 TERLAKSANANYA PENYUSUNAN DOKUMEN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
- IKI 1.1.1.9.1 JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI 1.1.1.9.2 JUMLAH PAKET PENYUSUNAN DOKUMEN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- IKI 1.1.1.9.3 JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIASISTENSI
- IKI 1.1.1.9.4 JUMLAH PENYIAPAN RAPAT TIM TEKNIS YANG DISELENGGARAKAN
- IKI 1.1.1.9.5 JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DISERAHTERIMAKAN
- IKI 1.1.1.9.6 JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISIAPKAN
- IKI 1.1.1.9.7 JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIARSIPKAN
- IKI 1.1.1.9.7 JUMLAH DOKUMEN/ BERKAS YANG DISTRIBUSIKAN

1.2.1.1 TERLAKSANANYA PENERBITAN KETERANGAN RENCANA KOTA/ ADVICE PLANNING
- IKI 1.2.1.1.1 JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI 1.2.1.1.2 JUMLAH BERKAS YANG DIVERIFIKASI KELENGKAPANNYA DAN DITERIMA
- IKI 1.2.1.1.3 JUMLAH BERKAS YANG DIAGENDAKAN
- IKI 1.2.1.1.4 JUMLAH JUMLAH BERKAS YANG DISURVEI
- IKI 1.2.1.1.5 JUMLAH BERKAS YANG DIGAMBARKAN BERDASARKAN RTR
- IKI 1.2.1.1.6 JUMLAH ADVICE PLANNING YANG DIKETIK SKNYA
- IKI 1.2.1.1.7 JUMLAH ADVICE PLANNING YANG DIVERIFIKASI KEBENARANNYA SESUAI RTR
- IKI 1.2.1.1.8 JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISIAPKAN
- IKI 1.2.1.1.9 JUMLAH DOKUMEN/ BERKAS YANG DISTRIBUSIKAN
- IKI 1.2.1.1.10 JUMLAH DOKUMEN/ BERKAS YANG DIREKAP KE DATA BASE AP
- IKI 1.2.1.1.11 JUMLAH DOKUMEN/ BERKAS YANG DIARSIPKAN

1.2.2.1 TERLAKSANANYA PENGAWASAN BANGUNAN YANG BELUM BER-IMB
- IKI 1.2.2.1.1 JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI 1.2.2.1.2 JUMLAH LOKASI BANGUNAN YANG DISURVEI
- IKI 1.2.2.1.3 JUMLAH LAPORAN PENGAWASAN BANGUNAN YANG DISUSUN
- IKI 1.2.2.1.4 JUMLAH PENYIAPAN RAPAT TIM PENERTIBAN BANGUNAN YANG DISELENGGARAKAN
- IKI 1.2.2.1.5 JUMLAH BERKAS SP3B YANG DBERIKAN
- IKI 1.2.2.1.6 JUMLAH BERKAS SP4B YANG DBERIKAN
- IKI 1.2.2.1.7 JUMLAH BERKAS SURAT PERINTAH BONGKAR YANG DIBERIKAN
- IKI 1.2.2.1.8 JUMLAH PAPAN PENYEGELAN YANG DIPASANG
- IKI 1.2.2.1.9 JUMLAH LOKASI BANGUNAN YANG MELANGGAR DIINPUT PADA SISTEM
- IKI 1.2.2.1.10 JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISIAPKAN

1.2.3.1 TERLAKSANANYA SERTIFIKASI TANAH ASET PEMKO
- IKI 1.2.3.1.1 JUMLAH PERSIAPAN ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI 1.2.3.1.2 JUMLAH PERSIAPAN RAPAT KOORDINASI YANG DILAKUKAN
- IKI 1.2.3.1.3 JUMLAH ALAS HAK TANAH ASET YANG DIKUMPULKAN
- IKI 1.2.3.1.4 JUMLAH TANAH ASET YANG DIDAFTARKAN
- IKI 1.2.3.1.5 JUMLAH PEMASANGAN PATOK BATAS TANAH YANG DIDAMPINGI
- IKI 1.2.3.1.6 JUMLAH SERTIPIKAT TANAH ASET YANG DIARSIPKAN
- IKI 1.2.3.1.7 JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISIAPKAN
- IKI 1.2.3.1.8 JUMLAH SERTIPIKAT HAK PAKAI YANG DISERAHKAN
- IKI 1.2.3.1.9 JUMLAH LAPORAN KEGIATAN YANG DISUSUN

1.1.1.1. TERLAKSANANYA PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN EVALUASI DOKUMEN DOKUMEN RDTR, PZ, RTRK
- IKI 1.1.1.1.1 JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI 1.1.1.1.2 JUMLAH PAKET PERENCANAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- IKI 1.1.1.1.3 JUMLAH DOKUMEN KELENGKAPAN YANG DISIAPKAN
- IKI 1.1.1.1.4 JUMLAH DATA YANG DIHIMPUN
- IKI 1.1.1.1.5 JUMLAH DATA YANG DIANALISIS
- IKI 1.1.1.1.6 JUMLAH DATA YANG DIUPDATE
- IKI 1.1.1.1.7 JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DISERAHTERIMAKAN
- IKI 1.1.1.1.8 JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISIAPKAN
- IKI 1.1.1.1.9 JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIARSIPKAN
- IKI 1.1.1.1.10 JUMLAH DOKUMEN YANG DISTRIBUSIKAN

1.2.1.2 TERLAKSANANYA REKOMENDASI IMB YANG DIBERIKAN
- IKI 1.2.1.2.1 JUMLAH BERKAS PERMOHONAN YANG DITERIMA
- IKI 1.2.1.2.2 JUMLAH BERKAS YANG DIVERIFIKASI
- IKI 1.2.1.2.3 JUMLAH BERKAS YANG DIAGENDAKAN
- IKI 1.2.1.2.4 JUMLAH LOKASI YANG DISURVEY
- IKI 1.2.1.2.5 JUMLAH LEMBAR KENDALI YANG DIBUAT
- IKI 1.2.1.2.6 JUMLAH KETENTUAN UMUM YANG DIBUAT
- IKI 1.2.1.2.7 JUMLAH KETENTUAN BIAYA YANG DIBUAT

1.2.2.2 TERLAKSANANYA PENGAWASAN BANGUNAN YANG BER-IMB
- IKI 1.2.2.2.1 JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI 1.2.2.2.2 JUMLAH BAP YANG DISIAPKAN
- IKI 1.2.2.2.3 JUMLAH LOKASI BANGUNAN YANG DISURVEI
- IKI 1.2.2.2.4 JUMLAH BERKAS SP3 YANG DBERIKAN
- IKI 1.2.2.2.5 JUMLAH SURAT PERINTAH BONGKAR YANG DIBERIKAN
- IKI 1.2.2.2.6 JUMLAH REKOMENDASI PENCABUTAN IMB YANG DISIAPKAN
- IKI 1.2.2.2.7 JUMLAH LAPORAN YANG DISUSUN
- IKI 1.2.2.2.8 JUMLAH LOKASI BANGUNAN YANG MELANGGAR

1.2.3.3 TERLAKSANANYA FASILITASI KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN (KTP)
- IKI 1.2.3.3.1 JUMLAH PERSIAPAN ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI 1.2.3.3.2 JUMLAH PERSIAPAN RAPAT KOORDINASI YANG DILAKUKAN
- IKI 1.2.3.3.3 JUMLAH BIDANG TANAH KTP YANG SURVEI
- IKI 1.2.3.3.4 JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISIAPKAN
- IKI 1.2.3.3.5 JUMLAH LAPORAN KEGIATAN YANG DISUSUN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

IKI	I.1.10	

1.1.1.4 TERLAKSANANYA PENETAPAN RANPERDA PENATAAN RUANG

IKI	I.1.14.1	JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
IKI	I.1.14.2	JUMLAH RAPAT-RAPAT YANG DISIAPKAN
IKI	I.1.14.3	JUMLAH DOKUMEN KELENGKAPAN YANG DISIAPKAN
IKI	I.1.14.4	JUMLAH DOKUMEN KELENGKAPAN YANG DIPERBAIKI
IKI	I.1.14.5	JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISIAPKAN
IKI	I.1.14.6	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIARSIPKAN
IKI	I.1.14.7	JUMLAH LAPORAN KEGIATAN YANG DIBUAT

1.1.1.5 TERLAKSANANYA PENGKAJIAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENATAAN RUANG

IKI	I.1.15.1	JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
IKI	I.1.15.2	JUMLAH RAPAT-RAPAT YANG DISIAPKAN
IKI	I.1.15.3	JUMLAH DOKUMEN KELENGKAPAN YANG DISIAPKAN
IKI	I.1.15.4	JUMLAH DOKUMEN KELENGKAPAN YANG DIPERBAIKI
IKI	I.1.15.5	JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISIAPKAN
IKI	I.1.15.6	JUMLAH DOKUMEN KELENGKAPAN YANG DIARSIPKAN
IKI	I.1.15.7	JUMLAH LAPORAN KEGIATAN YANG DIBUAT

1.1.1.6 TERLAKSANANYA UPDATING PETA DIGITAL

IKI	I.1.16.1	JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
IKI	I.1.16.2	JUMLAH DATA YANG DIHIMPUN
IKI	I.1.16.3	JUMLAH DATA YANG DIANALISIS
IKI	I.1.16.4	JUMLAH DATA YANG DIINPUT
IKI	I.1.16.5	JUMLAH PETA YANG DICETAK
IKI	I.1.16.6	JUMLAH PETA YANG DIDISTRIBUSIKAN
IKI	I.1.16.7	JUMLAH DOKUMEN PETA YANG DIARSIPKAN
IKI	I.1.16.8	JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISIAPKAN
IKI	I.1.16.9	JUMLAH LAPORAN KEGIATAN YANG DIBUAT

1.1.1.7 TERLAKSANANYA PENGINFORMASIAN PETA ANALOG

IKI	I.1.17.1	JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
IKI	I.1.17.2	JUMLAH PETA ANALOG YANG DICETAK
IKI	I.1.17.3	JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISIAPKAN
IKI	I.1.17.4	JUMLAH PETA ANALOG YANG DISTRIBUSIKAN
IKI	I.1.17.5	JUMLAH LAPORAN KEGIATAN YANG DIBUAT
IKI	I.1.17.6	JUMLAH PETA ANALOG YANG DIARSIPKAN

1.1.1.8 TERLAKSANANYA PEMUTAKHIRAN BLAD RTRK

IKI	I.1.18.1	JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN

IKI	I.2.1.7	
IKI	I.2.1.8	JUMLAH KETENTUAN TEKNIS YANG DIBUAT
IKI	I.2.1.9	JUMLAH BERKAS YANG DIAJUKAN KEATASAN
IKI	I.2.1.10	JUMLAH BERKAS YANG DIINPUT
IKI	I.2.1.11	JUMLAH BERKAS YANG DIARSIPKAN

1.2.1.3 TERLAKSANANYA SOSIALISASI KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN MANUAL PEMANFAATAN RUANG

IKI	I.2.1.3.1	JUMLAH DATA LOKASI YANG DISIAPKAN
IKI	I.2.1.3.2	JUMLAH LOKASI YANG DISURVEY
IKI	I.2.1.3.3	JUMLAH REKAPITULASI DATA
IKI	I.2.1.3.4	JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
IKI	I.2.1.3.5	JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA YANG DISIAPKAN
IKI	I.2.1.3.6	JUMLAH DOKUMEN YANG DIARSIPKAN

IKI	I.2.2.8	YANG DIINPUT PADA SISTEM
IKI	I.2.2.9	JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISIAPKAN

IKI	1.1.1.8.2	JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
IKI	1.1.1.8.3	JUMLAH DOKUMEN KELENGKAPAN YANG DISEDIAKAN
IKI	1.1.1.8.4	JUMLAH RAPAT RAPAT YANG DISIAPKAN
IKI	1.1.1.8.5	JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISIAPKAN
IKI	1.1.1.8.6	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIARSIPKAN
IKI	1.1.1.8.7	JUMLAH LAPORAN KEGIATAN YANG DIBUAT

1.1.1.2 TERLAKSANANYA PEMBUATAN ATURAN HUKUM YANG MENGATUR PEMANFAATAN RUANG DAN BANGUNAN		
IKI	1.1.1.2.1	JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
IKI	1.1.1.2.2	JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA YANG DISIAPKAN
IKI	1.1.1.2.3	JUMLAH PENYIAPAN RAPAT TIM PENYUSUNAN ATURAN HUKUM YANG MENGATUR PEMANFAATAN RUANG DAN BANGUNAN
IKI	1.1.1.2.4	JUMLAH DATA YANG DIKUMPULKAN
IKI	1.1.1.2.5	JUMLAH RANCANGAN ATURAN HUKUM YANG DIBUAT

1.1.1.3 TERLAKSANANYA PENYUSUNAN ATURAN TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG		
IKI	1.1.1.3.1	JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
IKI	1.1.1.3.2	JUMLAH REFERENSI ATURAN YANG DISIAPKAN
IKI	1.1.1.3.3	JUMLAH PENYIAPAN RAPAT TIM PENYUSUNAN ATURAN
IKI	1.1.1.3.4	JUMLAH ATURAN YANG DICETAK
IKI	1.1.1.3.5	JUMLAH ATURAN YANG DIAJUKAN UNTUK PENGESAHAN
IKI	1.1.1.3.6	JUMLAH ATURAN YANG DIARSIPKAN
IKI	1.1.1.3.7	JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISIAPKAN

1.1.1.10 TERLAKSANANYA PENYUSUNAN DATABASE PERTANAHAN		
IKI	1.1.1.10.1	JUMLAH PERSIAPAN ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
IKI	1.1.1.10.2	JUMLAH PERSIAPAN RAPAT KOORDINASI YANG DILAKUKAN
IKI	1.1.1.10.3	JUMLAH DOKUMEN TANAH ASET YANG DISIAPKAN
IKI	1.1.1.10.4	JUMLAH DATABASE YANG DIBUAT
IKI	1.1.1.10.5	JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISIAPKAN
IKI	1.1.1.10.6	JUMLAH LAPORAN KEGIATAN YANG DISUSUN

Payakumbuh, September 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST.M.Si

NIP. 19750402 200003 1 005

CASCADING KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 -2 022

SASARAN STRATEGIS 2

SASARAN STRATEGIS ESELON II/ INDIKATOR KINERJA DINAS

SASARAN ESELON III/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SASARAN ESELON IV/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

G KOTA PAYAKUMBUH

MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DASAR PUBLIK YANG SESUAI STANDAR

- IKU: 2.1 % PELAYANAN AIR MINUM
- IKU: 2.2 % PANJANG JALAN STATUS KOTA KONDISI MANTAP
- IKU: 2.3 % SISTEM DRAINASE SKALA KOTA
- IKU: 2.4 % DAERAH IRIGASI BERKINERJA BAIK
- IKU: 2.5 % KETERSEDIAAN FASILITAS UMUM PERKOTAAN
- IKD: 2.6 % PENATAAN SUNGAI

MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

- IKD 2.1.1 %RUMAH TANGGA TERLAYANI AIR MINUM PERPIPAAN
- IKD 2.1.2 %IRIGASI DENGAN KONDISI BAIK
- IKP 2.1.3 %SUNGAI BERFUNGSI BAIK
- IKP 2.1.4 %KELOMPOK P3A/GP3A YANG AKTIF
- IKP 2.1.5 %DEBIT AIR BAKU YANG TERSEDIA
- IKP 2.1.6 %KETERSEDIAAN DEBIT AIR IRIGASI

MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR IRIGASI

- IKK JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN/ PEMBANGUNAN/ PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI YANG DISUSUN
- IKK JUMLAH PINTU AIR YANG DIBANGUN
- IKK JUMLAH PINTU AIR YANG DIPELIHARA
- IKK PANJANG SALURAN IRIGASI YANG DIREHABILITASI
- IKK %IRIGASI YANG DIPELIHARA
- IKK JUMLAH DAERAH IRIGASI (DI) YANG DIPELIHARA
- IKK PERSENTASE KELOMPOK P3A/GP3A YANG DIBINA
- IKK JUMLAH KELOMPOK P3A DAN GP3A YANG DIBINA
- IK LUAS AREAL SAWAH YANG TERALIRI IRIGASI

2.3.1.1 TERLAKSANANYA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN/ PEMBANGUNAN/ PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PERENCANAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- IKI JUMLAH LOKASI PERENCANAAN YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIASISTENSI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DISERAHTERIMAKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIARSIPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN/ BERKAS YANG DISTRIBUSIKAN

2.3.1.2 TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN PINTU AIR

- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH LOKASI USULAN YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- IKI JUMLAH LOKASI PERENCANAAN YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIASISTENSI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIAWASI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DISERAHTERIMAKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN YANG DIARSIPKAN

2.3.1.3 TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN/REHABILITASI PINTU AIR

- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH LOKASI USULAN YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- IKI JUMLAH LOKASI PERENCANAAN YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIASISTENSI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIAWASI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DISERAHTERIMAKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN YANG DIARSIPKAN

2.3.1.4 TERLAKSANANYA REHABILITASI SALURAN IRIGASI

- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH LOKASI USULAN YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- IKI JUMLAH LOKASI PERENCANAAN YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIASISTENSI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIAWASI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DISERAHTERIMAKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN YANG DIARSIPKAN

2.3.1.6 TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN DAERAH IRIGASI

- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH LOKASI USULAN YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) PAKET PERENCANAAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI YANG DILAKSANAKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI YANG DIAWASI
- IKI JUMLAH PAKET PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI YANG DISERAHTERIMAKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN YANG DIARSIPKAN

2.3.1.8 TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN P3A/ GP3A

MENINGKATNYA PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN SUNGAI

- IKK PANJANG TURAP/ TALUD/ BRONJONG YANG DIBANGUN
- IKK JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENATAAN SUNGAI YANG DISUSUN
- IKK PANJANG SUNGAI YANG DINORMALISASI
- IKK PANJANG SUNGAI YANG DIPELIHARA
- IKK JUMLAH KOMUNITAS PEDULI SUNGAI YANG DIBINA
- IKK LUAS LAHAN YANG DIBEBASKAN UNTUK NORMALISASI SUNGAI
- IKK JUMLAH DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) YANG DIPELIHARA
- IKK JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PELAKSANAAN NORMALISASI SUNGAI YANG DISUSUN
- IKK JUMLAH PERSIAPAN/ SOSIALISASI DAN PENILAIAN WAJAR PENGADAAN TANAH UNTUK PELAKSANAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI
- IKK JUMLAH PELAKSANAAN PEMBEBASAN TANAH UNTUK NORMALISASI SUNGAI YANG DILAKUKAN
- IKK JUMLAH DOKUMEN PEMBANGUNAN EMBUNG YANG DISUSUN
- IKK JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN EMBUNG YANG DISUSUN
- IKK JUMLAH PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN EMBUNG YANG DILAKUKAN
- IKK LUAS LAHAN YANG DIBEBASKAN UNTUK PEMBANGUNAN EMBUNG
- IKK JUMLAH SERTIFIKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN EMBUNG YANG DILAKUKAN
- IKK JUMLAH BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI YANG DIPELIHARA

2.3.2.1 TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN TURAP/ TALUD/ BRONJONG

- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH LOKASI USULAN YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- IKI JUMLAH LOKASI PERENCANAAN YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIASISTENSI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIAWASI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DISERAHTERIMAKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN YANG DIARSIPKAN

2.3.2.2 TERLAKSANANYA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN/ PENATAAN SUNGAI

- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PERENCANAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- IKI JUMLAH LOKASI PERENCANAAN YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIASISTENSI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DISERAHTERIMAKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIARSIPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN/ BERKAS YANG DISTRIBUSIKAN

2.3.2.3 TERLAKSANANYA NORMALISASI SUNGAI

- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH LOKASI USULAN YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- IKI JUMLAH LOKASI PERENCANAAN YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIASISTENSI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIAWASI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DISERAHTERIMAKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN YANG DIARSIPKAN

2.3.2.4 TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN SUNGAI

- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH LOKASI USULAN YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) PAKET PERENCANAAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PEMELIHARAAN RUAS SUNGAI YANG DILAKSANAKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEMELIHARAAN RUAS SUNGAI YANG DIAWASI
- IKI JUMLAH PAKET PEMELIHARAAN RUAS SUNGAI YANG DISERAHTERIMAKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN YANG DIARSIPKAN

2.3.2.5 TERLAKSANANYA PEMBINAAN/ PEMBENTUKAN KOMUNITAS PEDULI SUNGAI

- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PENDAMPINGAN KOMUNITAS PEDULI SUNGAI YANG DILAKSANAKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN YANG DIARSIPKAN

2.3.2.6 TERLAKSANANYA PEMBEBASAN LAHAN UNTUK NORMALISASI SUNGAI

- IKI JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH YANG DISUSUN
- IKI JUMLAH SOSIALISASI PEMBEBASAN LAHAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DATA BERKAS NOMINATIF PERSIL LAHAN YANG AKAN DIBEBASKAN
- IKI JUMLAH PEMATOKAN LAHAN YANG DTETAPKAN
- IKI JUMLAH PERSIL LAHAN YANG DIUKUR
- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA

MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR AIR MINUM

- IKK PANJANG JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM YANG DIBANGUN
- IKK JUMLAH DOKUMEN REVISI RISPAM YANG DISUSUN
- IKK JUMLAH KAWASAN YANG DILAKUKAN PEMBANGUNAN DISTRIBUSI AIR MINUM
- IK JUMLAH PENDUDUK YANG TERLAYANI AIR MINUM
- IK JUMLAH SAMBUNGAN RUMAH TERPASANG

2.3.3.1 TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM

- IKI JUMLAH LOKASI USULAN YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PERENCANAAN YANG DIASISTENSI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENGADAAN JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM YANG DIAWASI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA PEMBANGUNAN JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM YANG DISERAHTERIMAKAN

2.3.3.2 TERSUSUNNYA DOKUMEN RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RISPAM)

- IKI PENYIAPAN KAK PENYUSUNAN DOKUMEN RISPAM
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PENYUSUNAN DOKUMEN RISPAM YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PERENCANAAN YANG DIASISTENSI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA PENYUSUNAN DOKUMEN RISPAM YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN RISPAM YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PENYUSUNAN DOKUMEN RISPAM YANG DISERAHTERIMAKAN

MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR JALAN

- IKP 2.2.1 %JALAN KOTA MEMENUHI STANDAR KONSTRUKSI DAN FUNGSI
- IKP 2.2.2 %JALAN YANG MEMILIKI TROTOAR
- IKP 2.2.3 %JALAN YANG DILAYANI PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
- IKP 2.2.4 % KETERSEDIAAN DRAINASE SESUAI KEBUTUHAN
- IKP 2.2.4 % KETERSEDIAAN JALAN KOTA SESUAI KEBUTUHAN
- IKP 2.2.4 % JALAN KOTA YANG MEMILIKI DRAINASE
- IKP 2.2.5 %JALAN LINGKUNGAN SESUAI KEBUTUHAN

MENINGKATNYA PENYEDIAAN JALAN LINGKUNG

- IKK PANJANG JALAN LINGKUNG YANG DIBANGUN
- IKK JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS JALAN LINGKUNG YANG DISUSUN

2.4.1.1 TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNG

- IKI JUMLAH LOKASI USULAN YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PERENCANAAN YANG DIASISTENSI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENGADAAN JALAN LINGKUNG YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN JALAN LINGKUNG YANG DIAWASI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN JALAN LINGKUNG YANG DISERAHTERIMAKAN

MENINGKATNYA PENYEDIAAN JALAN DAN JEMBATAN STATUS KOTA

- IKK JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN YANG DISUSUN
- IKK JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN JEMBATAN YANG DISUSUN
- IKK JUMLAH PERSIL LAHAN YANG DIBEBASKAN UNTUK PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN JALAN
- IKK JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN YANG DISUSUN
- IKK JUMLAH PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN YANG DISUSUN
- IKK JUMLAH PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN
- IKK JUMLAH JEMBATAN BARU YANG DIBANGUN
- IKK PANJANG JALAN BARU YANG DIBANGUN

2.4.2.1 TERLAKSANANYA PENYUSUNAN PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN

- IKI JUMLAH LOKASI USULAN YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PERENCANAAN YANG DIASISTENSI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DISERAHTERIMAKAN

2.4.2.2 TERLAKSANANYA PENYUSUNAN PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN JEMBATAN

- IKI JUMLAH LOKASI USULAN YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PERENCANAAN YANG DIASISTENSI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DISERAHTERIMAKAN

2.4.2.3 TERLAKSANANYA PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN JALAN

- IKI JUMLAH PERSIL LAHAN YANG DISURVEI UNTUK DIBEBASKAN
- IKI JUMLAH DATA NOMINATIF KEPEMILIKAN LAHAN WARGA YANG TERKENA DAMPAK PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN JALAN
- IKI JUMLAH PENDAMPINGAN PENGUKURAN LAHAN YANG AKAN DIBEBASKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN

2.4.2.4 TERLAKSANANYA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN JALAN

- IKI JUMLAH PERSIL LAHAN YANG DISURVEI UNTUK DIBEBASKAN
- IKI JUMLAH DRAFT DOKUMEN PERENCANAAN YANG DISIAPKAN

2.4.2.5 TERLAKSANANYA PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN JALAN

- IKI JUMLAH PENDAMPINGAN PENGUKURAN LAHAN YANG AKAN DIBEBASKAN
- IKI JUMLAH DATA NOMINATIF KEPEMILIKAN LAHAN WARGA YANG TERKENA DAMPAK PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN JALAN

2.4.2.6 TERLAKSANANYA PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH UNTUK PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN JALAN

- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN

2.4.2.7 TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN JEMBATAN

- IKI JUMLAH LOKASI USULAN YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PERENCANAAN YANG DIASISTENSI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENGADAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIAWASI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DISERAHTERIMAKAN

2.4.2.8 TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN JALAN BARU SKALA KOTA

- IKI JUMLAH LOKASI USULAN YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PERENCANAAN YANG DIASISTENSI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENGADAAN PEMBANGUNAN JALAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIAWASI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DISERAHTERIMAKAN

MENINGKATNYA KUALITAS DAN STRUKTUR JALAN

- IKK PANJANG JALAN YANG DITINGKATKAN
- IKK PANJANG BAHU JALAN YANG DITINGKATKAN

2.4.3.1 TERLAKSANANYA PENINGKATAN JALAN SKALA KOTA

- IKI JUMLAH LOKASI USULAN YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PERENCANAAN YANG DIASISTENSI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENGADAAN PENINGKATAN JALAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIAWASI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DISERAHTERIMAKAN

MEMPERTAHANKAN KONDISI JALAN DAN JEMBATAN

- IKK: PANJANG JALAN YANG DIPELIHARA
- IKK: PANJANG JALAN YANG DIREHABILITASI BERKALA
- IKK: JUMLAH JEMBATAN YANG DIPELIHARA

2.4.4.1 TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN JALAN

- IKI JUMLAH LOKASI USULAN YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PERENCANAAN YANG DIASISTENSI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENGADAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIAWASI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DISERAHTERIMAKAN

2.4.4. 3 TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN JEMBATAN

- IKI JUMLAH LOKASI USULAN YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PERENCANAAN YANG DIASISTENSI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENGADAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIAWASI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DISERAHTERIMAKAN

MENINGKATNYA KUALITAS PENERANGAN JALAN UMUM

- IKK JUMLAH PENERANGAN JALAN UMUM YANG DIPELIHARA
- IKK %LAMPU JALAN YANG TERPASANG BERDASARKAN KEBUTUHAN

2.4.5.1 TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

- IKI JUMLAH LOKASI USULAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN PJU YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH PEKERJAAN PEMELIHARAAN PJU YANG DIAWASI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA PEMELIHARAAN PJU YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN PEMELIHARAAN PJU YANG DISIAPKAN

2.4.5.2 TERLAKSANANYA PENAMBAHAN PENERANGAN JALAN UMUM

- IKI JUMLAH LOKASI USULAN PENAMBAHAN PENERANGAN JALAN UMUM YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PENAMBAHAN PENERANGAN JALAN UMUM YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENGADAAN PENAMBAHAN PENERANGAN JALAN UMUM YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PENAMBAHAN PENERANGAN JALAN UMUM YANG DIAWASI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DISERAHTERIMAKAN

MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

- IKP 2.2.6 %PEMENUHAN LAYANAN LABORATORIUM KONSTRUKSI
- IKP 2.2.7 %PEMENUHAN ALAT BERAT BERFUNGSI BAIK
- IKP 2.2.8 % ALAT LABOR DENGAN KONDISI BAIK
- IKK JUMLAH PENGADAAN ALAT LABOR DILAKUKAN
- IKK JUMLAH PENGADAAN ALAT PENGUJIAN DAN BAHAN LABORATORIUM YANG DILAKUKAN
- IKK JUMLAH ALAT LABORATORIUM YANG DIPELIHARA
- IKK JUMLAH ALAT BERAT YANG DIPELIHARA

2.4.6.3 TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN ALAT BERAT

- IKI INVENTISASI KONDISI FISIK ALAT BERAT
- IKI JUMLAH SUKU CADANG YANG DIBUTUHKAN
- IKI JUMLAH SUKU CADANG YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH SUKU CADANG DIGANTI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PERMOHONAN PEMINJAMAN ALAT YANG DITERIMA
- IKI JUMLAH KONTRAK PEMINJAMAN YANG DIBUAT
- IKI JUMLAH PENGARSIPAN BERKAS YANG DILAKUKAN

2.4.6.1 TERLAKSANANYA PENGADAAN ALAT BERAT

- IKI JUMLAH ALAT BERAT YANG DIBUTUHKAN
- IKI JUMLAH PAKET PENGADAAN ALAT BERAT YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENGADAAN ALAT BERAT YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH ALAT BERAT YANG DISERAHTERIMAKAN

2.4.6.4 TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM KONSTRUKSI

- IKI INVENTISASI KONDISI FISIK ALAT LABORATORIUM KONSTRUKSI
- IKI JUMLAH SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN BAHAN PENGUJIAN YANG DIBUTUHKAN
- IKI JUMLAH SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM KONSTRUKSI YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH ALAT LABORATORIUM KONSTRUKSI YANG DIKALIBRASI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PERMOHONAN PEMINJAMAN ALAT YANG DITERIMA
- IKI JUMLAH KONTRAK PEMINJAMAN YANG DIBUAT
- IKI JUMLAH PENGARSIPAN BERKAS YANG DILAKUKAN

2.4.6.2 TERLAKSANANYA PENGADAAN ALAT LABORATORIUM KONSTRUKSI

- IKI JUMLAH ALAT LABORATORIUM KONSTRUKSI YANG DIBUTUHKAN
- IKI JUMLAH PAKET PENGADAAN ALAT LABORATORIUM KONSTRUKSI YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENGADAAN ALAT LABORATORIUM KONSTRUKSI YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH ALAT LABORATORIUM KONSTRUKSI YANG DISERAHTERIMAKAN

2.4.6.2 TERLAKSANANYA PENGUJIAN LABORATORIUM KONSTRUKSI

- IKI JUMLAH PERMOHONAN PENGUJIAN YANG DITERIMA
- IKI JUMLAH PERMOHONAN YANG DITINDAKLANJUTI
- IKI JUMLAH SAMPEL BETON YANG DIAMBIL
- IKI JUMLAH SAMPEL BETON YANG DIUJI
- IKI JUMLAH SAMPEL BETON YANG DIRAWAT
- IKI JUMLAH HASIL PENGUJIAN BETON YANG DILAPORKAN
- IKI JUMLAH HASIL UJI BETON YANG DIBUAT
- IKI JUMLAH SAMPEL TANAH YANG DIAMBIL
- IKI JUMLAH SAMPEL TANAH YANG DIUJI
- IKI JUMLAH SAMPEL TANAH YANG DIRAWAT
- IKI JUMLAH HASIL PENGUJIAN TANAH YANG DILAPORKAN
- IKI JUMLAH HASIL UJI TANAH YANG DIBUAT
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN

MENINGKATNYA JALAN YANG MEMILIKI DRAINASE

- IKK PANJANG DRAINASE YANG DIPELIHARA
- IKK PANJANG DRAINASE YANG DIBANGUN
- IKK JUMLAH DOKUMEN TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRAINASE YANG DISUSUN

2.4.7.1 TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN DRAINASE

- IKI JUMLAH LOKASI USULAN YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PERENCANAAN YANG DIASISTENSI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PERENCANAAN YANG DIASISTENSI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENGADAAN JALAN LINGKUNG YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN JALAN LINGKUNG YANG DIAWASI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DISERAHTERIMAKAN

2.4.7.2 TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN DRAINASE

- IKI JUMLAH USULAN LOKASI PEMELIHARAAN DRAINASE YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH LOKASI PEMELIHARAAN DRAINASE YANG DIRENCANAKAN
- IKI JUMLAH LOKASI PEMELIHARAAN DRAINASE YANG DILAKSANAKAN
- IKI JUMLAH LOKASI PEMELIHARAAN DRAINASE YANG DIAWASI
- IKI JUMLAH LAPORAN PEMELIHARAAN DRAINASE YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH ADMINISTRASI PAKET PEMELIHARAAN DRAINASE YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PEMELIHARAAN DRAINASE YANG DISERAHTERIMAKAN

MENINGKATNYA PRASARANA UNTUK PEJALAN KAKI

- IKK PANJANG TROTOAR YANG DIBANGUN
- IKK PANJANG TROTOAR YANG DIPELIHARA

2.4.8.1 TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN TROTOAR

- IKI JUMLAH LOKASI USULAN PEMBANGUNAN TROTOAR YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN TROTOAR YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TROTOAR YANG DIASISTENSI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENGADAAN PEMBANGUNAN TROTOAR YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN TROTOAR YANG DIAWASI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN TROTOAR YANG DISERAHTERIMAKAN

2.4.8.2 TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN TROTOAR

- IKI JUMLAH LOKASI USULAN PEMELIHARAAN TROTOAR YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PEMELIHARAAN TROTOAR YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PERENCANAAN PEMELIHARAAN TROTOAR YANG DIASISTENSI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENGADAAN PEMELIHARAAN TROTOAR YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PEMELIHARAAN TROTOAR YANG DIAWASI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PEMELIHARAAN TROTOAR YANG DISERAHTERIMAKAN

MENINGKATNYA PENYEDIAAN DAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

- IKP 2.3.2 %BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH YANG REPRESENTATIF
- IKP 2.3.2 %BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH YANG MEMILIKI SLF
- IKP 2.3.3 %BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG MEMENUHI KUALIFIKASI
- IKP 2.3.1 %PENYEDIAAN SARANA PERKANTORAN TERTENTU YANG REPRESENTATIF

MENINGKATNYA PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA IBADAH DAN PERKANTORAN

- IKK %PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA IBADAH SKALA KOTA
- IKK JUMLAH SARANA DAN PRASARANA GEDUNG SKALA KOTA YANG DIBANGUN
- IKK LUAS LAHAN YANG DIBEBASKAN UNTUK PEMBANGUNAN SARANA IBADAH SKALA KOTA

2.5.1.3 TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA IBADAH SKALA KOTA

- IKI JUMLAH SURVEY LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN SARANA IBADAH SKALA KOTA
- IKI JUMLAH SOSIALISASI PERENCANAAN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN SARANA IBADAH SKALA KOTA
- IKI JUMLAH DOKUMEN JASA KONSULTAN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN SARANA IBADAH SKALA KOTA
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENGADAAN PEMBANGUNAN SARANA IBADAH SKALA KOTA
- IKI JUMLAH PERSIL PENGUKURAN PENGADAAN TANAH YANG DIDAMPINGI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA GANTI WAJAR YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DISERAHTERIMAKAN
- IKI JUMLAH ASISTENSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA IBADAH SKALA KOTA
- IKI JUMLAH LAPORAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN SARANA IBADAH SKALA KOTA YANG DIVALIDASI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA PEMBANGUNAN SARANA IBADAH SKALA KOTA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA IBADAH SKALA KOTA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN PEMBANGUNAN SARANA IBADAH SKALA KOTA YANG DISERAHTERIMAKAN

2.5.1.2 TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG SKALA KOTA

- IKI JUMLAH SURVEY LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN GEDUNG SKALA KOTA
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN PERENCANAAN YANG DIASISTENSI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENGADAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SKALA KOTA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH LAPORAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN SARANA IBADAH SKALA KOTA YANG DIVALIDASI
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA PEMBANGUNAN GEDUNG SKALA KOTA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DISERAHTERIMAKAN

MENINGKATNYA PENATAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG

- IKK 2.5.2.1 JUMLAH PERTIMBANGAN TEKNIS PERENCANAAN BANGUNAN YANG DIKELUARKAN (LEGES GAMBAR)
- IKK: 2.5.2.2 JUMLAH DOKUMEN HSBGN YANG DITERBITKAN
- IKK: 2.5.2.3 JUMLAH REKOMENDASI PERENCANAAN BANGUNAN GEDUNG YANG DIKELUARKAN TABG

2.5.2.2 TERLAKSANANYA PENERBITAN DOKUMEN HSBGN

- IKI JUMLAH TOKO/KUARI YANG DISURVEI
- IKI JUMLAH DOKUMEN HASIL SURVEI YANG DIENTRI
- IKI JUMLAH PENYIAPAN RAPAT ANALISIS HASIL SURVEI
- IKI JUMLAH RANCANGAN DOKUMEN HSBGN YANG DIBUAT
- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN

2.5.2.1 TERLAKSANANYA PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERENCANAAN BANGUNAN

- IKI JUMLAH BERKAS PERMOHONAN YANG DITERIMA
- IKI JUMLAH BERKAS PERMOHONAN YANG DIVERIFIKASI
- IKI JUMLAH PENYIAPAN RAPAT TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH REKOMENDASI HASIL RAPAT TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG YANG DITERBITKAN
- IKI JUMLAH BERKAS PERTIMBANGAN TEKNIS PERENCANAAN BANGUNAN YANG DISERAHKAN
- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN

MENINGKATNYA BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG MEMILIKI KUALIFIKASI SESUAI STANDAR

- IKK JUMLAH IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) YANG DITERBITKAN
- IKK JUMLAH SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANGAN DAN JASA KONSTRUKSI YANG DILAKSANAKAN
- IKK JUMLAH MONITORING DAN EVALUASI BADAN USAHA
- IKK JUMLAH TENAGA KONSTRUKSI YANG DIBINA
- IKK JUMLAH DOKUMEN PROFIL JASA KONSTRUKSI YANG DISUSUN
- IKK JUMLAH SOSIALISASI JASA KONSTRUKSI PADA SKPD YANG DILAKUKAN
- IKK JUMLAH PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI PADA BADAN USAHA

2.5.3.1 TERLAKSANANYA IZIN USAHA KONSTRUKSI (IUJK) YANG DIKELUARKAN

- IKI JUMLAH BERKAS PERMOHONAN IUJK YANG DITERIMA
- IKI JUMLAH BERKAS PERMOHONAN YANG DIVERIFIKASI
- IKI JUMLAH LOKASI YANG DISURVEY
- IKI JUMLAH REKOMENDASI IUJK YANG DIKETIK
- IKI JUMLAH REKOMENDASI YANG DIAJUKAN KE ATASAN
- IKI JUMLAH REKOMENDASI YANG DIARSIPKAN

2.5.3.2 TERLAKSANANYA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANGAN DAN JASA KONSTRUKSI

- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN YANG DIARSIPKAN

2.5.3.7 TERLAKSANANYA PEMBINAAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DATA BADAN USAHA YANG DI ENTRY
- IKI JUMLAH DOKUMEN YANG DIARSIPKAN

2.5.3.4 TERLAKSANANYA PEMBINAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI

- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN YANG DIARSIPKAN
- IKI JUMLAH PENGARSIPAN DATA TENAGA KERJA YANG TELAH BERSERTIFIKAT

2.5.3.5 TERLAKSANANYA PENYUSUNAN BUKU PROFIL JASA KONSTRUKSI

- IKI JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH DOKUMEN PENCAIRAN DANA YANG DISIAPKAN
- IKI JUMLAH PENYIAPAN RAPAT TIM PENYUSUNAN BUKU PROFIL JASA KONSTRUKSI
- IKI JUMLAH DATA YANG DIKUMPULKAN
- IKI JUMLAH RANCANGAN DOKUMEN PROFIL JASA KONSTRUKSI YANG DIBUAT

SASARAN PELAKSANA (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- (kl) JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISAPKAN
- (kl) JUMLAH PENDAMPINGAN PSA/GPSA YANG DILAKSANAKAN
- (kl) JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISAPKAN
- (kl) JUMLAH DOKUMEN YANG DSARSIPKAN

- (kl) JUMLAH PERSIL GANTI WAJAR TANAH YANG DISURVEI
- (kl) JUMLAH HASIL PENILAIAN GANTI WAJAR TANAH YANG DIASISTENSI
- (kl) JUMLAH DOKUMEN GANTI WAJAR TANAH DISERAHTERIMAKAN
- (kl) JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISAPKAN

2.3.2.7 TERLAKSANAKNYA PEMELIHARAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

- (kl) JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISAPKAN
- (kl) JUMLAH LOKASI USULAN YANG DISURVEI
- (kl) JUMLAH DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) PAKET PERENCANAAN YANG DISAPKAN
- (kl) JUMLAH DOKUMEN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) YANG DISAPKAN
- (kl) JUMLAH PEMELIHARAAN DAS YANG DILAKSANAKAN
- (kl) JUMLAH PAKET PEMELIHARAAN DAS YANG DIAWASI
- (kl) JUMLAH PAKET PEMELIHARAAN DAS YANG DISERAHTERIMAKAN
- (kl) JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISAPKAN
- (kl) JUMLAH DOKUMEN YANG DSARSIPKAN

2.3.2.8 TERLAKSANAKNYA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK NORMALISASI SUNGAI

- (kl) JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISAPKAN
- (kl) JUMLAH PAKET PERENCANAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- (kl) JUMLAH LOKASI PERENCANAAN YANG DISURVEI
- (kl) JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIASISTENSI
- (kl) JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DISERAHTERIMAKAN
- (kl) JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISAPKAN
- (kl) JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DSARSIPKAN

2.3.2.9 TERLAKSANAKNYA PERSIAPAN/ SOSIALISASI DAN PENILAIAN WAJAR PENGADAAN TANAH UNTUK NORMALISASI SUNGAI

- (kl) JUMLAH SOSIALISASI PEMBEBASAN LAHAN YANG DISAPKAN
- (kl) JUMLAH DATA BERKAS NOMINATIF PERSIL LAHAN YANG AKAN DIBEBASKAN
- (kl) JUMLAH PENATOKAN LAHAN YANG DITETAPKAN
- (kl) JUMLAH PERSIL LAHAN YANG DIUKUR
- (kl) JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISAPKAN
- (kl) JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- (kl) JUMLAH PERSIL GANTI WAJAR TANAH YANG DISURVEI
- (kl) JUMLAH HASIL PENILAIAN GANTI WAJAR TANAH YANG DIASISTENSI
- (kl) JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISAPKAN

2.3.2.11 TERLAKSANAKNYA PENYUSUNAN DOKUMEN PEMBANGUNAN EMBUNG

- (kl) JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISAPKAN
- (kl) JUMLAH PAKET PERENCANAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- (kl) JUMLAH LOKASI PERENCANAAN YANG DISURVEI
- (kl) JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIASISTENSI
- (kl) JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DISERAHTERIMAKAN
- (kl) JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISAPKAN
- (kl) JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DSARSIPKAN

2.3.2.12 TERLAKSANAKNYA PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN EMBUNG

- (kl) JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISAPKAN
- (kl) JUMLAH PAKET PERENCANAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- (kl) JUMLAH LOKASI PERENCANAAN YANG DISURVEI
- (kl) JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIASISTENSI
- (kl) JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DISERAHTERIMAKAN
- (kl) JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISAPKAN
- (kl) JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DSARSIPKAN

2.3.2.13 TERLAKSANAKNYA PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN EMBUNG

- (kl) JUMLAH SOSIALISASI PEMBEBASAN LAHAN YANG DISAPKAN
- (kl) JUMLAH DATA BERKAS NOMINATIF PERSIL LAHAN YANG AKAN DIBEBASKAN
- (kl) JUMLAH PENATOKAN LAHAN YANG DITETAPKAN
- (kl) JUMLAH PERSIL LAHAN YANG DIUKUR
- (kl) JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISAPKAN
- (kl) JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- (kl) JUMLAH PERSIL GANTI WAJAR TANAH YANG DISURVEI
- (kl) JUMLAH HASIL PENILAIAN GANTI WAJAR TANAH YANG DIASISTENSI
- (kl) JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISAPKAN

2.3.2.14 TERLAKSANAKNYA PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN EMBUNG

- (kl) JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH YANG DISUSUN
- (kl) JUMLAH SOSIALISASI PEMBEBASAN LAHAN YANG DISAPKAN
- (kl) JUMLAH DATA BERKAS NOMINATIF PERSIL LAHAN YANG AKAN DIBEBASKAN
- (kl) JUMLAH PENATOKAN LAHAN YANG DITETAPKAN
- (kl) JUMLAH PERSIL LAHAN YANG DIUKUR
- (kl) JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISAPKAN
- (kl) JUMLAH PAKET PEKERJAAN YANG DIPROSES PEMILIHAN PENYEDIA
- (kl) JUMLAH PERSIL GANTI WAJAR TANAH YANG DISURVEI
- (kl) JUMLAH HASIL PENILAIAN GANTI WAJAR TANAH YANG DIASISTENSI
- (kl) JUMLAH DOKUMEN GANTI WAJAR TANAH DISERAHTERIMAKAN
- (kl) JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISAPKAN

2.3.2.15 TERLAKSANAKNYA PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN EMBUNG

- (kl) JUMLAH DOKUMEN GANTI WAJAR TANAH DISERAHTERIMAKAN
- (kl) JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISAPKAN

2.3.2.16 TERLAKSANAKNYA PEMELIHARAAN BANTARAN SUNGAI DAN TANGGUL

- (kl) JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DISAPKAN
- (kl) JUMLAH LOKASI USULAN YANG DISURVEI
- (kl) JUMLAH DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) PAKET PERENCANAAN YANG DISAPKAN
- (kl) JUMLAH DOKUMEN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) YANG DISAPKAN
- (kl) JUMLAH PEMELIHARAAN BANTARAN SUNGAI DAN TANGGUL YANG DILAKSANAKAN
- (kl) JUMLAH PAKET PEMELIHARAAN BANTARAN SUNGAI DAN TANGGUL YANG DISAWASI

Payakumbuh, September 2019
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST.M.Si
NIP. 19750402 200003 1 005

(k)		JUMLAH PAKET PEMELIHARAAN BANTARAN SUNGAI DAN TANGGUL YANG DISEMPURNAKAN
(k)		JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DISIAPKAN
(k)		JUMLAH DOKUMEN YANG DIARSIPKAN

CASCADING KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 -2022

SASARAN STRATEGIS 3

SASARAN STRATEGIS ESELON II/

SASARAN ESELON III/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SASARAN ESELON IV/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DINAS

IKU: 3.1 PREDIKAT NILAI EVALUASI AKIP DINAS

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN DAN KINERJA DINAS

- IKP 3.1.3 %KONDISI SARANA PRASARANA PERKANTORAN DALAM KONDISI BAIK
- IKP 3.1.2 %ASN YANG MENDUDUKI JABATAN SESUAI KOMPETENSI
- IKP 3.1.4 %ASN BERPAKAIAN DINAS DENGAN ATRIBUT LENGKAP
- IKP 3.1.7 NILAI EVALUASI AKIP
- IKP 3.1.1 IKM DINAS
- IK 3.1.6 INDEKS RB SKPD (PMP-RB)
- IK 3.1.9 %CAPAIAN KINERJA REALISASI PROGRAM/ KEGIATAN
- IK 3.1.10 %CAPAIAN KINERJA KEPEGAWAIAN
- IK 3.1.8 %ASN BERPERILAKU DISIPLIN
- IK 3.1.5 %ASET PEMDA KEWENANGAN DINAS DENGAN KONDISI BAIK

MENINGKATNYA KUALITAS DOKUMENTASI DAN PELAPORAN DINAS

- IKK 3.1.1.1 JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA YANG DISUSUN
- IKK 3.1.1.2 JUMLAH PROFIL DINAS YANG DISUSUN
- IKK 3.1.1.3 JUMLAH CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KERJA SKPD YANG DISEBARLUASKAN DAN DIPUBLIKASIKAN
- IKK 3.1.1.4 JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN DAN DOKUMEN PELAYANAN PUBLIK YANG DISUSUN
- IKK 3.1.1.5 JUMLAH LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI YANG DISUSUN

MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN URUSAN KEDINASAN

- IK 3.1.2.1 %SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN RENJAYANG SELARAS DENGAN RENSTRA
- IK 3.1.2.2 %SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN RENJA PD YANG SELARAS DENGAN RKPD
- IK 3.1.2.3 %CAPAIAN KINERJA REALISASI PENERIMAAN DAERAH SKPD
- IK 3.1.2.4 %CAPAIAN KINERJA REALISASI KEUANGAN

MENINGKATNYA KAPASITAS SUMBER DAYA DINAS

- IK 3.1.3.1 %ASN YANG MENGIKUTI BIMTEK SESUAI KOMPETENSI
- IK 3.1.3.2 %ASN YANG TERLAMBAT MELEBIHI ATURAN KEPEGAWAIAN
- IK 3.1.3.3 %ASET PEMDA KEWENANGAN DINAS YANG TIDAK TERMANFAATKAN
- IKK 3.1.3.4 %SDM APARATUR YANG DIBERIKAN BIMBINGAN TEKNIS

MENINGKATNYA OPERASIONAL DINAS

- IKK 3.1.4.1 JUMLAH REKENING LISTRIK, TELEPON DAN AIR YANG DIBAYARKAN
- IKK 3.1.4.2 JUMLAH PAJAK KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL YANG DIBAYARKAN
- IKK 3.1.4.3 JUMLAH JASA ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DIBAYARKAN
- IKK 3.1.4.4 JUMLAH JASA TENAGA KEBERSIHAN YANG DIBAYARKAN
- IKK 3.1.4.5 JUMLAH BAHAN KEBERSIHAN KANTOR YANG DISEDIAKAN
- IKK 3.1.4.6 JUMLAH PERALATAN KERJA YANG DIPERBAIKI
- IKK 3.1.4.22 JUMLAH ALAT TULIS KANTOR YANG DISEDIAKAN
- IKK 3.1.4.8 JUMLAH FOTOCOPY, CETAK DAN JILID DOKUMEN DINAS YANG DISEDIAKAN
- IKK 3.1.4.9 JUMLAH KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN
- IKK 3.1.4.41 JUMLAH PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN
- IKK 3.1.4.41 JUMLAH BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISEDIAKAN
- IKK 3.1.4.41 JUMLAH MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISEDIAKAN
- IKK 3.1.4.43 JUMLAH RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH, LUAR DAERAH DAN LUAR NEGERI YANG DILAKUKAN
- IKK 3.1.4.44 JUMLAH JASA TENAGA ADMINITRASI DAN TENAGA TEKNIS PERKANTORAN YANG DIBAYARKAN
- IKK 3.1.4.41 JUMLAH PENGADAAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL YANG DILAKUKAN
- IKK 3.1.4.41 JUMLAH PENGADAAN MEBELEUR YANG DILAKUKAN
- IKK 3.1.4.41 JUMLAH SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR SKALA KOTA YANG DIPELIHARA
- IKK 3.1.4.41 JUMLAH KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL YANG DIPELIHARA
- IKK 3.1.4.42 JUMLAH MEUBELEUR YANG DIPELIHARA
- IKK 3.1.4.42 JUMLAH PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA YANG DILAKUKAN
- IKK 3.1.4.42 JUMLAH PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA YANG DILAKUKAN
- IKK 3.1.4.42 JUMLAH DIKLAT DAN PELATIHAN FORMAL YANG DIIKUTI

- 3.1.1.1 TERLAKSANANYA PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA, IKHTISAR REALISASI KINERJA, DAN PROFIL DINAS
  - IKI 3.1.1.1 JUMLAH DATA TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN LKPJ YANG DIKUMPULKAN
  - IKI 3.1.1.2 JUMLAH DATA TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN LKPJ YANG DIANALISIS
  - IKI 3.1.1.3 JUMLAH RANCANGAN DOKUMEN LKPJ YANG DIBUAT
  - IKI 3.1.1.4 JUMLAH DATA TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN LKJIP YANG DIKUMPULKAN
  - IKI 3.1.1.15 JUMLAH DATA TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN LKJIP YANG DIANALISIS
  - IKI 3.1.1.6 JUMLAH RANCANGAN DOKUMEN LKJIP YANG DIBUAT
  - IKI 3.1.1.17 JUMLAH KUESIONER SKM YANG DIDISTRIBUSIKAN
  - IKI 3.1.1.18 JUMLAH KUESIONER SKM YANG DIINPUTKAN
  - IKI 3.1.1.9 JUMLAH DATA TEKNIS DOKUMEN SKM YANG DIANALISIS
  - IKI 3.1.1.10 JUMLAH RANCANGAN DOKUMEN SKM YANG DIBUAT

- 3.1.2.4 TERLAKSANANYA PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN SKPD
  - IKI 3.1.2.41 JUMLAH DOKUMEN BELANJA LS (LUMSUMP) YANG DIVERIFIKASI
  - IKI 3.1.2.42 JUMLAH DOKUMEN BELANJA NON LS (LUMSUMP) YANG DIVERIFIKASI
  - IKI 3.1.2.43 JUMLAH DOKUMEN BELANJA BARANG DAN JASA YANG DIVALIDASI DENGAN DOKUMEN ANGGARAN
  - IKI 3.1.2.44 JUMLAH PENGADMINISTRASIAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
  - IKI 3.1.2.45 JUMLAH DOKUMEN KENAIKAN GAJI BERKALA YANG DISIAPKAN
  - IKI 3.1.2.46 JUMLAH DOKUMEN SPM YANG DISIAPKAN
  - IKI 3.1.2.47 JUMLAH DOKUMEN SPJ YANG DIINPUTKAN KEDALAM SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD)
  - IKI 3.1.2.48 JUMLAH SPM YANG DIVERIFIKASI
  - IKI 3.1.2.49 JUMLAH RANCANGAN LAPORAN KEUANGAN YANG DIBUAT
  - IKI 3.1.2.410 JUMLAH KWITANSI SPJ YANG DIBAYARKAN

- 3.1.3.1 TERLAKSANANYA ADMINISTRASI PENGIRIMAN ASN MENGIKUTI BIMTEK SESUAI KOMPETENSI
  - IKI 3.1.3.1.1 JUMLAH DATA ASN YANG BERMINAT MENGIKUTI BIMTEK SESUAI KOMPETENSI
  - IKI 3.1.3.1.2 JUMLAH PENGUSULAN ASN YANG BERMINAT MENGIKUTI BIMTEK SESUAI KOMPETENSI
  - IKI 3.1.3.1.3 JUMLAH DOKUMEN KELENGKAPAN ASN YANG MENGIKUTI BIMTEK SESUAI KOMPETENSI

- 3.1.3.3 TERLAKSANANYA INVENTARISASI ASET PEMDA KEWENANGAN SKPD
  - IKI 3.1.3.3.1 JUMLAH PENDATAAN DAN INVENTARISASI ASET PEMDA KEWENANGAN SKPD
  - IKI 3.1.3.3.2 JUMLAH PELABELAN ASET PEMDA KEWENANGAN SKPD
  - IKI 3.1.3.3.3 JUMLAH LAPORAN RENCANA KEBUTUHAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
  - IKI 3.1.3.3.4 JUMLAH ASET PEMDA KEWENANGAN SKPD YANG DIUSULKAN UNTUK DIHAPUS
  - IKI 3.1.3.3.5 JUMLAH PENGINPUTAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH KE APLIKASI ASET DAERAH

- 3.1.4.1-22 TERLAKSANANYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
  - IKI 3.1.4.22.1 JUMLAH ADMINISTRASI PEMBAYARAN REKENING LISTRIK, TELEPON DAN AIR
  - IKI 3.1.4.22.2 JUMLAH ADMINISTRASI PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN DINAS
  - IKI 3.1.4.22.3 JUMLAH ADMINISTRASI PEMBAYARAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
  - IKI 3.1.4.22.4 JUMLAH ADMINISTRASI PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN
  - IKI 3.1.4.22.5 JUMLAH ADMINISTRASI PENGADAAN ALAT DAN BAHAN KEBERSIHAN
  - IKI 3.1.4.22.6 JUMLAH ADMINISTRASI PEMBAYARAN PERBAIKAN PERALATAN KERJA
  - IKI 3.1.4.22.7 JUMLAH ADMINISTRASI PEMBAYARAN JASA PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN DOKUMEN DINAS SERTA PENGADAAN BARANG CETAK DINAS
  - IKI 3.1.4.22.8 JUMLAH ADMINISTRASI PENGADAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
  - IKI 3.1.4.22.9 JUMLAH ADMINISTRASI PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
  - IKI 3.1.4.22.10 JUMLAH ADMINISTRASI PENGADAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

IKA/ INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

IKI	3.1.1.1.1	JUMLAH DATA TEKNIS SPM YANG DIKUMPULKAN
IKI	3.1.1.1.2	JUMLAH DATA TEKNIS SPM YANG DIANALISIS
IKI	3.1.1.1.3	JUMLAH RANCANGAN DOKUMEN SPM YANG DIBUAT
IKI	3.1.1.1.4	JUMLAH BERKAS KELENGKAPAN SAKIP YANG DIBUAT
IKI	3.1.1.1.5	JUMLAH BERKAS KELENGKAPAN SAKIP YANG DIANALISIS
IKI	3.1.1.1.6	JUMLAH BERKAS KELENGKAPAN SAKIP YANG DIUSULKAN
IKI	3.1.1.1.7	JUMLAH BERKAS KELENGKAPAN EKPPD YANG DIKUMPULKAN
IKI	3.1.1.1.8	JUMLAH BERKAS KELENGKAPAN EKPPD YANG DIANALISIS
IKI	3.1.1.1.9	JUMLAH BERKAS KELENGKAPAN EKPPD YANG DIUSULKAN
IKI	3.1.1.1.20	JUMLAH BERKAS KELENGKAPAN PERJANJIAN KINERJA YANG DIKUMPULKAN
IKI	3.1.1.1.21	JUMLAH BERKAS KELENGKAPAN PERJANJIAN KINERJA YANG DIANALISIS
IKI	3.1.1.1.22	JUMLAH BERKAS KELENGKAPAN PERJANJIAN KINERJA YANG DIUSULKAN
IKI	3.1.1.1.23	JUMLAH BERKAS KELENGKAPAN PAKTA INTEGRITAS YANG DIKUMPULKAN
IKI	3.1.1.1.24	JUMLAH BERKAS KELENGKAPAN PAKTA INTEGRITAS YANG DIANALISIS
IKI	3.1.1.1.25	JUMLAH BERKAS KELENGKAPAN PAKTA INTEGRITAS YANG DIUSULKAN
IKI	3.1.1.1.26	JUMLAH BERKAS KELENGKAPAN PMPRB YANG DIKUMPULKAN
IKI	3.1.1.1.27	JUMLAH BERKAS KELENGKAPAN PMPRB YANG DIANALISIS
IKI	3.1.1.1.28	JUMLAH BERKAS KELENGKAPAN PMPRB YANG DIUSULKAN
IKI	3.1.1.1.29	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN YANG DIUSULKAN
IKI	3.1.1.1.30	JUMLAH LAPORAN AKHIR KEGIATAN YANG DIKUMPULKAN
IKI	3.1.1.1.31	JUMLAH LAPORAN AKHIR KEGIATAN YANG DIANALISIS
IKI	3.1.1.1.32	JUMLAH RANCANGAN LAPORAN AKHIR TAHUN YANG DIUSULKAN
IKI	3.1.1.1.33	JUMLAH DATA TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PROFIL SKPD YANG DIKUMPULKAN
IKI	3.1.1.1.34	JUMLAH DATA TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PROFIL SKPD YANG DIANALISIS
IKI	3.1.1.1.35	JUMLAH RANCANGAN DOKUMEN PROFIL SKPD YANG DIBUAT
IKI	3.1.1.1.36	JUMLAH LAPORAN DATA DAN INFORMASI YANG DIKUMPULKAN
IKI	3.1.1.1.37	JUMLAH LAPORAN AKHIR KEGIATAN YANG DIANALISIS
IKI	3.1.1.1.38	JUMLAH LAPORAN DATA DAN INFORMASI YANG DIBUAT
IKI	3.1.1.1.39	JUMLAH ADMINISTRASI KEGIATAN YANG DIBUAT
IKI	3.1.1.1.40	JUMLAH ADMINISTRASI KEUANGAN KEGIATAN YANG DIBUAT

3.1.1.4 TERLAKSANANYA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK

IKI	3.1.1.4.1	JUMLAH DATA TEKNIS RENCANA KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN USULAN MUSRENBANG YANG DISUSUN
IKI	3.1.1.4.2	JUMLAH DATA TEKNIS RENCANA KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN USULAN MUSRENBANG YANG DIANALISIS
IKI	3.1.1.4.3	JUMLAH DATA TEKNIS RENCANA KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN USULAN POKIR YANG DISUSUN
IKI	3.1.1.4.4	JUMLAH DATA TEKNIS RENCANA KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN USULAN POKIR YANG DIANALISIS

IKI	3.1.2.4.11	JUMLAH KWITANSI SPJ DAN SP2D YANG DIBUKUKAN
IKI	3.1.2.4.12	JUMLAH SP2D YANG DICAIRKAN
IKI	3.1.2.4.13	JUMLAH BILYET GIRO YANG DITANDATANGANI

3.1.2.3 TERLAKSANANYA PENGADMINISTRASIAN PENERIMAAN DAERAH

IKI	3.1.2.3.1	JUMLAH PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH KE KAS DAERAH
IKI	3.1.2.3.2	JUMLAH DOKUMEN PENERIMAAN DAERAH YANG DITERIMA DARI DPMPTSP
IKI	3.1.2.3.3	JUMLAH LAPORAN PENERIMAAN DAERAH YANG DIINPUT KE DALAM SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD)
IKI	3.1.2.3.4	JUMLAH BUKTI SETORAN DAERAH YANG DIBUKUKAN
IKI	3.1.2.3.5	JUMLAH LAPORAN PENERIMAAN DAERAH YANG DISAMPAIKAN KE ATASAN DAN LINTAS OPD

IKI	3.1.3.3.6	JUMLAH RANCANGAN KARTU INVENTARIS BARANG DAN KARTU INVENTARIS INDUK YANG DISIAPKAN

IKI	3.1.4.1.22.11	JUMLAH ADMINISTRASI PEMBAYARAN MAKANAN DAN MINUMAN
IKI	3.1.4.1.20.12	JUMLAH ADMINISTRASI PEMBAYARAN PELAKSANAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DALAM DAERAH, LUAR DAERAH DAN LUAR NEGERI
IKI	3.1.4.1.22.13	JUMLAH ADMINISTRASI PEMBAYARAN JASA TENAGA ADMINISTRASI DAN TENAGA TEKNIS PERKANTORAN
IKI	3.1.4.1.22.14	JUMLAH ADMINISTRASI PENGADAAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL
IKI	3.1.4.1.22.15	JUMLAH ADMINISTRASI PENGADAAN MEUBELEUR
IKI	3.1.4.1.22.16	JUMLAH ADMINISTRASI PEMBAYARAN JASA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR
IKI	3.1.4.1.22.17	JUMLAH ADMINISTRASI PEMBAYARAN JASA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR
IKI	3.1.4.1.22.18	JUMLAH ADMINISTRASI PEMBAYARAN JASA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR
IKI	3.1.4.1.22.19	JUMLAH ADMINISTRASI PEMBAYARAN JASA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL
IKI	3.1.4.1.22.20	JUMLAH ADMINISTRASI PEMBAYARAN JASA PEMELIHARAAN MEUBELEUR
IKI	3.1.4.1.22.21	JUMLAH ADMINISTRASI PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
IKI	3.1.4.1.22.22	JUMLAH ADMINISTRASI PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN KELENGKAPANNYA
IKI	3.1.4.1.22.23	JUMLAH ADMINISTRASI PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR

SASARAN PELAKSANA

IKI	3.1.1.45	JUMLAH DATA TEKNIS RENCANA KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN USULAN PRIORITAS DAERAH YANG DISUSUN
IKI	3.1.1.46	JUMLAH DATA TEKNIS RENCANA KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN USULAN PRIORITAS DAERAH YANG DIANALISIS
IKI	3.1.1.47	JUMLAH DATA TEKNIS RENCANA KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN USULAN PRIORITAS DINAS YANG DISUSUN
IKI	3.1.1.48	JUMLAH DATA TEKNIS RENCANA KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN USULAN PRIORITAS DINAS YANG DIANALISIS
IKI	3.1.1.49	JUMLAH RESUME RENCANA KERJA DINAS YANG DIBUAT
IKI	3.1.1.410	JUMLAH RANCANGAN RKA DINAS YANG DIKUMPULKAN
IKI	3.1.1.411	JUMLAH RANCANGAN RKA DINAS YANG DIANALISIS
IKI	3.1.1.412	JUMLAH RANCANGAN RENCANA KERJA YANG DIBUAT
IKI	3.1.1.413	JUMLAH RANCANGAN DPA DINAS YANG DIKUMPULKAN
IKI	3.1.1.414	JUMLAH RANCANGAN DPA DINAS YANG DIANALISIS
IKI	3.1.1.415	JUMLAH RANCANGAN DPA DINAS YANG DIUSULKAN
IKI	3.1.1.416	JUMLAH DATA USULAN PERUBAHAN ANGGARAN YANG DIKUMPULKAN
IKI	3.1.1.417	JUMLAH RESUME RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS YANG DIBUAT
IKI	3.1.1.418	JUMLAH RANCANGAN RKA PERUBAHAN DINAS YANG DIBUAT
IKI	3.1.1.419	JUMLAH RANCANGAN RKA PERUBAHAN DINAS YANG DIANALISIS
IKI	3.1.1.420	JUMLAH RANCANGAN DPA RENJA PERUBAHAN DINAS YANG DIUSULKAN
IKI	3.1.1.421	JUMLAH RANCANGAN DPA RENJA PERUBAHAN DINAS YANG DIANALISIS
IKI	3.1.1.422	JUMLAH RANCANGAN RENCANA KERJA PERUBAHAN YANG DIBUAT
IKI	3.1.1.423	JUMLAH RANCANGAN RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS YANG DIANALISIS
IKI	3.1.1.424	JUMLAH RANCANGAN RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS YANG DIUSULKAN
IKI	3.1.1.425	JUMLAH RANCANGAN DPA RENJA PERUBAHAN DINAS YANG DIUSULKAN
IKI	3.1.1.426	JUMLAH DATA TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN SOP YANG DIKUMPULKAN
IKI	3.1.1.427	JUMLAH DATA TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN SOP YANG DIANALISIS
IKI	3.1.1.428	JUMLAH RANCANGAN DOKUMEN SOP YANG DIBUAT
IKI	3.1.1.429	JUMLAH DATA TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN SPP YANG DIKUMPULKAN
IKI	3.1.1.430	JUMLAH DATA TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN SPP YANG DIANALISIS
IKI	3.1.1.431	JUMLAH RANCANGAN RANCANGAN SPP YANG DIBUAT
IKI	3.1.1.432	JUMLAH DATA TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN SPIP YANG DIKUMPULKAN
IKI	3.1.1.433	JUMLAH DATA TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN SPIP YANG DIANALISIS
IKI	3.1.1.434	JUMLAH RANCANGAN DOKUMEN SPIP YANG DIBUAT
IKI	3.1.1.435	JUMLAH DATA TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI STRATEGIS RB YANG DIKUMPULKAN
IKI	3.1.1.436	JUMLAH DATA TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI STRATEGIS RB YANG DIANALISIS
IKI	3.1.1.437	JUMLAH DOKUMEN RENCANA AKSI STRATEGIS RB YANG BUAT

3.1.1.3 TERLAKSANANYA PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KERJA DINAS		
IKI	3.1.1.31	JUMLAH PUBLIKASI MEDIA SOSIAL YANG DIBUAT
IKI	3.1.1.32	JUMLAH PUBLIKASI MEDIA CETAK YANG DIBUAT
IKI	3.1.1.33	JUMLAH PUBLIKASI MEDIA ELEKTRONIK YANG DIBUAT

3.1.1.5 TERLAKSANANYA MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN URUSAN KEWENANGAN DINAS		
IKI	3.1.1.5.1	JUMLAH LAPORAN MONEV RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIBUAT
IKI	3.1.1.5.2	JUMLAH LAPORAN MONEV PENERIMAAN PERANGKAT DAERAH YANG DIBUAT
IKI	3.1.1.5.3	JUMLAH LAPORAN MONEV DID PERANGKAT DAERAH YANG DIBUAT
IKI	3.1.1.5.4	JUMLAH LAPORAN MONEV DAK PERANGKAT DAERAH YANG DIBUAT
IKI	3.1.1.5.5	JUMLAH LAPORAN MONEV KINERJA DINAS YANG DIBUAT
IKI	3.1.1.5.6	JUMLAH LAPORAN MONEV KOORDINASI PERANGKAT DAERAH KOORDINASI IPW YANG DIBUAT
IKI	3.1.1.5.7	JUMLAH LAPORAN MONEV PENGADAAN BARANG DAN JASA PERANGKAT DAERAH YANG DIBUAT
IKI	3.1.1.5.8	JUMLAH LAPORAN MONEV CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH YANG DIBUAT
IKI	3.1.1.5.9	JUMLAH LAPORAN HASIL PENGINPUTAN APLIKASI SILAKIP YANG DIBUAT
IKI	3.1.1.5.10	JUMLAH LAPORAN MONEV DATA DAN INFORMASI KINERJA DINAS YANG DIBUAT

Payakumbuh, September 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MUSLIM, ST.M.Si

NIP. 19750402 200003 1 005